



PARIWISATA HALAL

PERSPEKTIF MULTIDIMENSI

*Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik
& Industri Halal di Indonesia*

Oleh

Prof. Dr. H.Muhammad Djakfar, S.H.,M.Ag



UIN-Maliki Press

2017

Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi

*Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik
& Industri Halal di Indonesia*

Prof. Dr. H.Muhammad Djakfar, S.H.,M.Ag
© UIN-Maliki Press, 2017

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penulis : Prof. Dr. H.Muhammad Djakfar, S.H.,M.Ag
Editor : Halim Fathoni
Layout Isi & Sampul : M. Rofiq

UMP
Cetakan I: 2017
ISBN

Diterbitkan pertama kali oleh
UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144
Telepon/Faksimile (0341) 573225
E-mail: admin@uinmalikipress.com
<http://www.uinmalikipress.com>

Kata Pengantar Menteri Pariwisata

Dalam beberapa dekade terakhir, industri halal telah mengalami evolusi. Berawal dari sektor makanan dan minuman kemudian berkembang ke sektor keuangan pada tahun 1970-an disebabkan *booming petrodollar*. Yaitu melesatnya bisnis minyak dan gas bumi khususnya di negara Timur Tengah, sehingga pada masa tersebut timbul kebutuhan akan tersedianya jasa Islamic banking sebagai tempat penyimpanan uang tanpa bunga dan riba hingga menyebar di Inggris, Swiss, dan bagian dunia lainnya. Kemudian pada tahun 2000-an industri halal mulai bergerak ke sektor gaya hidup (*Lifestyle Industry*) termasuk di dalamnya sektor pariwisata, hospitaliti, rekreasi, perawatan medis, hingga mode (*fashion*), kosmetik, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya pertumbuhan populasi Muslim yang besar dan peningkatan kemampuan daya beli mereka yang tinggi.

Berdasarkan data dari PEW Research, populasi Muslim adalah populasi terbesar di dunia yang mencapai angka 1,7 miliar jiwa, dan menurut Thomson Reuters *Global Islamic Economy Report* 2017/2018, konsumsi Muslim adalah terbesar di dunia di 6 sektor yaitu makanan, pariwisata, pakaian, farmasi, media/rekreasi, dan kosmetik sebesar US \$ 2 triliun atau 11,9% dari konsumsi masyarakat di dunia dan angka tersebut di atas konsumsi masyarakat Tiongkok di 6 sektor tersebut sebesar US \$ 1,8 triliun atau 11,3% dari konsumsi masyarakat di dunia.

Selain itu, sedikitnya tercatat 1,2 miliar Muslim adalah pelanggan seluler dengan demografi 60% berusia di bawah 30 tahun yang merupakan usia produktif dan konsumtif pada saat yang bersamaan. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa *Global Halal Market* adalah *High Growth Market* dan bukan lagi sebagai ceruk pasar, melainkan menjadi salah satu pasar utama.

Sejalan dengan *Booming Global Halal Market*, Industri Pariwisata Dunia beberapa dekade terakhir ini mengalami perkembangan yang fenomenal.

Bagi Indonesia Pariwisata merupakan penyumbang PDB, Devisa dan Lapangan Kerja yang paling mudah dan murah. Selain itu menurut SICTA-WTO (*Standard International Classification of Tourism Activities-World Trade Organization*), Pariwisata memberikan dampak ekonomi yang besar mencakup 185 kegiatan usaha yang sebagian besarnya dalam jangkauan UKM.

Dalam era Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, yang telah menetapkan pariwisata sebagai *leading sector* pengembangan ekonomi di Indonesia, pada tahun 2016, Pariwisata sudah berada di posisi kedua terbesar sumber penerimaan devisa negara setelah CPO dan sektor ini diproyeksikan akan menempati posisi pertama terbesar pada tahun 2019.

Pasar Pariwisata Halal termasuk Top 5 Pasar Pariwisata terbesar di dunia. Dengan pengeluaran turis Muslim menurut Thomson

Reuters *SGIE Report* 2017/2018 di tahun 2016 mencapai US\$ 169 miliar dengan tingkat pertumbuhan 6,3% per tahun jika dibandingkan dengan pengeluaran turis dari Tiongkok di tahun yang sama sebesar US\$ 179 miliar dengan tingkat pertumbuhan 3,5% per tahun, pasar Pariwisata Halal adalah termasuk Top 3 sumber wisatawan dunia.

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki 88% populasi Muslim, lebih dari 17.000 pulau, 300 suku, 746 jenis bahasa dan dialek, serta *mega biodiversity* dan lebih dari 800.000 masjid, merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal karena pada dasarnya budaya Indonesia sudah memiliki DNA gaya hidup halal (*halal lifestyle*).

Didukung pula oleh tingkat pertumbuhan Pasar Pariwisata Halal yang pesat, diproyeksikan pada tahun 2020 wisatawan Muslim meningkat 180 juta wisatawan atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 9.08% (*rate of growth forecast*) sejak tahun 2014, maka Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk mengembangkan Wonderful Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik di dunia.

Dalam Pariwisata Halal ini terdapat dua pendekatan, yang pertama adalah pendekatan secara umum yang masih beranggapan bahwa Pariwisata Halal merupakan Wisata Religi. Namun, sebenarnya besaran pasar Wisata Religi menurut data dari Thomson Reuters hanya sebesar US\$ 22,7 miliar yaitu hanya sekitar 1/8 dari total pasar Pariwisata Halal yang sebesar US\$ 169 miliar di tahun 2016.

Adapun pendekatan kedua yang beranggapan bahwa Pariwisata Halal adalah sama seperti pariwisata pada umumnya hanya menyiapkan *Extended Service* (layanan tambahan) bagi wisatawan Muslim. Secara generik, Pariwisata Halal di antaranya adalah dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan dalam bingkai wisata keluarga (*halal lifestyle*).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata telah berkomitmen mengembangkan Pariwisata Halal di Indonesia berkolaborasi dengan Pentahelix (ABCGM) Stakeholder meliputi Akademisi, Bisnis (Pelaku Usaha), *Community* (Komunitas), *Government* (Pemerintah), dan Media.

Hadirnya sebuah karya tulis yang secara khusus mengkaji Pariwisata Halal yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H.,M.Ag dengan tema Pariwisata Halal Perspektif Mutidimensi ini adalah suatu peran yang diharapkan dari pada Akademisi, yang tentu akan sangat membantu program pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia.

Dengan karya ini, harapan saya akan dapat memperkaya khazanah karya ilmiah di bidang kepariwisataan, khususnya pariwisata yang berbasis *halal lifestyle* yang selama ini masih langka. Dengan karya ini pula, harapan saya akan membuka wawasan baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengembangan pariwisata yang sesuai dengan tuntunan norma dan etika budaya Indonesia.

Sesuai dengan anak judulnya, semoga kehadiran buku ini benar-benar akan menjadi peta jalan menuju pengembangan Industri Pariwisata Halal di Indonesia di masa yang akan datang, baik dalam tataran Akademis maupun tataran Praktis yang mampu berdaya saing di tingkat global.

Selamat atas terbitnya buku ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Salam Pesona Indonesia...!

Jakarta, 17 Januari 2018

Menteri Pariwisata,

Arief Yahya



Kata Pengantar Penulis

Dengan ucapan puji syukur ke hadirat Ilahi Robbi, akhirnya karya tulis ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang dicita-citakan. Kiranya banyak faktor yang mendorong penulis untuk menyusun karya tulis ini sekalipun dengan kemampuan dan kesempatan yang terbatas. Namun dengan keterbatasan itulah yang justru lebih memotivasi penulis untuk terus berkiprah dalam dunia akademik, tanpa kecuali dalam dunia ilmu kepariwisataan.

Di antara faktor dimaksud, antara lain pertama, bahwa pariwisata merupakan kebutuhan universal manusia yang tidak akan pernah mati, kini dan akan datang. Sebab itu perlu digarap secara terprogram dan profesional. Kedua, akhir-akhir ini muncul fenomena baru dunia global yang mulai tertarik pada pariwisata yang berbasiskan syariah, sehingga dengan demikian banyak negara sekuler pun yang

dengan serius mengembangkan pariwisata ini. Selain mereka juga tetap mengembangkan wisata konvensional.

Adapun yang ketiga, Indonesia sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, sudah saatnya menggarap pariwisata halal yang selama ini masih ketinggalan dari negara lain, seperti Malaysia dan Thailand. Dan dengan potensi yang dimiliki, ke depan, Indonesia justru akan mampu menjadi kiblat pengembangan industri pariwisata halal kelas dunia, jika dilandasi komitmen yang tinggi dari berbagai pihak dan digarap secara profesional.

Selanjutnya yang keempat, untuk dapat mengelola pariwisata halal yang sangat prospektif dan mulai banyak diminati, selama ini di Indonesia masih belum banyak ditunjang dengan kajian-kajian akademik yang mumpuni, antara lain berkaitan dengan ketercukupan khazanah pustaka yang sangat diperlukan untuk memberi wawasan baru kepada para pemangku kepentingan. Padahal sejatinya untuk mempercepat pengembangan pariwisata halal di Indonesia dukungan akademik sangat dibutuhkan seperti adanya hasil penelitian, workshop, seminar, penulisan karya ilmiah dan lain sebagainya.

Karena itu bertolak dari beberapa faktor di atas, dengan karya yang sederhana ini, penulis sangat berharap agar apa yang tertuang di dalamnya akan menambah wawasan akademik kepada para dosen maupun mahasiswa yang berminat untuk mendalami kajian pariwisata yang berlandaskan prinsip syariah. Di samping sebagai bahan urun rembuk kepada para penguasa selaku pemangku kebijakan, para pengusaha, praktisi dan siapa pun yang berminat untuk mengembangkan bisnis pariwisata halal di masa yang akan datang.

Dengan rampungnya karya ini tentu banyak pihak yang patut mendapatkan ucapan terima kasih. Antara lain Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN-Maliki) Malang yang telah memberi fasilitas yang dibutuhkan.

Demikian juga kepada Penerbit UIN-Maliki Press Malang yang telah menerbitkan naskah ini. Dan secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag.,M.Si yang sejak menjabat sebagai Wakil Dekan I, FE-UIN Maliki Malang mendorong penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini. Semoga ini semua menjadi bagian dari amal shaleh mereka.

“Tak ada gading yang tak retak,” demikian pepatah lama mengatakan. Artinya, jika di dalam wacana ini ada kekurangan dan kekhilafan, penulis sangat terbuka untuk dilakukan saran dan koreksi. Tentu hal ini untuk kesempurnaan karya ini demi pengembangan keilmuan di bidang kepariwisataan berbasis syariah ke depan.

Demikian, semoga bermanfaat. Amin

Penulis



Daftar Isi

Kata Pengantar Menteri Pariwisata	iii
Kata Pengantar Penulis	vii
Daftar Isi	xi

Bagian Pertama

Pendahuluan

Sebuah Gambaran Umum	1
Bab I Pendahuluan	3
A. Latar Belakang Penulisan	3
B. Fokus Kajian	10
C. Tujuan dan Ruang Lingkup Kajian	11
D. Manfaat yang Diharapkan	12
E. Signifikansi Penulisan	13
F. Beberapa Istilah Kunci	15
G. Metode dan Jenis Kajian	16
H. Subjek dan Situs Kajian	18
I. Sumber dan Analisis	20

Bagian Kedua

Kajian Pustaka

Kajian Teoritis-Normatif	23
Bab II Kajian Teoritis-Normatif	25
A. Pengertian: Gambaran Umum	25
B. Pariwisata: Antara Konvensional dan Syariah ...	30

C.	Sandaran Normatif dan Sumber Daya Manusia	33
D.	Posisi dan Fungsi Pariwisata Halal di Era Modern	36
	1. Pariwisata: Antara Kebutuhan dan Dampak Ekonomi	36
	2. Pariwisata Halal: Butuh Inovasi dan Kreasi Baru.....	39
E.	Sandaran Yuridis dan Etis	44
	1. Sandaran Syar'i: Butuh Kepastian Hukum Secara Syariat	44
	2. Butuh Sentuhan Etika dan Kearifan Lokal (<i>Local Wisdom</i>)	46
	3. Peran Pakar: Perlu Produk Fatwa dan Pengawas Syariah	48
	4. Perundangan Nasional: Butuh Kepastian Hukum dan Kebebasan Berusaha	50
F.	Karakteristik: Mempertegas Prinsip dan Keunikan	51
	1. Antara Paradigma Spiritualistik dan Materialistik	51
	2. Persentuhan Dimensi Duniawi dan Ukhrawi	55
	3. Sebuah Ekspresi Ajaran <i>Rahmatan lil 'Alamin</i> dalam Dunia Bisnis	56
	4. Sebagai Media Dakwah <i>bi-al-Hal</i>	59
	5. Medan <i>Silat al-Rahim</i> dan <i>Fastabiq al-Khairat</i> ..	63
	6. Sumber Daya Manusia: Butuh Penguasaan Sains dan Syariah	66
	7. Infrastruktur Pendukung	68
G.	Strategi Pengembangan Destinasi	70

Bagian Ketiga

Pariwisata Halal

Kajian Normatif Multidimensi	79
Bab III Pariwisata Halal: Perspektif Hukum Islam (<i>Fiqh</i>)	81
A. Pengantar	81
B. Hukum Islam: Gambaran Umum	83
C. Tujuan Utama Hukum Islam (Peranan Syariah Islam)	85
D. Ciri-ciri/Karakteristik Hukum Islam	88
E. <i>Al-Ahkam al-Khamsah</i> : Posisi Hukum Wisata Halal	91
F. Hukum Islam dan Perkembangan Kepariwisata	91
G. Objek dan Infrastruktur	94
1. Objek Wisata: Destinasi (Sasaran Kunjungan)	94
2. Perhotelan: Infrastruktur Akomodasi	104
3. Restoran: Infrastruktur Kebutuhan Konsumsi	107
4. Travel: Infrastruktur Biro Perjalanan dan Transportasi	109
5. Sumber Daya Manusia (<i>Human Resources</i>)	111
H. Catatan Akhir	114
Bab IV Pariwisata Halal: Perspektif <i>Maqashid al-Syariah</i>	115
A. Pengantar	115
B. <i>Maqashid al-Syariah: Hifdz al-Din</i> (Melindungi Akidah)	117
C. <i>Maqashid al-Syariah</i> : Pandangan Para Pakar	119
D. Mewujudkan <i>Mashlahah</i> : Tujuan Mendasar Syariah	124

E.	Mengejar <i>Mashlahah</i> , Menolak <i>Mafsadah</i> : Esensi Utama <i>Maqashid al-Syariah</i>	126
F.	<i>Maqashid al-Syariah</i> : Posisi Pariwisata Halal sebagai Kebutuhan Universal	127
G.	Pariwisata Halal: Antara <i>Mashlahah</i> dan Fitrah ..	128
H.	<i>Al-Dzari'ah</i> : Antara <i>Mashlahah al-Khashshah</i> dan <i>Mashlahah al-'Ammah</i>	131
I.	Sumber Daya Manusia: Pengawal <i>Maqashid al-Syariah</i> dalam Pariwisata	134
J.	Catatan Akhir	136
Bab V	Pariwisata Halal: Perspektif Ekonomi Islam	138
A.	Pengantar	138
B.	Karakteristik Ekonomi Islam: Pandangan Antarpakar	139
C.	Relasi Pariwisata Halal dengan Nilai-nilai <i>Rububiyah (Uluhiyyah)</i>	141
D.	Pariwisata Halal: Wahana Ukhuwah Universal (<i>Insaniyyah</i>).....	142
E.	Pariwisata Halal: Butuh Panduan Nilai-nilai Etis (<i>Akhlaqiyyah</i>)	143
F.	Antara Korporat dan Konsumen: Perlu Keseimbangan (<i>Washatiyyah</i>)	145
G.	Pariwisata Halal: Antara Kehendak Bebas dan Tanggungjawab Jawab (<i>Masuliyyah</i>)	146
H.	Catatan Akhir	147
Bab VI	Pariwisata Halal: Perspektif UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	149
A.	Pengantar	149
B.	Tujuan Jaminan Produk Halal: Menuju Kepastian Hukum	151

C.	Pelaku Usaha: Antara Hak dan Kewajiban	153
D.	Label Halal: Bukti Keabsahan Suatu Produk	155
E.	Peran Serta Masyarakat: Perlu Dukungan Semua Pihak	157
F.	Ketentuan Pidana: Menguji Tanggung Jawab	158
G.	Catatan Akhir	159
Bab VII	Pariwisata Halal: Perspektif UU RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	161
A.	Pengantar (<i>Madhal-Introduction</i>)	161
B.	Pariwisata Halal: Perspektif Perlindungan Konsumen	162
C.	Asas dan Tujuan: Suatu Target Akhir yang Diidealkan	165
D.	Hak dan Kewajiban: Butuh Keseimbangan Antarpihak	166
E.	Larangan dan Tanggung Jawab Bagi Pelaku Usaha	168
F.	Sanksi (<i>Punishment</i>)	170
G.	Catatan Akhir (<i>Ikhtitam</i>)	171
Bab VIII	Pariwisata Halal: Perspektif Fatwa DSN-MUI	172
A.	Pengantar	172
B.	Pijakan Yuridis secara <i>Syar'I</i>	173
C.	Ketentuan Hukum dan Prinsip Umum	178
D.	Ketentuan Destinasi Wisata	179
E.	Ketentuan Infrastruktur Perndukung	180
F.	Catatan Akhir	183

Bagian Keempat

Pariwisata Halal dan Kearifan Lokal	185
--	------------

Bab IX	Pariwisata Halal dan Kearifan Lokal: Potensi, Inovasi, dan Aksi	187
A.	Pengantar	187
B.	Budaya Nusantara: Beragam Potensi yang Butuh Aksi	189
C.	Kuliner Nusantara: Beragam Jenis Makanan yang Butuh Inovasi	191
D.	Wisata Religi: Ekspresi Wisata Spiritual/ Transenden yang Perlu Dilestarikan	193
E.	Kekayaan Alam: Nikmat Tuhan yang Perlu Dieksplorasi	194

Bagian Kelima

Penutup	199
A. Kesimpulan	201
B. Saran (Rekomendasi)	208
Daftar Pustaka	211
Tentang Penulis	221



Bagian Pertama

Pendahuluan Sebuah Gambaran Umum



Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Penulisan

Berbicara tentang wisata sejatinya sudah sedemikian populer di kalangan masyarakat, terutama masyarakat urban dan negara maju. Nampaknya wisata, merupakan kebutuhan hidup bagi mereka, sekalipun tidak sama tingkat kebutuhannya sebagaimana pangan, sandang dan papan. Karena itu masyarakat negara maju atau perkotaan tidak jarang yang merancang agenda khusus untuk melakukan wisata dengan dana khusus yang disediakan. Bagi mereka berwisata merupakan sarana untuk *refresh*, menambah pengalaman dan wawasan baru yang dapat mendukung pengembangan kepribadian dan profesi yang ditekuni sehari-hari.¹

¹ Dalam kaitan ini, baca Henky Hermantoro, *Creative –Based Tourism Dari Wisata Rekreatif Menuju Wisata Kreatif* (Depok: Penerbit Aditri, 2011), 53-69. Dalam buku ini dikaji secara panjang lebar mengenai motivasi apa saja yang mendorong masyarakat untuk melakukan wisata yang dianggap sebagai sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi.

Akan tetapi dalam realitas, pengunjung wisata tidak saja didominasi oleh segelintir komunitas sebagaimana tersebut di atas, karena dalam kenyataan semua kalangan masyarakat pasti berminat untuk melakukan wisata. Karena itu ke depan, industri wisata merupakan bisnis yang prospektif sehingga berbagai negara mana pun di dunia terus menatakelola secara profesional objek-objek wisatanya, agar mempunyai nilai ekonomi yang semakin maksimal.² Mereka terus mengembangkan destinasi wisata baru, baik yang berbasis sumber daya alam, sejarah (*legacy*), religi, bisnis (ekonomi) maupun teknologi. Atau, bisa pula yang berbasis budaya dan pendidikan yang berdampak edukasi dan menambah cakrawala baru bagi anak-anak kita sejak usia anak dan remaja.

Pantai Sanur di Bali, Raja Ampat di Papua, Danau Toba di Sumatera, Gunung Merapi di Jawa Tmur, Pantai Senggigi di Lombok, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Puncak di Jawa Barat, Pantai Ancol di Jakarta, dan lain-lain adalah di antara sekian banyak destinasi wisata yang berada di Nusantara. Demikian pula Candi Borobudur dan Perambanan di Jawa Tengah merupakan salah satu contoh wisata berbasis sejarah atau religi di Indonesia. Sedangkan makam Walisongo yang berada di sepanjang Pulau Jawa³, termasuk makam Kiai (Mbah) Cholil di Bangkalan, makam Batu Ampar di Pamekasan, makam Syaikh Jusuf di Pulau Telango Sumenep, dapat dikatakan mewakili wisata religi yang berbasis Islam. Adapun Taman Mini di Jakarta yang dibangun pada masa Orde Baru merupakan salah satu contoh wisata yang berbasis teknologi di ibu kota negara karena pembangunannya lebih banyak diwarnai intervensi manusia. Selain itu, munculnya pusat-pusat perbelanjaan baru di berbagai kota, kiranya dapat dikategorikan sebagai destinasi wisata baru di era modern yang berbasis ekonomi. Karena pengunjung selain untuk belanja, sekaligus termotifasi untuk rekreasi bersama keluarga.

² Bandingkan dengan Sedarmayanti, *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 123-135

³ I. Rofi'ie Ariniro, *Panduan Wisata Religi Ziarah Wali Sanga* (Yogyakarta: Saufa, 2016)

Agaknya akhir-akhir ini, masalah wisata mengalami perkembangan baru yang tidak saja menjadi fenomena lokal dalam sebuah negara tertentu, namun justru berubah menjadi fenomena global sebagaimana kita cermati melalui berbagai media. Fenomena ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping karena faktor-faktor lain yang sedemikian bervariasi dan kompleks. Katakan saja karena faktor psikologis, manusia selalu cenderung mencintai sesuatu yang bernuansa baru sehingga apa pun yang lama sudah mulai tidak diminati, atau setidaknya kurang menarik lagi. Katakan saja yang berkaitan dengan masalah wisata, akhir-akhir ini masyarakat sudah mulai tertarik dengan wisata yang berbasis syariah. Tentu saja hal ini sejalan dengan tingkat kesadaran religiositas masyarakat yang sudah mulai tumbuh, tidak saja di negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya sebagai Muslim, bahkan juga di negara-negara sekuler sekali pun.

Atau dengan kata lain, akhir-akhir ini, wisata halal sudah semakin banyak diminati, sehingga diprediksi akan mempunyai prospek yang menjanjikan.⁴ Oleh sebab itu industri pariwisata jenis baru ini perlu digarap secara profesional agar mempunyai daya saing yang kuat di pentas global yang pada akhirnya akan semakin memperkuat pemasukan devisa bagi negara masing-masing yang bersangkutan.⁵ Karena bagaimanapun daya saing merupakan salah satu faktor kunci yang akan menentukan penyerapan wisatawan untuk berkunjung ke sebuah Negara.⁶

⁴ Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk Muslim terbesar, saat ini mulai serius menyajikan destinasi wisata halal untuk mengincar wisatawan mancanegara (wisman) Muslim. Berdasarkan studi Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2016, total jumlah wisatawan Muslim dunia mencapai 117 juta pada 2015. Jumlah itu diperkirakan bertambah hingga mencapai 168 juta wisatawan pada 2020 dengan pengeluaran di atas 200 miliar atau sekitar Rp.2.600 triliun. Lihat, Muhammad Nursyamsy dan Sapto Andika Candra, "Berlomba Kembangkan Wisata Halal," dalam *Republika*, edisi 16 Agustus 2017,

⁵ Janianton Damanik, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 50-58. Lihat pula, Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2013), 193-197

⁶ Bandingkan dengan Uyunur Rochmawati Miladiyah dan Slamet, "Strategi Competitive Advantage Untuk Membangun City Branding Kota Batu Sebagai Kota Wisata," dalam *Iqtishoduna, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2014, 89-99

Karena itu berkaca pada fenomena baru tersebut dalam kaitan dengan mulai dikembangkannya wisata halal, mampukah Indonesia ke depan mengembangkan destinasi wisata halal dengan banyak mengeksplorasi kekayaan sumber daya yang telah dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia selama ini. Nusa Tenggara Barat misalnya, adalah salah satu contoh kawasan yang saat ini secara *all out* mengembangkan wisata halal internasional (tingkat dunia). Dan sebagai konsekuensinya mereka mendapatkan penghargaan sebagai salah satu destinasi wisata nomor satu di tingkat dunia. Berikutnya menyusul daerah Sumatra Barat dan Aceh yang terus memprogram dan berbenah untuk menjadi wisata halal di Indonesia. Bahkan lebih dari itu, di Indonesia telah diproyeksikan sebanyak sepuluh destinasi wisata halal baru.

Dilihat dari aspek potensi sebagai destinasi baru wisata halal, ketiga daerah propinsi tersebut perlu diakui secara jujur dan objektif. Dari aspek potensi alam, misalnya, ketiganya mempunyai panorama alam yang sangat indah sehingga layak untuk dijual. Demikian pula dari aspek religiositas, ketiganya sama-sama dihuni oleh pemeluk Islam yang taat dan kuat sehingga banyak terma keislaman yang menjadi ikon spesifik yang menjadi karakter daerah masing-masing sebagai salah satu kunjungan wisata yang berbasis syariah.

Provinsi Nusa Ternggara Barat yang beribukotakan Mataram, kesohor sebagai Pulau Seribu Masjid. Demikian pula Jam Gadang dan karakter budayanya di Sumatra Barat dan Majid Baiturrahman di Aceh,. Kesemuanya merupakan ikon yang sarat dengan muatan nilai historis-religius yang lekat dengan nilai-nilai keislaman (syariah). Ikon-ikon ini tentu saja akan banyak mengandung makna, sekaligus semakin mempertegas bahwa ketiga wilayah tersebut sangatlah layak menjadi destinasi wisata halal di Indonesia. Namun demikian perlu diakui, selain ketiga daerah tersebut tentu masih banyak daerah-daerah lain di Nusantara yang sejatinya dapat dikembangkan pula sebagai destinasi wisata halal di masa yang akan datang. Dengan tidak menghilangkan eksistensi (keberadaan) dari pariwisata yang tidak atau kurang Islami, tetapi sejatinya pariwisata sekuler ini dapat

ditingkatkan nilai jual dan daya tariknya sebagai paket perjalanan pariwisata yang bernuansa Islami. By not losing the essence of this area as a village which is very un-Islamic and habitual but actually makes the sale value and attractiveness in the field of travel.⁷

Untuk itu jika dilihat dari potensi besar dan sedemikian variatif yang dimiliki bangsa Indonesia,⁸ maka sejatinya kita dituntut untuk mengelolanya secara maksimal dan profesional agar nantinya dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia secara umum dan merata⁹. Terlebih lagi dengan semakin melemahnya pendapatan dari sektor minyak kelapa sawit (CPO), minyak, dan gas yang selama ini masih mendominasi pemasukan bagi negara. Karena itu, ke depan, pemerintah agaknya mulai menargetkan agar industri pariwisata menjadi sumber devisa yang utama untuk mengisi pundi-pundi APBN.

Menurut Menteri Pariwisata, tahun 2014 sektor pariwisata masih menduduki posisi keempat penyumbang devisa negara dengan nominal 10,05 miliar (setara dengan Rp. 135,67 triliun) di bawah migas, batu bara, dan CPO. Namun demikian, tahun 2016 sektor pariwisata berhasil naik peringkat kedua dengan perolehan 13,56 miliar dolar AS (di bawah CPO dengan 15,96 miliar dolar AS). Sebaliknya, sektor migas justru menduduki posisi yang ketiga.¹⁰

Indonesia adalah sebuah negara besar, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yakni sebesar 207.176.162 (BPS, 2010). Selain kaya dan indah, juga mempunyai keunikan tersendiri yang jarang dimiliki oleh negara manapun di dunia. Keunikan itulah sejatinya yang diharapkan mempunyai nilai jual tinggi kepada bangsa lain di dunia internasional. Bukankah keunikan itu adalah rahmat, sekaligus sebagai amanah yang harus tetap dijaga

⁷ Mila Falma Masful, "Halal Tourism: A Value of Local Wisdom Belief Concept in Rural Pilubang Payakumbuh, West Sumatera," *The Messenger*, Volume 9, Nomor 1, edisi Januari 2017. mila.falma88@gmail.com

⁸ Damanik, *Pariwisata Indonesia*, 31-63

⁹ Ibid., 31

¹⁰ Lihat, Debbie Sutrisno, "Pariwisata Bisa Jadi Sumber Devisa Terbesar," dalam *Republika*, edisi 18 Oktober 2017, 13

dan dipelihara oleh bangsa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai khalifatullah di muka bumi.

Membangun destinasi wisata halal yang berbasis syariah di Indonesia tidaklah mudah, karena selain masih relatif baru, juga dibutuhkan sumber daya manusia atau pengelola yang profesional dan mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang ajaran syariah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, di samping merupakan peluang yang membutuhkan aksi. Bukankah membangun wisata halal merupakan bagian dari ekspresi membumikan ajaran langit (Tuhan) ke ranah bisnis, sekaligus sebagai wahana menerjemahkan ajaran *rahmatan lil 'alamin* di tengah kehidupan manusia.

Sebab itu kehadiran destinasi wisata halal harus menunjukkan karakternya yang khas (unik) yang membedakannya dari wisata konvensional yang sekuler yang telah berkembang sedemikian lama. Keunikan itu dengan sendirinya dapat dicermati dari bagaimana sistem pengelolaannya dan berbagai atraksinya yang menggambarkan nuansa religiositasnya. Jika tidak, maka justru akan menimbulkan kesan seakan-akan tidak ada bedanya dengan destinasi konvensional yang telah berjalan selama ini.

Di antara tantangan yang ada selama ini antara lain perlu diakui bahwa sebagai destinasi wisata yang relatif baru dan berpredikat halal, sudah barang tentu masih perlu mencari format yang benar-benar mencerminkan ajaran syariat Islam yang bersumber pada ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Untuk menemukan format yang dianggap pas dan valid, tentu saja masih dibutuhkan proses panjang. Format itulah yang akan menjadi indikator, sekaligus pembeda dengan atmosfer atraksi wisata konvensional yang ada selama ini yang bersumber dari produk pemikiran manusia (*sains*).

Selain itu, kehadiran wisata halal jelas merupakan menu atau alternatif baru bagi masyarakat luas untuk memilih destinasi wisata sesuai dengan keyakinannya.¹¹ Karena itu bukanlah tidak mungkin,

¹¹ Sureerat Chookaew, et al., "Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country," *Journal of Economics, Business and Management*, Vol.3 No. July 2015

di dalam wisata halal itu sendiri selain ada tujuan utama, yakni motif berlibur (duniawi-profan), sekaligus merupakan bagian dari ibadah (ukhrawi-transenden) bagi yang bersangkutan. Sebab itu untuk mengkonstruks format destinasi wisata yang benar-benar Islami dibutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan tanpa kecuali dukungan sumber daya manusia yang memadai dan kapabel di segala lini yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan atraksi destinasi wisata halal yang akan dibangun.¹²

Sekadar ilustrasi, kiranya perlu dikedepankan dalam latar belakang ini. Dalam aktivitas wisata, pengunjung (wisatawan) bagaikan tamu yang berkunjung ke rumah keluarga Muslim (destinasi). Dalam Islam, setiap tamu wajib dihormati, antara lain dengan dijamu suguhan yang layak dan pantas (atraksi-objek wisata), disertai dengan pelayanan yang prima oleh sang tuan rumah (sumber daya manusia). Agar sang tamu merasa betah dan senang (*enjoy*), hendaknya suasana dan kondisi rumah harus bersih dan damai bersahabat (lingkungan-sosial). Selain juga perlu perabot rumah dan segala fasilitas (daya dukung) seperti penerangan yang cukup, ruang tamu, ruang shalat (*mushalla*), ruang makan, kamar tidur, kamar mandi dan lain sebagainya yang kesemuanya bersih, nyaman dan tertata rapi. Atau bahkan jika perlu sang tuan rumah menyiapkan sarana transportasi jika sekiranya si tamu butuh berkunjung ke tempat lain. Demikian seterusnya.

Perlunya penataan rumah dengan berbagai fasilitas tersebut, karena bisa jadi sang tamu perlu dijamu makan, butuh untuk shalat, butuh istirahat untuk tidur (bermalam), butuh toilet untuk buang air atau mandi dan lain sebagainya. Pada akhirnya, setelah sang tamu pulang, niscaya ia akan puas karena merasa dihormati sehingga muncul imej positif bahwasanya keluarga yang telah dikunjungi tadi adalah profil keluarga (destinasi) yang baik dan ideal secara syar'i serta layak untuk dijadikan contoh oleh keluarga-keluarga (destinasi) yang lain.¹³

¹² Dalam hal ini, lihat Sedarmayanti, *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan*, 137-148

¹³ Lihat, dan bandingkan dengan, I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*

Atau bahkan dengan ilustrasi lain, pengunjung dapat diibaratkan sebagai konsumen yang harus dilindungi oleh produsen. Atau, sebagai pembeli yang harus dihormati oleh penjual. Karena sejatinya, secara etis dan yuridis, konsumen dan produsen sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang setara sehingga tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Demikian pula dalam kaitan hubungan antara pembeli dan penjual.

Adapun karya tulis dengan pendekatan pustaka ini termotivasi untuk melengkapi kajian akademik yang selama ini masih dianggap langka dalam kaitan dengan wisata halal, baik dalam bentuk hasil penelitian lapangan (kancah) maupun kajian pustaka dalam bentuk buku. Bahkan juga kajian tentang pariwisata dalam arti umum.¹⁴ Padahal sejatinya kedua bentuk hasil kajian akademik itu sangatlah krusial sekali sebagai pengayaan khazanah pustaka untuk pengembangan industri pariwisata halal di masa yang akan datang.

B. Fokus Kajian

Bertolak dari latar belakang penulisan di atas, maka fokus kajian ini dapat dirumuskan sebagai-berikut:

1. Bagaimanakah pariwisata halal dalam perspektif Hukum Islam (*Fiqh*)
2. Bagaimanakah pariwisata halal dalam perspektif *Maqashid al-Syariah*
3. Bagaimanakah pariwisata halal dalam perspektif Ekonomi Islam
4. Bagaimanakah pariwisata halal dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

(Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), 64-68; Otto R. Payangan, *Pemasaran Jasa Pariwisata* (Bogor: IPB Press, 2014), 137-169, dan Agung Permana Budi, *Manajemen Marketing Perhotelan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), 71-74

¹⁴ Damanik, *Pariwisata Indonesia*, v

5. Bagaimanakah pariwisata halal dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. Bagaimanakah pariwisata halal dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
7. Bagaimanakah potensi Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) dalam kaitan dengan pengembangan industri pariwisata halal di Indonesia

C. Tujuan dan Ruang Lingkup Kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk mengeksplor dan mendeskripsikan:

1. Bagaimanakah pariwisata halal dalam perspektif Hukum Islam (*Fiqh*)
2. Bagaimanakah pariwisata halal dalam perspektif *Maqashid al-Syariah*
3. Bagaimanakah pariwisata halal dalam perspektif Ekonomi Islam
4. Bagaimanakah pariwisata halal dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
5. Bagaimanakah pariwisata halal dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. Bagaimanakah pariwisata halal dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

7. Bagaimanakah potensi Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) dalam kaitan dengan pengembangan industri pariwisata halal di Indonesia

Adapun ruang lingkup objek yang akan dikaji dalam karya ini adalah masalah pariwisata halal yang akhir-akhir telah menjadi fenomena baru. Atau apa yang menjadi destinasi baru di dunia kepariwisataan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang saat ini mulai banyak dikembangkan di berbagai negara, seperti Indonesia. Atau, untuk jelasnya, kajian ini akan membahas tentang pariwisata dalam perspektif multidimensi yang bersumber dari ajaran wahyu, yakni kitabullah dan sunnaturnasul, maupun sains dan sumber lain yang relevan.

Untuk lebih konkretnya, secara akademik, ruang lingkup kajian meliputi terminologi wisata beserta sandaran teologis dan karakteristiknya (*ontology*), termasuk bagaimana tata kelola objek dan daya dukung destinasi, beserta aspek-aspek lain yang terkait (*epistemology*). Dan terakhir masalah peran dan perilaku masing-masing komunitas sumber daya manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai penguasa, pengusaha, para ilmuwan (ulama) dan pengguna wisata (aksiologi).¹⁵ Karena bagaimanapun di tangan merekalah sukses tidaknya industri pariwisata halal dikembangkan saat ini dan akan datang.

D. Manfaat yang Diharapkan

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil kajian ini, antara lain:

1. Secara akademik, hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan wacana, sekaligus khazanah keilmuan baru yang selama ini dirasa masih sangat terbatas sekali, terutama hasil kajian dan penulisan dasar yang terkait langsung dengan pengembangan destinasi wisata halal. Sebab itu di dunia perguruan tinggi,

¹⁵ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), 7-31

seperti Universitas Gajah Mada Yogyakarta, masalah pariwisata sudah mulai diangkat sebagai objek kajian dan penelitian tersendiri.¹⁶

2. Secara praktis dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah di tanah air yang saat ini sedang atau akan mengembangkan pariwisata berbasis syariah sebagai bahan pertimbangan menelorkan kebijakan-kebijakan baru yang dapat mendukung perkembangan destinasi wisata sesuai dengan yang diprogramkan.¹⁷
3. Secara lebih luas, diharapkan pula hasil kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan atau peraturan baru ke depan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata halal di tanah air.
4. Bagi masyarakat, kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru dalam kaitan dengan masalah pariwisata halal, sehingga dengan demikian mereka mampu mempersiapkan diri sebagai pelaku yang dapat memberi manfaat kesejahteraan secara ekonomi.

E. Signifikansi Penulisan

Pertanyaan mendasar yang perlu dikedepankan adalah justru mengapa kajian ini perlu dilakukan. Tentu saja hal ini, dapat dipahami dari berbagai ranah. Namun demikian yang menjadi alasan utama adalah karena permintaan pasar, khususnya yang berkaitan dengan destinasi wisata halal. Bukankah hampir semua negara di dunia, terutama yang mempunyai nilai jual, mereka saat ini mulai mengelola industri pariwisatanya masing-masing secara maksimal dan profesional.¹⁸ Bahkan beberapa negara non-Muslim

¹⁶ Lihat dan bandingkan, Damanik, *Pariwisata Indonesia*, dan Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan*.

¹⁷ Lihat dan bandingkan, Sedarmayanti, *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan*, 101-113

¹⁸ Chookaew, *Increasing Halal Tourism*, 739

pun (sekuler) yang sudah menggarap segmen wisata halal (*Islamic tourism*)) adalah Australia, Taiwan, Korea, Jepang, dan beberapa negara di Eropa.¹⁹

Mereka menyadari bahwa kemajuan bidang pariwisata akan memberi dampak ekonomi untuk memperkuat anggaran pendapatan negara (*income*) dalam negeri masing-masing. Di samping akan berimbas pula pada kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam hal ini bisa dikemukakan contoh konkret adalah negara Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dilihat dari sumber daya alam, budaya dan sumber daya manusia yang dimiliki, ketiga negara ini tidak sebanding dengan negara Indonesia. Akan tetapi karena ketiganya memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat diandalkan, mereka tidaklah sedikit menagguk keuntungan dari sektor pariwisata yang dikelolanya selama ini.

Sebab itu dalam kaitan ini, Indonesia secara realitas menyimpan banyak potensi yang sudah ada dan yang masih akan dikembangkan sehingga negara kita nantinya akan dikenal sebagai salah satu destinasi wisata di dunia.²⁰

Untuk itu, untuk menjadikan wisata di kawasan Nusantara ini yang berlabel halal rasanya tidaklah banyak kendala yang menghambat karena lebih banyak potensi pendukung yang menjadi andalannya. Karena itu dengan dilakukannya kajian ini hasilnya diharapkan akan banyak memberi kontribusi yang bermakna dalam mewujudkan kawasan Indonesia sebagai distnasi wisata halal di dunia internasional.

Untuk itu, dengan adanya label halal itu, ke depan, Indonesia diharapkan akan semakin banyak menyerap wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang pada akhirnya akan memberi dampak positif semakin meningkatnya *income* dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain juga akan dapat meningkatkan devisa bagi

¹⁹ Oraphan Chanin, et al, "Guidelines on Halal Tourism Management in the Andaman Sea Coast of Thailand," *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3 No. July 2015

²⁰ Bandingkan dengan , Payangan, *Pemasaran Jasa*, 1

negara secara nyata.²¹ Inilah relevansi, sekaligus signifikansinya, justru mengapa kajian ini perlu dilakukan.

F. Beberapa Istilah Kunci

Beberapa istilah kunci yang banyak ditemui dan perlu didefinisikan dalam kajian ini adalah:

1. **Pariwisata Halal.** Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud dengan halal adalah ketentuan hukum syariat, dalam arti, seseorang dikatakan sah melakukan suatu aktivitas, apabila dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan pariwisata halal adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dengan demikian seringkali juga disebut dengan istilah pariwisata syariah.
2. **Destinasi Wisata Halal.** Destinasi adalah tujuan, sedangkan wisata adalah berkunjung ke suatu tempat yang mempunyai objek-objek tertentu seperti alam, dunia binatang, budaya, perdesaan dan sebagainya dengan motif untuk refreking (rekreasi). Sedangkan wisata halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian yang dimaksud destinasi wisata halal dalam kajian ini adalah tujuan atau tempat kunjungan wisata yang dibenarkan atau sesuai ketentuan syariat Islam. Istilah wisata halal ini banyak ditemui di dalam kajian, karena wisata itu sendiri adalah merupakan inti dari aktifitas pariwisata dalam dunia riil (industri pariwisata)
3. **Normatif** yang berasal dari kata dasar norma (ugeran) dimaksudkan adalah ukuran untuk menentukan sesuatu. Artinya, apakah sesuatu itu sesuai dengan ukuran atau tidak,

²¹ Azhar Harun dan Eko Prayitno, "The Important Factors of Tourism Development in Singapore," dalam *Iqtishoduna, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2011, 91-97

tergantung pada norma yang berlaku, baik yang sumber dari ajaran agama maupun sains seperti norma etika, hukum, budaya (keartifan lokal) dan lain-lainnya.

Untuk mengembangkan pariwisata halal yang berbasis syariah tidak hanya butuh dukungan norma-norma religiositas, namun juga norma-norma ilmu pengetahuan dan norma-norma lain yang relevan. Oleh karena itu, secara akademik, pariwisata halal dapat dikaji dari berbagai dimensi norma untuk dapat dijadikan pedoman pengembangan dalam praktik.

4. Multidimensi merupakan gabungan dari dua kata, yakni multi dan dimensi. Multi berarti beraneka ragam atau bermacam-macam, sedangkan dimensi bisa berarti ukuran, besar atau luas. Dengan demikian yang dimaksud dengan multidimensi di sini adalah beragam ukuran, yang artinya bahwa yang dijadikan ukuran tidaklah tunggal, namun lebih dari satu.

Dengan bertolak dari definisi istilah di atas, maka yang dimaksud dengan tema besar (*grand theme*) telaah karya ini adalah kajian tentang kegiatan pariwisata halal dalam perspektif berbagai macam norma agar ke depan dapat dijadikan pedoman (petunjuk jalan-*guideline*) pengembangan ilmu kepariwisataan berbasis syariah secara komprehensif dan pengembangan industri halal di tanah air.

G. Metode dan Jenis Kajian

Perlu diakui pariwisata halal yang berbasis syariah, akhir-akhir ini, di tengah maraknya sistem kapitalis, telah menjadi fenomena baru di pentas global. Fenomena tersebut tidak hanya ditemui di kawasan negara-negara Islam dengan segala sistem ketatanegaraannya seperti ekonominya bersumber dari ajaran wahyu, bahkan di negara-negara non Muslim pun di kawasan Eropa misalnya, saat ini sudah mulai mencoba untuk mengembangkan wisata halal yang berbasis wahyu pula. Katakan saja India, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang, keempat negara ini, akhir-akhir ini bertekad untuk mengembangkan

wisata yang bernuansa baru kendati mayoritas penduduknya adalah non Muslim.

Pilihan yang tak lazim ini, bukanlah tanpa alasan yang matang dari segi pengembangan ekonomi, karena nampaknya mereka mulai mengintrospeksi diri bahwasanya dunia pariwisata konvensional yang telah lama berakar dan berkembang selama ini, ternyata bukanlah satu-satunya potensi ekonomi yang dapat dijual di tengah perkembangan global. Ternyata ada sistem lain yang sudah mulai banyak diminati di dunia internasional, yakni destinasi wisata halal.

Sebab itu, dengan berpaling kepada sistem yang mulai banyak diminati pasar, kiranya merupakan pilihan yang tepat dan sungguh rasional dalam prospektif ekonomi bagi sebuah negara. Namun demikian di balik program pengembangan itu perlu sekali didukung oleh berbagai hasil kajian akademik yang memadai, baik dalam bentuk tulisan maupun hasil penelitian. Sebab itu inilah sejatinya salah satu pertimbangan justru mengapa kajian ini perlu dilakukan, antara lain adalah untuk mendorong tumbuh kembangnya pariwisata yang berlabel halal secara syar'i.

Karya tulis ini sejatinya termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yang tentu saja berbeda dengan penelitian lapangan (*field research*) yang dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yakni kuantitatif dan kualitatif. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka dengan sendirinya data yang diperlukan cukup digali dari bahan-bahan kepustakaan yang ada yang dianggap relevan. Termasuk dari berbagai wacana yang bertalian dengan masalah pariwisata halal.

Atau dengan kata lain, kajian ini kiranya cukup memanfaatkan data sekunder yang telah terkodifikasi dan terpublikasi dari berbagai bahan kepustakaan yang ada, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang ditulis oleh pakar dalam bidangnya.²² Terutama artikel-artikel dalam jurnal maupun yang termuat dalam berbagai media cetak dan elektronik.

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2

Dengan demikian data kajian ini, bahan kajiannya, bukanlah data primer, sehingga tidak diperlukan studi lapangan. Akan tetapi, bagaimanapun dalam hal ini, penulis (pengkaji) dituntut bersikap kritis di dalam memilih bahan kepustakaan dan berita terpublikasi secara tepat tentang objek yang dikaji agar tidak menimbulkan bias yang tidak diinginkan.²³ Karena jika terjadi, maka dikhawatirkan akan berpotensi mengurangi akurasi dan validitas hasil yang diharapkan.

Sebab itu, maka metode yang dipakai dalam kajian ini adalah metode sebagaimana lazimnya di dalam penelitian pustaka pada umumnya.

H. Subjek dan Situs Kajian

Subjek, sekaligus sebagai objek kajian ini sudah jelas, yakni tentang pariwisata yang berbasis syariah yang bersumber dari ajaran wahyu yang saat ini dikenal dengan istilah destinasi wisata halal. Sebab itu, masalah wisata inilah yang perlu dikonstruks menjadi sebuah bangunan destinasi wisata yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam syariat Islam.

Akan tetapi perlu disadari bahwa kendati masalah pariwisata masuk dalam wilayah kajian muamalah, namun kenyataannya dalam berbagai *maraji'* Islam (*turats*) secara eksplisit belum diajarkan atau disyariatkan masalah kepariwisataan, sebagaimana tentang jual beli, perkawinan, sewa-menyewa, ijarah, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, kiranya kita akan menemukan kesulitan untuk menemukan kajian yang secara spesifik membahas tema (*maudlu'*) yang terkait langsung dengan masalah wisata dari sumber pustaka klasik. Terkecuali yang telah dicoba dikaji oleh pakar kontemporer saat ini demi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dunia wisata halal saat ini.

Dengan demikian destinasi wisata halal dalam perspektif ilmu fikih misalnya, tentu merupakan medan ijtihad yang bisa dilakukan

²³ Ibid

oleh seseorang atau sekelompok mujtahid yang berkompeten untuk memenuhi masalah hukum yang belum ditemukan sebelumnya.²⁴ Selanjutnya dalam kaitan ini dapat dikemukakan pendapat Djazuli²⁵, dalam bukunya Kaidah-Kaidah Fikih, sebagai-berikut:

Secara umum bisa terlihat dan terasa denyut ijtihad dalam menghadapi masalah-masalah komtemporer yang sudah mulai bergerak. Perubahan-perubahan sudah mulai terjadi, dari ijtihad *fardi* (individual) yang dominan kepada ijtihad *jama'i* (kolektif). Kitab-kitab fikih yang merupakan pegangan pokok dalam memutuskan masalah, mulai berubah, menjadikan kitab-kitab fikih sebagai bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan, baik hukum privat (perdata) maupun hukum publik, yang dianggap lebih memiliki kepastian hukum.

Lebih lanjut Djazuli menyatakan :²⁶

Fikih muamalah dan *siyasah maliyah* mulai mengarah kepada sistem ekonomi Islam (*al-ahkam al-iqtishadiyah*), mulai munculnya fatwa-fatwa baru hasil ijtihad terhadap masalah-masalah kontemporer (*al-ijtihad al-mu'ashirah*)

Untuk itu di sinilah urgensinya kajian penelitian ini perlu dilakukan untuk mengeksplorasi berbagai norma ajaran syariah maupun sains dari berbagai sumber yang dianggap relevan. Oleh karena pada dasarnya kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tepatnya kajian pustaka, maka situs kajian ini adalah sumber-sumber pustaka itu sendiri dengan berbagai bentuk dan macamnya. Yang dimaksud dengan sumber-sumber pustaka di sini adalah tidaklah hanya sebatas yang bersumber dari ajaran keislaman semata, namun bisa pula dari sumber lain yang mendukung seperti karya tulis para pakar (wacana-diskursus), peraturan perundangan, hasil seminar atau workshop, hasil penelitian dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai situs kajian.

²⁴ Lihat, H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 33-37

²⁵ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 213

²⁶ Ibid.

I. Sumber dan Analisis

Sebagaimana telah disinggung sebelum ini bahwa sumber data kajian ini adalah bahan-bahan kepustakaan, artikel-artikel yang di dalamnya memuat pemikiran atau ijtihad para pakar yang dianggap relevan. Atau, wacana tentang perkembangan wisata halal terkini. Hal ini disebabkan karena data yang digali adalah masalah norma, terutama yang berkaitan dengan pemikiran (ijtihad) masalah destinasi wisata halal yang perlu dibangun melalui kajian ini. Dengan demikian sumber data kajian ini adalah berupa referensi, dokumen, dan berita terkini, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder.

Di antara hasil ijtihad pakar modern (kontemporer) misalnya, antara lain adalah pemikiran Fahad Salim Bahammam dalam sebuah karyanya yang berjudul *Dalil As-Sa'ih Al-Fiqhi Ahkam Syar'iyah wa Tawdhihat Muhaddadah li As-Sa'ih fi Jami' Al-Majallat*. Karya ini telah diindonesiakan oleh Ganna Pryadarizal Anaedi dan Syifa Annisa dengan tema Panduan Wisata Muslim yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar tahun 2012.²⁷

Karya lain yang patut diapresiasi di tengah keterbatasan referensi seputar wisata halal adalah apa yang ditulis Rajasa Mu'tasim, dan kawan-kawan, yang berjudul "Agama dan Pariwisata Telaah Atas Transformasi Keagamaan Komunitas Muhammadiyah Borobudur." Karya ini menurutnya, selaku penulis utama, adalah merupakan bagian dari penelitian disertasinya saat dia menempuh program doktoral di Universitas Gajah Mada, yang telah diterbitkan FTIK UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, tahun 2013.²⁸

²⁷ Fahad Salim Bahammam, *Dalil As-Sa'ih Al-Fiqhi Ahkam Syar'iyah wa Tawdhihat Muhaddadah li As-Sa'ih fi Jami' Al-Majallat*, ter. Ganna Pryadarizal Anaedi & Syifa Annisa (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012)

²⁸ Rajasa Mu'tasim, *Agama dan Pariwisata Telaah Atas Transformasi Keagamaan Komunitas Muhammadiyah Borobudur* (Yogyakarta: PTIK UIN-Sunan Kalijaga dengan Pustaka Pelajar, 2013), vi

Kedua karya tersebut setidaknya menjadi pengayaan khazanah pemikiran pariwisata yang berdasarkan pada ketentuan syariah di tanah air. Kendati keduanya perlu diakui secara objektif, belum mengkaji masalah pariwisata secara utuh dan komprehensif. Namun demikian, bagaimanapun kedua karya tersebut patut diapresiasi, paling tidak karena sumbangannya terhadap pengembangan akademik dalam bidang kepariwisataan di Indonesia.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sumber data ini memang secara sengaja tidak ditentukan sebelumnya, selama sumber itu dianggap layak dan mengandung bobot ilmiah untuk dijadikan rujukan dan dapat memberikan informasi secara akurat dan dijamin kevaliditasannya. Sebab itu dalam hal pemilihan sumber pustaka dilakukan secara hati-hati dan selektif oleh pengkaji sendiri antara lain sebagaimana tergambar dalam rujukan pustaka yang digunakan.

Namun demikian perlu diketahui, oleh karena sementara ini sumber pustaka tentang pariwisata halal masih sangat terbatas sekali, maka dengan demikian kajian ini banyak menggali dari sumber pustaka konvensional. Selain dari berbagai wacana dari berbagai jurnal hasil penelitian dan isu-isu perkembangan industri pariwisata halal yang saat ini banyak dipublikasikan di dalam berbagai media, terutama media cetak.

Untuk selanjutnya data itu dideskripsikan dan dikaji secara mendalam dengan menggunakan daya kritis agar dapat ditangkap substansi yang paling esensial dari setiap sumber yang diperoleh. Dari hasil kajian ini diharapkan lahir pemikiran baru untuk mengkonstruks sebuah bangunan keilmuan tentang pariwisata halal. Selain juga dapat dijadikan norma pengembangan industri halal di Indonesia, khususnya dalam bidang kepariwisataan yang berbasis syariah.



Bagian Kedua

Kajian Pustaka

Kajian Teoritis-Normatif



Bab II

Kajian Teoritis-Normatif

A. Pengertian: Gambaran Umum

Dalam dunia pariwisata, banyak istilah yang secara akademik perlu dikemukakan dalam kajian pustaka ini, yakni pariwisata, wisata, dan destinasi. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini muncul istilah pariwisata syariah, wisata syariah, dan destinasi wisata syariah. Namun demikian, kata syariah di belakang beberapa istilah tersebut dalam realitas seringkali menggunakan istilah “halal”, karena sejatinya dalam Islam, istilah halal ini merupakan bagian dari esensi ajaran syariat dalam Islam. Sebab itu, yang dimaksud dengan istilah wisata halal misalnya, adalah kegiatan wisata yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kata destinasi berasal dari bahasa Inggris “destination” yang berarti tempat tujuan,

maksud.¹ Pengertian destinasi itu sendiri dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh setiap orang.² Destinasi dapat berupa tujuan akhir dari sebuah perjalanan, tujuan akhir dari sebuah pekerjaan, atau pun mengacu pada penunjukan sebuah lokasi tertentu.³ Bahkan destinasi juga dapat dipahami sebagai wilayah dalam batasan otoritas suatu negara, seperti Indonesia, fungsi kawasan seperti kawasan industri, atau kawasan perkotaan seperti Jabodetabek, atau pun batasan fisik lainnya seperti Danau Toba.⁴ Selain itu, destinasi juga dapat dilihat dalam batasan sosial budaya, wilayah suatu peradaban,⁵ dan lain sebagainya.

Sedangkan kata wisata berarti darma wisata atau pariwisata.⁶ Pendapat lain menyatakan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.⁷ Pengertian ini nampaknya sama sebangun dengan yang dirumuskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.⁸

Selanjutnya, pariwisata, didefinisikan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁹ Jika dikaitkan dengan kata syariah, maka yang dimaksud pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip

¹ John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1990), 178

² Henky Hermantoro, *Creative-Based Tourism Dari Wisata Rekreatif Menuju Wisata Kreatif* (Depok: Penerbit Aditri, 2011), 77

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 1151

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

⁸ Selengkapnya, lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kapariwisata

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

syariah.¹⁰ Dengan demikian, wisata merupakan bagian dari kegiatan dunia pariwisata secara umum.

Menurut Oka A Yoeti, kata “pariwisata,” sinonim dengan pengertian “tour.” Kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu kata “pari” dan “wisata.” “Pari,” berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan “wisata,” berarti perjalanan, bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “travel” dalam bahasa Inggris.¹¹

Dengan demikian kata “pariwisata,” seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan “tour.”¹² Sedangkan dalam pengertian jamak, kata “kepariwisataan” dapat digunakan kata “tourismen” atau “tourism.”¹³

Selain itu menurut perundangan kepariwisataan, “Pariwisata” dirumuskan “sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.”¹⁴ Rumusan ini jelas lebih komprehensif yang pada dasarnya bahwa aktivitas kepariwisataan meliputi berbagai macam kegiatan wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan yang dilengkapi dengan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan dalam melayani kepentingan mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa kegiatan wisata

¹⁰ Ibid.

¹¹ Dalam Masyhuri Machfudz, *Analisis Pasar Pariwisata* (Malang: tp, 2007), 2-6 Selanjutnya, dalam naskah buku ini yang diadopsi dari buku Oka A Yoeti yang berjudul “Pengantar Pariwisata” (1987) dan “Komersialisasi Seni Budaya dalam Pariwisata” (1983) dipaparkan Jenis dan Macam-Macam Pariwisata. A. Menurut letak geografis: *local tourism*, *regional tourism*, *national tourism*, *regional-international tourism*, dan *international tourism*. B. Menurut pengaruhnya terhadap Neraca Pembayaran: *In tourism* (pariwisata aktif) dan *out going tourism* (pariwisata pasif). C. Menurut alasan/tujuan perjalanan: *business tourism*, *vocational tourism*, dan *educational tourism*. D. Menurut waktu berkunjung: *seasonal tourism* dan *occasional tourism*. Menurut objeknya: *cultural tourism*, *recuperational tourism*, *commercial tourism*, *sport tourism*, *political tourism*, *social tourism*, dan *religion tourism*

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

itu perlu adanya keterlibatan masyarakat dan pengusaha maupun pemerintah, baik pusat atau daerah.

Untuk itu apabila kata “destinasi” dipadukan dengan kata “pariwisata, yakni destinasi pariwisata yang secara sederhana menurut Jafari “...the place where tourist intend to spend their time away from home.”¹⁵ Yakni tempat di mana wisatawan singgah dan ia menyempatkan diri untuk tinggal sementara.

Adapun kata halal, adalah kata yang sudah sedemikian akrab dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat Indonesia sebagai lawan dari kata haram dalam ajaran (syariat) Islam. Sebab itu dalam Islam ilmu tentang *Halal wal Haram (Ilmu Syariah wal Ahkam)* merupakan salah satu nama lain Ilmu Fiqh.¹⁶

Term halal menurut Qardhawi didefinisikan sebagai “That which is permitted, with respect to which no restriction exists, and the doing of which the law-giver, Allah, is allowed.”¹⁷ Sebab itu term halal mempunyai arti “permissible” menurut ajaran Islam. Selain itu halal juga diartikan juga sebagai “one of human action (*al-ahkam al-khamsah*) that categorizes the morality of human action in Islam, others being Fard (*compulsory*), Mustahab (*recommended*), Makruh (*dislike*), and Haram (*forbidden*).¹⁸

Dalam kitab-kitab fikih (klasik maupun kontemporer), istilah halal mengandung makna sah untuk dilakukan secara syariat. Sebaliknya, istilah haram mengandung arti dilarang untuk dilakukan, bahkan jika dilanggar maka subjek pelakunya akan mendapat hukuman (*punishment*), tidak saja di dunia namun juga di akhirat kelak di kemudian hari. Dengan demikian, kedua istilah tersebut ada di kedua kutub ekstrim yang saling berseberangan, di mana yang satu boleh (sah) dikerjakan oleh siapa pun dan subjek

¹⁵ Dalam Henky Hermantoro, *Creative Based Tourism*, 78

¹⁶ H.Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 29

¹⁷ Mohamed Battour dan Mohd Nazari Ismail, “Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges and Future” (2005), <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>, 2

¹⁸ Ibid., 2

pelakunya akan mendapat pahala jika niat (motif-intensinya) sesuai dengan yang disyariatkan.

Sebaliknya untuk perbuatan haram yang sudah jelas dilarang untuk dikerjakan, sehingga siapa pun yang melanggar akan mendapat hukuman yang setimpal. Sebab itu dalam Islam sudah jelas beda antarkeduanya, tidak sebagaimana dalam istilah syubhat, yang masih tidak jelas (rancu) kehalalannya, karena status hukumnya berada di antara haram dan halal.

Dengan demikian, apabila istilah halal itu disandingkan dengan istilah destinasi dan wisata, maka akan mengandung makna bahwa wisata halal adalah tujuan wisata yang baik dilakukan dan dijadikan pilihan menurut perspektif syariah karena di dalam atmosfer wisata ini diupayakan terhindar dari kontaminasi apa pun saja yang mengharamkan (Mansouri, 2014: 20). Karena itu wisata halal yang seringkali disebut pula dengan istilah wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan Destinasi Wisata Halal (baca: syariah) adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih dari wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁰

Sebab itu, sejalan dengan perkembangan zaman, bersamaan dengan semakin tingginya tingkat kesadaran religiositas masyarakat, baik lokal maupun global, maka pada akhirnya akhir-akhir ini wisata halal semakin diminati sehingga menjadi destinasi baru di belantara kepariwisataan dunia.²¹

Namun demikian perlu dikemukakan bahwasanya penggunaan istilah-istilah tersebut banyak ditemui di berbagai kajiannya secara

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, N0.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

²⁰ Ibid

²¹ Sureerat Chookaew, et al, "Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country, " *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3 No. July 2015

proporsional sesuai dengan kebutuhan atau konteksnya. Kendati pada hakikatnya, penggunaan kata “halal” dan “syariah” secara substantif adalah sama. Tetapi nampaknya, kata halal lebih banyak digunakan dalam tataran praksis-aplikatif dalam dunia industri pariwisata, sedangkan penggunaan kata syariah lebih mengarah pada penggunaan dalam tataran akademik

B. Pariwisata: Antara Konvensional dan Syariah

Selain itu predikat halal yang melekat pada istilah wisata akan mengandung konsekuensi yang berbeda dengan wisata konvensional yang sekularistik yang selama ini telah sedemikian maju dan banyak dilakukan di berbagai belahan dunia, tanpa kecuali di Indonesia sendiri yang dikenal sebagai negeri Muslim terbesar di dunia. Tentu saja dari aspek karakteristik, wisata halal jelas berbeda dengan wisata sekularistik yang samasekali memisahkan antara aspek keduniawian yang profan dengan aspek keukhrawian yang transenden. Bagi penganut paham konvensional, masalah wisata adalah semata-mata urusan duniawi yang tidak perlu disentuh, apalagi dipandu dengan ajaran syariat yang bersumber dari wahyu, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Kerena itu dalam praktiknya, wisata konvensional yang sekuler berjalan dalam panduan sains yang bersumber dari hasil imajinasi (renungan) akal manusia semata, sehingga dalam kenyataannya tidak jarang banyak yang kontra produksi dengan ajaran syariat dalam Islam.

Atau dengan kata lain, oleh karena wisata sekuler itu lahir, selanjutnya tumbuh dan berkembang sesuai panduan sains, pada akhirnya muncul perilaku dari para pelaku, dalam banyak hal, semata-mata untuk mengejar keuntungan (profit) yang materialistik. Demikian pula bagi para wisatawan yang maindsetnya telah terkomintanisasi filosofi wisata sekuler, mereka melakukan wisata hanyalah untuk mencari kepuasan diri secara lahir semata. Padahal sejatinya perjalanan wisata itu, menurut ajaran Islam, tidak lepas

dari motivasi (intensi) yang bersangkutan. Jika intensinya untuk *tadabbur* alam semesta sebagai ciptaan Tuhan,²² maka bukanlah tidak mungkin perjalanan wisata mereka akan mempunyai nilai ganda, yakni untuk *refreshing* dan bersenang-senang, sekaligus mempunyai nilai ibadah. Inilah yang dimaksud bahwa ciri utama wisata halal yang tidak terpisahkan antara nilai keduniawian dan keukhrawian sekaligus.

Karena itu, sebagai konsekuensi dari perbedaan pijakan filosofi itu, pada akhirnya akan melahirkan karakteristik yang berbeda pula antara yang satu dengan yang lain. Khusus untuk wisata sekuler, secara gamblang dan kasat mata (*tangible*) dapat kita cermati dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dari aspek objek (tujuan-destinasi) misalnya, selama ini tempat-tempat wisata belum menyediakan fasilitas yang utuh atau maksimal. Katakan saja yang berkaitan dengan sarana ibadah, tidaklah semua destinasi menyediakan mushalla (apalagi masjid). Kendati telah tersedia, tidaklah sedikit yang sangat kurang memadai, sehingga terjadi kesenjangan performa fasilitas antara objek wisatanya yang sedemikian megah (spektakuler) dengan performa sarana ibadahnya yang tidak jarang sangat memprihatinkan²³
2. Dari aspek sarana akomodasi, katakan saja hotel, guest house, villa, rumah singgah, dan sebagainya, belum sepenuhnya memberlakukan kelainan muhrim sehingga bisa jadi tanpa surat nikah pun mereka bebas tidur sekamar dengan rasa aman. Terlebih lagi jika sekiranya secara sengaja menyiapkan wanita panggilan bagi pengunjung hidung belang.²⁴
3. Adanya spa dan kafe yang menyediakan minuman yang memabukkan sampai dewasa ini masih lekat dengan tempat menginap para pengunjung wisata di berbagai destinasi. Karena

²² Baca, QS. Ali 'Imran:3:190-191; An-Nahl, 16:65-83; Adz-Dzariyat, 51:20-21

²³ Bandingkan dengan Chookaew, et al, *Increasing Halal Tourism*, 739-740

²⁴ Ibid., 739

jika tidak tersedia minuman keras dengan segala macamnya, hotel sebagai tempat menginap (beristirahat) mereka dianggap kurang modern dan bahkan dianggap ketinggalan zaman. Ini menunjukkan ketersediaan spa dan kafe lengkap dengan berbagai macam minuman yang memabukkan, saat ini seakan-akan dianggap sebagai ikon kemodernan dan daya tarik oleh sebagian masyarakat pengunjung wisata.²⁵

4. Dalam kaitan dengan masalah kuliner seperti ketersediaan fasilitas rumah makan (restoran), belum sepenuhnya menunjukkan keterbukaan (*fairness*) kepada pembeli yang datang. Indikator ketidakterbukaan (*unfairness*) antara lain terlihat dari belum banyak restoran yang memasang tarif setiap menu yang disediakan. Nampaknya ketidakjujuran ini tidak hanya terjadi dari kalangan rumah makan skala menengah atau papan atas dalam bentuk restoran, namun banyak terjadi pula dari kalangan pedagang kecil (kaki lima), sehingga tidak jarang banyak pengunjung yang kecewa karena merasa dirugikan secara materi.
5. Masalah lain yang tidak kalah krusialnya, adalah penerapan sertifikasi halal yang menjadi salah satu indikasi bahwa semua produk dalam bentuk makanan, minuman, kosmetika dan lain sebagainya belum nampak terimplementasi untuk meyakinkan pengunjung bahwa apa yang mereka konsumsi benar-benar halal secara syar'i.
6. Demikian pula dalam kaitan dengan sektor pendukung lainnya, seperti biro perjalanan (*travel*), transportasi maupun pemandu wisata apakah mereka benar-benar telah menunjukkan kejujuran dan keterbukaan yang tidak berpotensi merugikan pengunjung secara finansial.
7. Masalah sumber daya manusia tidak kalah krusialnya dalam menunjang suksesnya pengembangan wisata, di manapun

²⁵ Bandingkan dengan Ibid.,739 dan Shirzad Mansouri, "Role of Halal Tourism Ideology in Destination Competitiveness: A Study on Selected Hotels in Bangkok, Thailand," "International Conference on Law, Education and Humanities (ICLEH'14) Jan. 30-31, 2014 Pattaya (Thailand)

dan kapanpun saja, baik dalam level pelaksana, penguasa, maupun masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat di sini dimaksudkan adalah penduduk lokal, agar mereka mampu menempatkan diri sebagai warga yang mampu turut memelihara keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan yang tidak jarang justru merekalah yang tidak jarang menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

8. Faktor kebersihan bukanlah tidak mungkin dan tidak jarang seringkali menjadikan suasana destinasi wisata yang kurang nyaman yang tidak jarang pula banyak ditemukan di berbagai daerah wisata, mulai dari destinasi yang telah dikenal luas, terlebih lagi bagi yang belum dikenal. Padahal sejatinya, masalah kebersihan atau memelihara ekosistem sangatlah ditekankan di dalam Islam.

Itulah beberapa karakteristik yang menjadi pembeda antara pariwisata konvensional dengan pariwisata halal yang bersumber dari ajaran syariah.

C. Sandaran Normatif dan Sumber Daya Manusia

Untuk selanjutnya apa saja sandaran normatif yang dapat dijadikan sandaran yuridis pelaksanaan dan pengembangannya, baik secara syar'i maupun menurut perundangan nasional yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya apa saja karakteristik wisata halal yang spesifik yang membedakan dengan wisata konvensional, objek atau destinasi, beserta berbagai daya dukung yang menjadi keniscayaan keberadaannya. Demikian pula dalam masalah sumber daya manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai penguasa, pengusaha, para ulama dan masyarakat umum secara keseluruhan dengan segala strata sosialnya.²⁶

²⁶ Dalam kaitan sumber daya manusia ini, lihat dan bandingkan dengan, Rahmat Fajar, "Memanfaatkan Potensi Besar Pariwisata Halal," dalam *Republika*, edisi 24 Agustus 2017, 24.

Adapun landasan normatif, tentu saja yang paling utama adalah al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi sumber utama ekonomi Islam. Bukanlah masalah wisata adalah bagian dari masalah muamalah yang mengajarkan bagaimanakah hubungan antarmanusia dalam melakukan segala aktivitas di dalam kehidupan di dunia ini. Selain juga norma perundangan nasional seperti Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pariwisata (UU No. 10 Tahun 1999), tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), tentang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014), hukum (fikih), pendapat para pakar ekonomi syariah, ajaran maqadis syariah dan kearifan lokal.

Masalah hukum Islam (fikih) perlu dikedepankan karena bagaimanapun aktivitas wisata tidak steril dari masalah yang boleh dilakukan (halal) dan tidak boleh dilakukan (terlarang-haram), baik oleh pihak penguasa selaku pemangku kebijakan maupun oleh para pelaku yang secara langsung sebagai pelaksana di lapangan. Tetapi di sisi lain, bagaimana pun perundangan nasional perlu pula dikedepankan yang pada prinsipnya ingin memperkuat bagaimanakah sejatinya posisi destinasi wisata halal wisata di tanah air karena masih ada payung hukum yang menjadi sandaran yuridisnya. Dengan demikian kepastian hukum dalam kaitan dengan masalah kepariwisataan akan lebih terjamin kendati perundang-undangan yang secara khusus mengatur wisata halal belum lahir.

Demikian pula dalam kaitan dengan masalah etika, sangatlah krusial sekali untuk dikedepankan, karena sebagaimana peran hukum, peran etika sangatlah signifikan sekali untuk memandu seluruh aktivitas wisata yang berbasiskan syariat Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Dawr Qiyam wal al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy* (1995).

Maqashidus syariah kiranya perlu pula dijadikan alat untuk mengkonstruks bagaimana sejatinya membangun wisata halal ke depan yang lebih baik dan prospektif.²⁷ Bukankah tujuan berwisata

²⁷ Baca dan bandingkan dengan, Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqashid Syariah* (London: IIIT, 2008), Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid

bagi wisatawan pada hakikatnya antara lain adalah untuk bersenang-senang, selain juga untuk ibadah (*ghairu mahdhab*). Tentu saja hal itu tergantung kepada niat melakukannya. Karena itu bagaimanapun melindungi kepentingan wisatawan dalam kapasitasnya sebagai konsumen perlu dilakukan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan agamanya (*dien*). Selain keselamatan jiwanya (*nafs*), keselamatan akal nya (*'aql*), keberlanjutan keturunannya (*nasl*) dan keselamatan harta bendanya (*maal*).

Demikian pula dalam kaitan dengan masalah sumber daya manusia dalam fungsinya sebagai khalifatullah, tidaklah sedikit peran yang dimainkan di muka bumi ini.²⁸ Antara lain sebagai subjek pelaku dalam aktivitas wisata dalam arti luas, sehingga dengan demikian, dalam memainkan perannya, mereka harus mengedepankan nilai-nilai hukum dan etika yang berlaku.²⁹ Dalam arti, proaktif memberikan perlindungan kepada komunitas wisata sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen,³⁰ sebagaimana yang diajarkan di dalam konsep dasar *maqashidus syariah* di dalam Islam.³¹

Selain itu norma dan potensi kearifan lokal perlu pula digali untuk mendukung pengembangan industri wisata halal di tanah air agar lebih berdaya saing di tengah persaingan global. Bukankah dalam kearifan lokal itu ada keunikan yang banyak menyimpan daya tarik dan pesona bagi para wisatawan.

Dengan berbagai sandaran teori dan norma yang bersumber dari ajaran Islam itu nantinya diharapkan akan diperoleh profil

I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah* (Doha: Kementerian Wakaf dan Bidang Keislaman Daulah Qatar, 2004)

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy* (Kairo-Mishr; Maktabah Wahbah, 1995), 39-46, Muhammad Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Globalisasi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 85-109

²⁹ Qardhawi, *Dawr al-Qiyam*, 57-64, Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi*, 196-201

³⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), 409-437

³¹ Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi*, 26-30

pengembangan industri wisata halal yang lebih holistik dan komprehensif sesuai dengan yang diidealkan. Bukankah masalah wisata halal dalam pengembangannya butuh berbagai disiplin ilmu pendukung, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun sains. Perlunya kehadiran nilai agama, dalam hal ini Islam, sebagai konsekuensi dari predikat kata ‘halal,’ di belakang kata wisata, sedangkan sains diharapkan sebagai pisau analisis yang lahir dari berbagai pemikiran pakar yang berkompeten yang telah banyak melakukan penelitian dan kajian-kajian akademik. Karena itu di sinilah arti penting perlu adanya dialog antara nilai-nilai keislaman dengan teori-teori sains yang relevan. Dengan harapan nantinya dapat dihasilkan sebuah wacana pengembangan wisata yang bernuansa syariat (religi) maupun ilmu pengetahuan modern (sains).

D. Posisi dan Fungsi Pariwisata Halal di Era Modern

1. Pariwisata: Antara Kebutuhan dan Dampak Ekonomi

Dunia pariwisata sudah pasti akrab dengan aktivitas bersenang-senang, seakan-akan tak ada tujuan atau tanpa produktivitas sebagai prestasi bagi siapa pun yang melakukannya. Memang benar adanya, jika aktivitas berwisata dikatakan demikian, kendati sejatinya di balik itu banyak hikmah atau manfaat yang dapat dipetik, baik bagi orang yang melakukan maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sebab itu bertolak dari manfaat itulah tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaan pariwisata sangatlah urgen dalam kehidupan ini. Bahkan, tidaklah salah jika dikatakan pariwisata juga merupakan kebutuhan bagi banyak pihak, terutama di era modern saat ini sehingga perlu dikelola secara profesional.

Dengan melakukan wisata, pikiran seseorang bisa menjadi *fresh* kembali, sehingga dengan demikian pariwisata dikenal pula dengan dunia rekreasi. Dengan berwisata bisa jadi seseorang, yang sebelumnya merasa kalut pikirannya akibat banyak problem dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, pada akhirnya ia akan

merasa berenergi (segar) kembali dan lebih produktif.³² Bahkan lebih jauh lagi, ia akan lebih terbuka wawasannya, sehingga di kemudian hari ia akan lebih kreatif dan lebih banyak melahirkan inovasi baru di bidang profesi masing-masing yang selama ini ditekuninya.³³

Hal yang demikian itu bisa terjadi karena seseorang dengan melakukan wisata akan banyak melihat, mendengar, merasakan, dan bahkan berinteraksi dengan sesama wisatawan sehingga akan menambah pengalaman baru. Pada akhirnya dari pengalaman inilah yang akan melahirkan pengetahuan baru ke depan yang lebih luas yang mungkin belum pernah dialami sebelumnya oleh seseorang.

Demikian pula bagi penduduk setempat, terutama yang mempunyai naluri bisnis, dengan adanya pengembangan pariwisata akan membuka peluang bisnis baru yang dapat dikembangkan dengan menggali potensi setempat yang selama ini belum banyak dilakukan. Di antaranya adalah *home stay*, yakni semacam rumah singgah yang dapat disulap sebagai tempat penginapan wisatawan yang berkunjung ke arena wisata perdesaan yang tengah dikembangkan di sebuah daerah. Atau memacu kreativitas baru dalam bidang industri dan kuliner yang beraroma lokal yang tidak ditemukan di daerah lain. Bahkan tidaklah mustahil, bisa jadi sebagian penduduk setempat berkesempatan sebagai *guide* yang akan menjadi sumber pendapatan baru bagi mereka.

Dan dengan adanya berbagai ladang bisnis atau pekerjaan baru bagi masyarakat setempat itulah pada akhirnya akan menimbulkan kesejahteraan baru bagi mereka. Akibatnya, daya beli masyarakat akan semakin meningkat yang pada akhirnya berujung pada kemajuan sektor riil. Kesemuanya ini bukanlah tidak mungkin akan berdampak secara lebih signifikan terhadap kekuatan ekonomi

³² Dalam kaitan ini, silakan baca, Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, ter. Didin Hafidhuddin, dkk. (Jakarta: Robbani Press, 1997), 166. Dalam buku ini Qardhawi menguraikan bagaimana pengaruh ketenangan jiwa terhadap produktifitas.

³³ Dalam kaitan ini, lihat dan bandingkan dengan Hermantoro, *Creative –Based Tourism*, 53-54. Dalam buku ini dinyatakan bagaimana motivasi untuk melakukan suatu perjalanan, "...the global integrating network of biological and cultural forces which gives value and direction to travel choices, behaviour and experience."

pemerintah setempat karena *income* per kapita dan kreativitas masyarakatnya yang semakin meningkat.³⁴

Kiranya ke depan pengembangan pariwisata itu semakin diharapkan, terutama oleh masyarakat urban yang sangat butuh untuk relaksasi dan suasana hiburan secara psikis untuk mengalihkan kesibukan dan suasana kerja yang melelahkan di tempat kerja mereka masing-masing. Oleh sebab itu dengan alasan ini, bagaimanapun dunia pariwisata di era modern ini jelas merupakan fenomena baru yang tidak akan pernah surut dan mati. Bahkan akan terus mengalami perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat global yang semakin meningkat. Sebab itu sangatlah wajar sekali, jika saat ini semakin banyak destinasi wisata baru di berbagai tempat di era global ini.

Tanpa kecuali di Indonesia sendiri yang saat ini, dalam kenyataan, semakin banyak dihuni oleh masyarakat kelas menengah baru yang akan melahirkan *lifestyle* yang baru pula. Karena itu sebagaimana masyarakat di negara-negara modern di berbagai belahan dunia ini telah menjadi tradisi bagi mereka yang sengaja mengagendakan waktu untuk berwisata bersama keluarga ke berbagai destinasi wisata di luar negeri dengan *budget* (anggaran) yang disiapkan pula. Dengan demikian, berwisata bagi mereka benar-benar menjadi kebutuhan yang perlu direncanakan dalam hidup.

Fenomena inilah yang sejatinya perlu terus diikuti perkembangannya, untuk terus memacu pengembangan industri wisata di Indonesia yang sedemikian banyak potensi dan variannya. Nampaknya upaya ini telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata secara progresif dan berkelanjutan dengan harapan agar ke depan jumlah wisatawan asing akan semakin meningkat jumlahnya. Pada akhirnya melalui pengembangan industri pariwisata ini *income* negara akan semakin meningkat pula. Inilah sejatinya di antara

³⁴ Dalam hal ini lihat kembali, Ibid., 87-93. Di dalamnya dikaji bagaimana pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan sub tema “Dari Pertumbuhan ke Pemerataan.”

industri prospektif yang perlu digarap secara sungguh-sungguh dan profesional.

2. Pariwisata Halal: Butuh Inovasi dan Kreasi Baru

Sebagaimana telah disinggung sebelum ini bahwasanya industri pariwisata merupakan bagian dari fenomena modern yang tidak akan pernah surut dan mati, sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat global, kini dan akan datang. Karena itu bertolak dari fenomena itu sangatlah wajar jika sampai saat ini wisata konvensional terus mengalami perkembangan yang menakjubkan di berbagai negara dengan berbagai destinasinya. Apakah wisata yang berbasis alam, sejarah, budaya, teknologi, dan lain sebagainya.

Pengembangan pariwisata itu dengan sendirinya telah menyedot banyak wisatawan lokal maupun asing dari berbagai negara di mana destinasi wisata itu berada. Katakan saja Pulau Dewata Bali yang telah mendunia kesohorannya. Bahkan karena kesohorannya inilah tidak jarang sebagian masyarakat dunia lebih mengenal Pulau Bali daripada negara Indonesia sendiri. Itulah Bali yang menjadi ikon wisata Indonesia dengan beragam potensi yang dimilikinya. Baik keindahan alamnya, keunikan dan kekayaan budayanya, kekayaan ekonomi kreatifnya, dan lain sebagainya,³⁵ sehingga tidaklah salah jika Raja Salman dari Kerajaan Saudi Arabia betah berlibur di pulau ini di awal tahun 2017. Sang raja berdecak kagum yang menurut rencana tinggal di sana hanya sembilan hari, namun akhirnya diperpanjang menjadi 13 hari.

Namun demikian perlu disadari bahwasanya Bali selama ini memang dikenal sebagai destinasi wisata konvensional sebagaimana destinasi wisata kesohor lainnya di dunia. Artinya, selama ini wisata Bali berkembang secara natural yang masih terpisah dari sentuhan religiositas sebagaimana konsep destinasi wisata halal

³⁵ Lebih jauh dalam kaitan dengan sub topik “butuh inovasi dan kreasi baru,” ini, lihat kembali Ibid. Selain itu juga saat ini dalam praktik, telah banyak dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia, seperti Pemerintah NTB, Banyuwangi, Jember, dan lainnya untuk menyedot para wisatawan datang berkunjung ke daerah masing-masing.

yang berbasiskan prinsip syariat. Untuk itu, nampaknya untuk memberikan solusi dan alternatif bagi wisatawan Muslim telah digarap wisata halal oleh pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Mataram (Pulau Lombok).

Lombok yang dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid ini secara progresif sedang mengembangkan destinasi wisata halal tingkat dunia agar tidak kalah dengan berbagai negara di Asia yang saat ini juga secara profesional memacu destinasi wisata halal yang sama. Mereka adalah Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Malaysia. Mereka sadar dan meyakini bahwasanya industri wisata halal ke depan secara ekonomi sangatlah prospektif sekali. Justru karena itu mereka saling bersaing untuk merebut peluang di era global ini.

Mereka pun juga sadar bahwasanya membangun industri wisata halal adalah masalah bisnis, bukanlah masalah keyakinan, sehingga apa pun yang menguntungkan secara ekonomi perlu ditekuni dan digarap secara sungguh-sungguh agar mampu bersaing dengan negara lain di dunia. Tentu saja hal ini, bagi Indonesia sebagai negeri penduduk Muslim terbesar di dunia, merupakan pemicu atau motivasi agar mampu bersaing dengan mereka yang sekuler. Kecuali Malaysia sesama rumpun Melayu yang juga banyak dihuni oleh komunitas Muslim sebagaimana Indonesia.

Mampukah Indonesia memanfaatkan peluang, sekaligus menghadapi tantangan di pentas global yang kian kompetitif ini? Inilah sejatinya pertanyaan yang perlu dijawab oleh pemerintah Indonesia, sekarang dan akan datang. Tetapi dalam kenyataan, dalam menangkap *trend* global itu tidak harus selalu datang dari pemerintah pusat (*top down*), bahkan bisa jadi dari pemerintah daerah (*bottom up*) yang merasa memiliki potensi untuk dijual. Sebagaimana inisiatif itu muncul dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid sebagai ikon eksklusif bagi daerah ini yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke sana.

Bukankah kata “Masjid” itu merupakan sebuah simbol atau *term* dalam ajaran Islam yang sedemikian lekat di hati umat Islam. Masjid adalah tempat sujud atau infrastruktur penghambaan diri seorang hamba (Muslim) kepada Sang Khalik, yakni Allah swt yang harus disiapkan di setiap kawasan destinasi wisata halal. Nampaknya pemerintah NTB, dengan segala potensinya di bawah kepemimpinan TGB H. Zainul Majdi, sangat cerdas memanfaatkan peluang itu dengan program prestisiusnya mengembangkan kawasan Mandalika berskala internasional. Semacam destinasi wisata halal yang diharapkan mampu menandingi destinasi sejenis yang telah lama dikembangkan di berbagai negeri Muslim, seperti Mesir, Turki, Yordania, Emirat Arab, dan lain-lainnya.

Obsesi menjadikan Lombok sebagai kawasan wisata halal tingkat dunia banyak ide yang dilakukan pemerintah ini sesuai momennya. Antara lain program Pesona Khazanah Ramadhan (PKR), yang menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa bulan suci Ramadhan tidaklah identik dengan kepasifan atau mengendorkan semangat untuk beraktivitas. Namun, sebaliknya, perlu ditunjukkan bahwa bulan yang penuh rahmat, barakah, dan maghfirah itu justru perlu diisi dengan berbagai aktivitas yang bernuansa ibadah kepada Tuhan. Bukankah Islam adalah agama kerja, namun yang bermakna bagi kehidupan.

Agaknya, inilah salah satu pertimbangan filosofi sang gubernur untuk menciptakan PKR yang dianggap sebagai kreativitas unik dalam dunia wisata sehingga ke depan diharapkan akan menambah nilai jual Pulau Lombok sebagai pusat destinasi wisata halal yang patut dikunjungi dan diperhitungkan. Dan dengan lahirnya banyak kreativitas dan inovasi baru inilah sangatlah logis sekali jika provinsi ini patut menjadi model, sekaligus banyak memberi inspirasi baru pada daerah-daerah lain di Nusantara. Terutama setelah Lombok mendapatkan apresiasi di tingkat dunia dengan berbagai penghargaan internasional yang diraihnya. Daerah-daerah lain dimaksud antara lain adalah Sumatera Barat dan Aceh Darussalam yang keduanya dikenal pula sebagai kawasan yang punya banyak potensi wisata halal di Indonesia.

Sejatinya apa yang dilakukan oleh Provinsi Seribu Masjid tersebut tidak lepas karena kejeliannya dalam membaca tanda-tanda zaman, yakni lahirnya fenomena baru di tingkat global yang berupa destinasi wisata halal, sebagai sebuah bagian dari perkembangan pariwisata di berbagai belahan negara di dunia. Nampaknya, destinasi wisata halal saat ini dan bahkan jauh ke depan, akan menjadi *trending* dan *branding* baru di dunia pariwisata, terutama oleh wisatawan Muslim. Sebagai alternatif dalam memilih destinasi, yang selama ini dianggap lepas sama sekali dari prinsip-prinsip syariah yang sejatinya menjadi kewajiban bagi setiap Muslim.

Tentunya banyak hal yang menjadi pemicu perkembangan destinasi wisata halal di era global saat ini maupun yang akan datang. Pertama, ada kecenderungan masyarakat wisatawan sudah mulai jenuh dengan destinasi wisata sekuler sehingga mereka berharap ada atraksi yang baru. Kedua, semakin banyaknya jumlah populasi Muslim di tingkat global, terutama di negara-negara Barat setelah peristiwa WTC di Amerika Serikat tahun 2001. Selanjutnya yang ketiga, mulai adanya kesadaran masyarakat untuk menjalankan ajaran agama yang menjadi keyakinannya, dalam hal ini adalah syariat Islam.

Dalam bidang muamalah misalnya, implementasi ajaran ini terlihat pada semakin berkembangnya perbankan syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah dan lain-lainnya yang mendahului pengembangan destinasi wisata halal yang terjadi saat ini. Dengan demikian destinasi wisata halal, sejatinya merupakan rangkaiian dari perkembangan ekonomi syariah yang semakin marak yang pada dasarnya bukan lagi sebagai alternatif, namun sebagai solusi dari kelemahan sistem ekonomi sekuler (konvensional) yang mengglobal selama ini.

Dilihat dari aspek syariah, praktik wisata sekuler yang menguasai pasar saat ini, tentu tidak sedikit yang kontra produksi dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagai ilustrasi, dalam melakukan wisata, bagaimanapun seorang Muslim tidak boleh meninggalkan shalat

yang menjadi kewajibannya. Pertanyaannya, apakah infrastruktur untuk ibadah ini sudah tersedia secara memadai, baik dari aspek tempat, kebersihan, kesucian, ketercukupan air bersih (suci) dan lain sebagainya. Demikian pula dalam kaitan dengan sarana perjalanan (travel), apakah pihak perusahaan telah memprogram agar setiap masuk waktu shalat memberikan kempatan kepada penumpang untuk menunaikan kewajibannya selama dalam perjalanan.

Demikian pula berkaitan dengan tempat penginapan, hotel dan sejenisnya, apakah telah menyiapkan parangkat ibadah sebagaimana mestinya, menyediakan makanan halal, bebas dari berbagai jenis minuman yang memabukkan, dan lain sebagainya. Samahalnya dengan setiap rumah makan, apakah mereka telah bersertifikat halal dan mencantumkan harga setiap menu yang disajikan. Selain itu apa para *guide* telah menunjukkan pelayanan dengan sikap *friendly* dengan menunjukkan perilaku yang syar'i.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah apakah masyarakat secara keseluruhan telah benar-benar mendukung program wisata halal yang dikembangkan di daerah mereka. Bentuk dukungan itu antara lain turut memelihara keamanan dan kenyamanan setiap pengunjung, baik jiwa maupun hartanya. Tidak cukup hanya mengekspresikan sapa, salam, dan senyum yang semu yang tidak sesuai dengan inti filosofi *Moslem Friendly Tourism*.

Atmosfer inilah sejatinya yang sangat diharapkan oleh para wisatawan Muslim dalam memilih destinasi wisata halal sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan mereka di era modern ini. Di satu sisi kebutuhannya berwisata terpenuhi, namun di sisi lain kewajibannya menjalankan ajaran agamanya tetap terpenuhi. Selain melakukan wisata halal, mereka dapat pula menarik hikmah dengan melakukan *tadabbur* atas atraksi atau objek yang dikunjungi yang sejatinya dapat mempertebal rasa iman dan semakin banyak bersyukur kepada Tuhan.

E. Sandaran Yuridis dan Etis

1. Sandaran Syar'i: Butuh Kepastian Hukum Secara Syariat

Pertanyaan mendasar dalam kaitan dengan sub tema ini adalah apakah ada dasar hukum syar'inya di dalam Islam yang memfokus langsung pada masalah wisata? Jawabnya adalah jika dicermati secara saksama, secara terminologis, nampaknya belum ditemukan di dalam khazanah keilmuan Islam (*maraji'* klasik). Jika ada, kiranya yang demikian itu adalah merupakan produk hukum kontemporer guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern atau urban saat ini. Sebagaimana produk hukum (fatwa) yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),³⁶ dan secara perorangan (individu) dilakukan oleh Fahad Salim Bahammam dengan sebuah karya tulisnya yang telah diindonesiakan dengan judul "Panduan Wisatawan Muslim,"

Dalam kaitan dengan masalah hukum wisata (*as-siyahah-melancong*), Bahammam memetakan menjadi beberapa hukum. Pertama, wisata yang *mubah* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan, kegembiraan, dan kesenangan. Sedangkan yang kedua wisata yang *makruh* dilakukan karena tidak mempunyai tujuan syar'i seperti melancong ke negara-negara yang di dalamnya terdapat banyak kerusakan. Yang ketiga, wisata yang *haram* dilakukan dengan alasan karena untuk maksiat, berpartisipasi terhadap orang kafir, biayanya menyebabkan tertundanya membayar hutang, melanggar perintah kedua orang tua, dan lain sebagainya.³⁷

Adapun yang keempat wisata yang dianjurkan (*mustahabah*) karena dengan alasan untuk melakukan dakwah, *bertadabbur* tentang alam atau nasib bangsa-bangsa yang terdahulu, dan sebagainya.³⁸

Dari sini orang yang melakukan akan dapat mengambil 'ibrah

³⁶ Khusus untuk produk fatwa ini silakan baca di halaman lain karya ini yakni bab yang mengkaji Pariwisata Halal dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

³⁷ Disarikan dari Fahad Salim Bahammam, *Panduan Wisatawan Muslim*, ter.Ganna Pryadarizal Anaedi & Syifa Annisa (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 10

³⁸ Ibid.

yang bermanfaat bagi kehidupannya. Namun demikian pada akhirnya Bahammam menyatakan bahwa menurut para ulama bahwa berwisata merupakan salah satu bepergian yang *mubah* hukumnya.³⁹

Oleh karena itu, dalam kapasitasnya wisata sebagai bagian dari ajaran muamalah dalam Islam, tentu saja jalan keluarnya adalah perlu ada terobosan hukum yang dihasilkan melalui ijtihad oleh para pakar yang kompeten. Artinya, wisata sebagai objek hukum (baik syariah maupun nasional) merupakan wilayah ijtihadi yang terbuka ruang untuk didiskusikan oleh para pakar terkait sesuai bidang masing-masing. Dengan demikian memutuskan hukum dalam kaitan dengan wisata halal sebagai destinasi baru dalam dunia pariwisata butuh partisipasi dari berbagai kalangan pakar, antara lain pakar keislaman dalam bidang hukum.

Menurut kaidah fikih, muamalah dalam Islam, hukum asalnya adalah *mubah*, dalam arti boleh dilakukan, terkecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁰ Dengan bertolak dari kaidah ini menunjukkan bahwa membangun industri halal pada dasarnya adalah sah-sah saja. Hanya saja dalam pengelolaannya atau yang terkait dengan objek dan lain sebagainya tidak satu pun yang kontraproduksi dengan prinsip-prinsip syariah. Jika sekiranya terjadi perseberangan dengan yang prinsip, maka predikat 'halal' yang menjadi karakternya tidak akan mempunyai makna lagi secara syar'i.

Menetapkan hukum yang terkait dengan industri wisata halal, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat luas, terutama wisatawan Muslim yang saat ini semakin banyak populasinya dan semakin tinggi apresiasinya terhadap wisata yang berbasis syariah. Baik di tingkat lokal seperti

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Dalam kaitan ini, Lihat beberapa *maraji'* (referensi) kaidah-kaidah fikih, antara lain Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawwa'id al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H); Muhammad al-Ruki, *Qawaid al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Qalam, tt); Ibnu Taymiyah, *al-Qawaid al-Quraniyah al-Fiqhiyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1422 H), dan masih banyak lagi.

Indonesia, maupun di tingkat global. Adanya kepastian hukum, baik secara syar'i maupun perundangan berkecendrungan akan menjadi pertimbangan krusial bagi para calon wisatawan Muslim, apakah destinasi wisata halal menjadi pilihan atau tidak.

Kepastian hukum inilah sejatinya yang perlu mendapatkan perhatian dari pengelola (pemangku kepentingan) wisata halal, sehingga masyarakat nantinya benar-benar mengapresiasi destinasi wisata halal yang dikembangkan. Untuk itu, masyarakat perlu dibangun *mindset*-nya, dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mereka perlu diberi bukti dalam praktik bahwa apa yang ada di lapangan adalah sesuai dengan ketentuan syariah sebagai bagian kepatuhan kepada Tuhan.

Steril dari minuman yang memabukkan, menyiapkan tempat ibadah yang memadai, *spa* yang Islami dan lain sebagai dalam sebuah hotel yang berlabel syariah, sebagai salah satu infrastruktur pendukung, kiranya merupakan sebuah contoh kecil bahwa hotel tersebut telah melaksanakan prinsip syariah. Dengan demikian masyarakat akan mendapat kepuasan, kenyamanan, dan ketenangan, bahwa di sana ada kepastian hukum yang dibuktikan oleh para wisatawan Muslim selaku *stakeholder*.

2. Butuh Sentuhan Etika dan Kearifan Lokal

Mahathir Mohammad, mantan Perdana Menteri Malaysia, mengajukan salah satu jurus untuk meningkatkan daya tarik wisata halal di Indonesia, yakni perlu mengedepankan dan menjaga nilai-nilai Islami dan kearifan lokal (*local wisdom*). Pendapat ini sangat menarik untuk dikaji karena bagaimanapun kedua nilai tersebut merupakan ruh dan urat nadi dalam kehidupan bermasyarakat secara universal.⁴¹

⁴¹ Lihat, Irwan Kelana dan Rahmat Fajar, "Tiga Jurus Majukan Wisata Halal," dalam *Republika*, edisi 18 Agustus 2017, 16. Bandingkan dengan Qardhawi, *Dawar al-Qiyam*.

Adapun yang dimaksud nilai-nilai Islami tersebut antara lain bisa diartikan dengan nilai *akhlaqi* (etika-akhlak) yang harus diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Bukankah misi Rasulullah saw itu di antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebab itu beliau patut menjadi *uswah* bagi umat manusia dan dalam kapasitasnya sebagai Nabiyallah dan Rasulullah saw beliau memiliki keagungan akhlak sebagaimana yang dipuji oleh Allah swt dalam kitab suci al-Qur'an al-Karim. Bahkan, dikatakan salah satu kiat keberhasilan beliau dalam melakukan misi suci nubuwahnya adalah karena keagungan akhlak yang patut menjadi contoh dalam kehidupan.⁴²

Sebab itu agar perkembangan industri halal tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mengalami sukses besar, maka dalam segala aktivitasnya perlu mengedepankan nilai-nilai *akhlaqi* sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Artinya, dalam mengelola industri wisata halal sejatinya harus menghindari segala sesuatu yang kontra produksi dengan nilai syariah yang pada akhirnya akan menciderai makna halal itu sendiri.⁴³

Demikian pula yang bertalian dengan nilai-nilai kearifan lokal tidak kalah signifikansinya dengan nilai yang bersumber dari agama. Kearifan lokal ini selain merupakan potensi yang bernilai jual karena keunikan dan karakter yang dimiliki. Namun di dalamnya mengandung nilai filosofi atau pandangan hidup yang melekat dan menjadi panduan hidup komunitasnya masing-masing.

Masing-masing negara niscaya akan memiliki nilai kearifan lokal sendiri. Demikian pula masing-masing daerah yang dihuni oleh komunitas tertentu, niscaya akan memiliki nilai kearifan lokal yang tersendiri pula yang bersifat spesifik dan unik. Dalam realitas,

⁴² Dalam kaitan dengan akhlak (etika) sebagai nilai-nilai Islami ini silakan baca, QS., Al-Qalam, 68:4. Baca pula Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Alih bahasa, K.H. Farid Ma'ruf (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). Bandingkan dengan Manuel G. Velasquez, *Business Ethics: Concept and Cases*, 3th Edition (Englewood Cliffs N j, Printice Hall, 1992)

⁴³ Dalam hal ini bandingkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

tentu kearifan lokal itu akan banyak mewarnai atraksi wisata yang dikembangkan di daerah tertentu.

Untuk itu kearifan lokal yang telah dikonstruks sebagai atraksi wisata kekuatannya ada pada keunikan dan nilai-nilai yang dikandung di dalamnya yang tidak dapat diganggu karena telah menjadi milik dan kekayaan batin komunitas yang menguasainya.

Inilah sejatinya justru mengapa nilai-nilai kearifan lokal dalam kapasitasnya sebagai sebuah atraksi wisata di satu daerah harus tetap terpelihara agar karakter dan keunikannya yang menjadi daya tarik tetap terjaga pula. Inovasi dan kemasan hanyalah sebatas bentuk lahirnya saja agar memiliki daya tarik, namun substansi nilai yang terkandung di dalamnya harus tetap terjaga agar dapat dijadikan pelajaran bagi para wisatawan yang berkunjung. Inilah kiranya yang disebut dengan *tadabbur* alam yang akan banyak memberi manfaat dan inspirasi bagi siapa pun yang melakukannya.

3. Peran Pakar: Perlu Produk Fatwa dan Pengawas Syariah

Sebagaimana kita ketahui secara historis, bahwa kehadiran wisata yang berbasis syariah merupakan hal yang relatif baru di tengah perkembangan pariwisata konvensional di berbagai belahan dunia. Kehadirannya, nampaknya tidak lepas karena permintaan masyarakat Muslim global, karena mereka berharap ada alternatif baru sebagai pilihan guna memenuhi kebutuhan untuk berwisata.

Sebagai objek hukum yang baru, dengan sendirinya perlu dicari sandaran hukum yang memayunginya, terutama dari aspek syariahnya. Padahal, sebagaimana telah disinggung sebelum ini, sementara ini wisata halal merupakan wilayah ijtihadi yang belum ada sandaran hukumnya secara khusus yang bersumber dari wahyu, sehingga perlu ijtihad dari para ulama.

Dalam melakukan ijtihad, tentu saja tidak dapat dilakukan oleh semua orang yang tidak memiliki kompetensi, karena secara

akademik bagaimanapun ijtihad hanya boleh dilakukan para pakar (ulama) sebagai wilayah kompetensinya. Khusus untuk Indonesia, kompetensi masalah hukum syariah secara formal institusional dilakukan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴⁴

Mereka itulah yang secara konstitusional diberi kompetensi untuk mengeluarkan produk hukum sesuai kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat yang kian kompleks dan beragam.⁴⁵ Kendati tidak menutup kemungkinan bisa pula dilakukan oleh komunitas sosial keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti Nahdlatul Ulama dengan Bahtsul Masailnya dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa selama ini belum banyak atau masih sangat langka produk hukum dalam kaitan dengan masalah wisata halal. Padahal sejatinya produk hukum itu sangat dibutuhkan masyarakat, baik oleh kalangan penguasa, pengusaha maupun para wisatawan Muslim selaku konsumen.

Namun demikian, hal yang perlu dipahami bahwa setiap produk hukum baru yang ditujukan untuk menjustifikasi eksistensi dan aktivitas wisata halal harus merupakan produk para ulama dan para pakar yang kompeten. Antara lain dalam bentuk fatwa sehingga kepastian hukum secara syar'i benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁶

Dan dengan lahirnya fatwa sesuai kebutuhan, langkah selanjutnya adalah perlu adanya pengawasan dalam eksekusi (pelaksanaan) di lapangan. Apakah telah sesuai dengan yang

⁴⁴ Baca H.M. Ichwan Sam, dkk (Tim Penyunting), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: DSN-MUI kerja sama dengan Bank Indonesia, 2003)

⁴⁵ Lihat, H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmum Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 124-126

⁴⁶ Dalam kaitan ini, menurut Mahathir Mohammad: "Keterlibatan ulama dalam pengembangan pariwisata halal tidak boleh dilupakan. Pendapat ulama adalah elemen penting, sesuai tanggung jawabnya dalam menjamin makanan halal untuk dikonsumsi oleh warga Muslim." Baca, Rahmat Fajar, "Pengalaman Malaysia Kembangkan Wisata Halal, dalam *Republika*, edisi 24 Agustus 2017, 24

difatwakan, atau justru sebaliknya, masih ada penyimpangan sehingga kontra produksi dengan prinsip-prinsip syariah. Inilah kiranya urgensi perlunya kehadiran institusi pengawas oleh lembaga yang berkompeten.⁴⁷ Secara kelembagaan, di Indonesia hal ini bisa dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan di luar itu bisa dilakukan oleh masyarakat luas yang berkepedulian.

4. Perundangan Nasional: Butuh Kepastian Hukum dan Kebebasan Berusaha

Pada prinsipnya, industri wisata halal membutuhkan dua macam hukum, yakni syariah dan perundangan nasional. Tentunya peran kedua hukum ini tidak mungkin dihindari, agar pengembangan industri wisata halal di Indonesia dapat berkembang sesuai karakter dan aman secara yuridis dalam pelaksanaan program-programnya. Hukum yang pertama telah dikaji di bagian yang lain, sedangkan yang kedua akan dipaparkan di bagian sub tema ini.

Sebagaimana kelaziman yang berlaku secara universal bahwa setiap aktivitas yang dilakukan, bagaimanapun, secara yuridis, harus taat pada hukum yang berlaku di mana aktivitas itu dilakukan. Khusus untuk pengembangan industri halal di Indonesia, tentu saja harus taat pada hukum yang berlaku di negara Indonesia, karena lembaga dan aktivitasnya berada dalam wilayah yurisdiksi hukum Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Oleh sebab itu, jika sekiranya aktivitas yang dilakukan kontra produksi dengan norma hukum yang berlaku, maka dapat dikatakan

⁴⁷ Kehadiran Dewan Pengawas Syariah itu sebagaimana yang diterapkan di Perbankan Syariah di Indonesia yang dikoordinasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Agaknya antara Perbankan Syariah dengan Destinasi Halal banyak mempunyai titik persamaan dalam hal prinsip, yakni mengaplikasikan ajaran syariah Islam dalam dunia bisnis (muamalah). Sebab itu dengan menganalogikan pada titik persamaan prinsip itulah, maka adanya pengawasan syariah perlu pula dilakukan di dunia pariwisata halal. Di antara manfaat adanya lembaga pengawas dimaksud adalah untuk menjamin kepastian hukum dan mempertahankan karakter secara syariah yang wajib dipatuhi oleh para pengelola destinasi wisata halal di Indonesia. Dalam hal ini, lihat Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2001), 233-241

perbuatan itu tidak sah secara hukum atau batal demi hukum. Jika sekiranya peraturan yang secara khusus mengaturnya belum lahir, kiranya dapat menggunakan produk hukum yang ada selama masih ada relevansinya. Hal ini untuk menghindari adanya kekosongan hukum, padahal secara defacto aktivitas wisata halal itu telah berjalan di Indonesia.⁴⁸

Untuk itu bagaimanapun kelahiran produk perundangan nasional yang mengatur secara khusus tentang wisata halal di Indonesia sangatlah ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas, terutama oleh para pemangku kepentingan. Tentu saja, kehadirannya akan memberi keleluasaan terhadap pengembangan industri halal, selain juga yang terpenting lagi adalah menjamin kepastiaan hukum secara nasional.

F. Karakteristik: Mempertegas Prinsip dan Keunikan

1. Antara Paradigma Spiritualistik dan Materialistik

Sebagaimana kita pahami, bahwa dunia wisata adalah dunia bisnis. Bisnis dalam sistematika ajaran Islam termasuk ke dalam ranah muamalah yang membicarakan tentang hubungan antarmanusia dalam segala aspek kehidupan. Aktivitas bisnis yang selama ini berkembang, tentu berakar dari paradigma, dari laba, karena laba, untuk laba,” dari harta, karena harta, untuk harta,” atau “dari modal, karena modal, untuk modal.”⁴⁹ Demikian seterusnya.

⁴⁸ Untuk sementara ini, jika sekiranya produk hukum yang mengatur secara khusus industri halal di Indonesia belum lahir, kiranya bisa menggunakan pasal-pasal yang dianggap relevan sebagaimana yang tertuang di dalam perundangan pariwisata yang tengah berlaku. Hal ini mengacu, bagaimana sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebelum lahirnya perundangan khusus yang mengaturnya, untuk sementara itu masih mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku bagi perbankan umum (konvensional) di Indonesia. Selain kiranya juga perlu mengacu pada KUHPerdota sebagai acuan hukum privat secara umum di Indonesia. Atau dalam hal-hal tertentu, mungkin pula bisa menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal karena adanya persamaan karakter dalam kaitan dengan masalah kehalalan sebuah produk. Namun demikian, selama perundangan secara khusus belum lahir, patut diduga perkembangan industri wisata halal di Indonesia akan lambat, atau tidak akan sesuai dengan kebutuhan dan yang diharapkan. .

⁴⁹ Baca, Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi*, 1

Nampaknya, paradigma semacam ini tidak lepas dari akar filosofi yang mendasarinya, yakni filsafat kapitalisme yang berorientasi pada kepentingan materialistik semata. Filosofi ini telah menginspirasi dan mendorong para pengikutnya agar dalam hidup ini memacu diri memburu harta sebanyak-banyaknya melalui pilihan dan cara masing-masing.⁵⁰ Namun dalam praktiknya, tidaklah jarang pelakunya, dalam melakukan bisnis, mengabaikan norma-norma etika maupun norma-norma hukum, baik hukum syariat maupun hukum modern yang berlaku. Mereka berpandangan bahwasanya “bisnis adalah bisnis” (*business is business*), sehingga tidak perlu terikat oleh norma yang membelenggu dan mengurangi kebebasan. Atau, tidak jarang mereka beranggapan bahwa bisnis adalah merupakan aktivitas yang bebas nilai.

Paradigma di atas, telah menjadi *mindset* para pemangku kepentingan wisata konvensional yang berdampak lebih jauh terhadap segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas wisata. Antara lain kurang sekali mengedepankan sarana ibadah bagi para wisatawan Muslim. Jika sekiranya ada, itu pun hanyalah sebatas formalitas semata dengan fasilitas ala kadarnya. Tidak jarang, terjadi kesenjangan yang sedemikian mencolok antara kemewahan bangunan destinasi wisatanya dengan tempat ibadah seperti mushalla atau masjid yang tersedia. Nampaknya, untuk sementara ini kenyataan semacam ini telah menjadi fenomena umum yang banyak ditemui di berbagai destinasi wisata di tanah air.

Demikian pula dalam kaitan dengan kebutuhan penginapan misalnya. Tidak jarang bangunan hotel beserta ornamen yang sedemikian mewah, kontradiksi dengan fasilitas mushalla yang ada di sudut bangunan. Padahal sejatinya tempat ibadah ini merupakan fasilitas utama bagi wisatawan Muslim untuk menunaikan kewajibannya di tengah kesibukan dan rasa lelahnya dalam melakukan wisata.

⁵⁰ Bandingkan dengan Ibid.

Demikian pula yang terkait dengan masalah sarana untuk memenuhi kebutuhan makan, dalam hal ini restoran. Apakah setiap restoran yang ada telah memenuhi standar kehalalan setiap produk yang disajikan yang ditandai dengan dicantumkan label halal sesuai perundangan yang berlaku.⁵¹ Bukankah masalah kebutuhan makan dan minum merupakan hal yang sangat mendasar sekali, karena menyentuh langsung dengan perlindungan terhadap agama setiap wisatawan Muslim.⁵²

Fenomena yang demikian itu adalah sebagai konsekuensi paradigma materialistik-sekualistik yang lebih berorientasi pada kepentingan materi semata. Para pemangku kepentingan destinasi wisata konvensional seringkali abai terhadap apa yang bernilai spiritualistik daripada yang materialistik. Dengan kata lain, mereka lebih banyak mendahulukan keuntungan materi (harta-laba-profit) daripada keuntungan yang spiritualistik-transenden. Dalam hal ini, seakan-akan peran agama teralienasi atau terpinggirkan dari aktivitas wisata.

Tidak demikian halnya dengan wisata halal. Sebagai *rahmatan lil 'alamin*, ajaran Islam yang multidimensional dalam urusan ekonomi dan bisnis, tanpa kecuali bisnis wisata halal, tentu berpijak di atas paradigmanya sendiri yang universal. Yakni “dari Tuhan, karena Tuhan, untuk Tuhan.” Paradigma *Ilahiyyah-Robbaniyyah* ini pada dasarnya dapat menyadarkan pemangku kepentingan bisnis wisata halal termotivasi karena Allah swt.⁵³ Sebagai konsekuensinya, dalam melakukan aktivitas bisnis harus selalu dalam koridor ketentuan Allah swt, sampai akhirnya dalam menpacai tujuan adalah untuk Allah swt yang diwujudkan dalam bentuk ibadah hanya kepada-Nya.

⁵¹ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁵² Masalah kebutuhan makan dan minum dalam Islam masuk dalam tingkat kebutuhan *daruriyat* dan perlu dilindungi atas kehalalannya, sebagaimana yang diajarkan di dalam *maqashid al-syariah*. Tentang ini akan dibahas lebih jauh di bagian tersendiri.

⁵³ Lihat, Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi*, 2

Karena apa yang kita kelola dalam bisnis wisata halal, pada hakikatnya adalah milik Allah swt, Pemilik Mutlak yang menguasai kehidupan, sedangkan manusia hanyalah sebatas penerima amanah dan pemilik sementara. Sebagai penerima amanah, maka dalam mengelola bisnis wisata halal harus tunduk dan taat terhadap segala ketentuan-Nya. Selanjutnya hasil yang diperoleh perlu dipersembahkan atau sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah pula.⁵⁴ Bukankah Allah swt menciptakan jin dan manusia, adalah untuk mengabdikan hanya kepada-Nya.⁵⁵ Manusia pada hakikatnya adalah milik Allah swt, sebab itu pada waktunya akan kembali kepada-Nya.

Sebab itu bertolak dari paradigma teologis di atas, di antara karakter spesifik dari wisata halal kiranya dapat dipetakan sebagai berikut :

1. Mengapresiasi segala ketentuan syariat dan bernuansa Islami
2. Steril dari hal-hal yang haram yang kontra produksi dengan prinsip halal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat
3. Ada persentuhan antara nilai-nilai duniawi (profan) dan ukhrawi (spiritualitas-transenden)
4. Melindungi akidah pengunjung (wisatawan Muslim) dari perilaku yang kontraproduksi dengan ketentuan syariah
5. Menjamin kepastian hukum bagi wisatawan yang berkunjung, baik secara syariah maupun perundangan nasional
6. Di balik segala bentuk aktivitas yang dilakukan diharapkan mengandung makna ibadah (*ghairu mahdhah*) bagi para pelakunya sesuai niat (motivasi) dan kapasitas masing-masing.⁵⁶

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Lihat QS. Adz-Dzariyat, 51:56

⁵⁶ Dalam hal ini, bandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia N0, 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Karena itu, untuk jelasnya, karakter spesifik yang menjadi pembeda dengan wisata konvensional yang berkembang saat ini, akan dikaji tersendiri di bagian lain karya ini.

2. Persentuhan Dimensi Duniawi dan Ukhrawi

Tentu saja antara wisata halal dengan wisata pada umumnya (konvensional-sekuler) sejatinya mengandung sisi persamaan dalam banyak aspek. Namun demikian destinasi ini memiliki berkarakter spesifik yang membedakannya dari destinasi wisata yang sekularistik. Dilihat dari aspek persamaan misalnya, antara lain keduanya sama-sama membutuhkan *stakeholder*, baik wisatawan nusantara (wisnu) maupun mancanegara (wisman). Semakin tinggi frekuensi kunjungan, berkecenderungan akan semakin tinggi pula dampak ekonomi yang akan diperoleh. Sekaligus dapat dijadikan salah satu parameter bahwa sebuah destinasi banyak diminati oleh kalangan luas.

Di samping itu semua wisata apa pun pasti membutuhkan daya dukung, seperti tempat penginapan dengan segala macamnya (hotel, villa, rumah singgah, dan lain sebagainya), restoran sebagai pusat makan (kulinier), biro perjalanan (travel), pemandu wisata dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.

Perbedaan mendasar antara lain karena wisata halal bertumpu atau lahir dari paradigma teologis yang spiritualistik transendental. Karena itu bertolak dari paradigma itulah, sejatinya wisata halal harus mampu mengekspresikan kultur atau nuansa yang bercorak syariah. Ada persentuhan nilai syariah dengan nilai sains, atau bahkan dengan kearifan lokal yang sarat makna dan nilai bagi kehidupan manusia. Seyogianya, keduanya saling menyapa dan berinteraksi dalam melayani kebutuhan manusia sebagai wisatawan.

Karena itu, dalam atmosfer yang demikian itulah setiap wisatawan yang datang, secara sadar atau tidak, akan dapat memetik hikmah ganda secara bersamaan. Pertama, secara fisik (lahiri), ia

akan merasa terpenuhi salah satu kebutuhannya melalui wisata. Sedangkan yang kedua ia akan dapat memetik pelajaran dari nilai-nilai spriritualitas-religiositas yang terekspresikan di dalam berbagai aktivitas wisata yang berbasis syariah.

“Berwisata sambil beribadah,” inilah kiranya semboyan yang tepat dalam dunia wisata halal. Wisatawan menikmati berbagai atraksi wisata yang disajikan yang dapat menimbulkan kepuasan lahir, namun di sisi lain ia tidak pernah lupa menunaikan kewajiban beribadah kepada Tuhan. Melakukan shalat misalnya, karena ketersediaan sarana masjid yang memadai dan adanya kumandang adzan setiap masuk waktu shalat.

3. Sebuah Ekspresi Ajaran *Rahmatan lil ‘Alamin* dalam Dunia Bisnis

Sebagaimana kita ketahui bahwa watak dasar ajaran Islam adalah cinta kasih yang bersumber dari kata “rahma”. Bahkan kata “rahman:”, bentuk derivasi lain dari akar kata “ra-hi-ma” merupakan salah satu dari sifat Allah yang jumlahnya 99 yang dikenal dengan sebutan *al-Asma’ al-Husna*. Karena itu manusia sebagai khalifah di muka bumi ini perlu menerjemahkan dan mengekspresikan sifat Tuhan ke dalam kiehidupan dalam arti luas.⁵⁷

Banyak dasar teologis yang menjustifikasi kekuatan ajaran cinta kasih kepada seluruh alam semesta yang seringkali tidak disadari oleh manusia sendiri yang pada akhirnya muncul kesan justru sebaliknya yang pada akhirnya berpotensi merugikan eksistensi Islam itu sendiri dalam segala aspeknya. Selama ini secara realitas di dunia global, yang ditandai dengan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi tidaklah sedikit tuduhan yang mendeskreditkan ajaran Islam yang sejatinya penuh dengan kedamaian. Oleh mereka yang anti Islam

⁵⁷ Dasar teologis manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah di muka bumi, antara lain lihat QS., An-Nur, 24:55 dan Shad, 38:26. Selanjutnya, dalam kaitan dengan perannya, lihat, Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi*, 96-100. Baca pula, Muhammad Syafii Antonio, *Asma’ul Husna For Success in Business & Life* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2009).

(Islamophobia) Islam dipersonifikasikan sebagai sebuah sosok ajaran yang menakutkan, mengerikan, anti kemanusiaan. Kehadirannya di mana-mana dipersepsikan selalu menebar teror yang seakan-akan berpoetensi mengancam keamanan dan ketenangan dalam kehidupan manusia secara universal. Bukanlah Rasulullah saw itu diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.⁵⁸

Bukankah kesan yang semacam itu secara tidak langsung akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap segala aktivitas yang beraromakan ajaran syariat Islam. Katakan saja yang berkaitan dengan pariwisata halal yang saat ini banyak dikembangkan di berbagai negara., tanpa kecuali di Indonesia yang mayoritas Muslim. Justru karena dengan digalakkannya pengembangan destinasi wisata halal di negeri ini justru merupakan peluang, sekaligus tantangan bagi masyarakat Muslim sendiri. Sebagai bentuk ekspresi dari ajaran cinta kasih yang banyak diajarkan di dalam Islam sendiri.

Banyak ajaran yang sejatinya mendorong umat Islam agar mereka mampu menjadi subjek palaku pembumian ajaran *rahmatan lil 'alamin* dalam kehidupan, misalnya dalam dunia pariwisata, yang harus tercermin dalam perilaku masyarakat secara umum, khususnya bagi komunitas Muslim sebagai agen penyemaian ajaran cinta kasih di tengah masyarakat

Tidaklah sedikit ajaran dalam Islam agar sikap rahmah (cinta kasih) itu benar-benar terimplimentasi dalam setiap lini kehidupan. Antara lain ajaran *afsyusalam* (memanggil salam) kepada setiap Muslim, selain mengandung makna sebagai doa agar setiap Muslim diberi keselamatan baik diri maupun keluarganya. Juga mengndung makna melindungi dan mengamankan segala kepentingannya agar setiap orang merasa aman, tenang, dan sejahtera di manapun mereka berada. Atmosfer semacam ini tentu saja harus tercermin dalam setiap destinasi wisata yang berlabel halal.

⁵⁸ Lihat, QS. Al-Anbiyaa, 21:107, “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Demikian pula setiap selesai menunaikan shalat selalu diakhiri dengan ucapan salam kea rah sebelah kanan maupun kiri. Ajaran ini mengandung makna bahwa setiap Muslim tidaklah cukup hanya melakukan hubungan dengan Tuhan melalui ibadah ritual dalam bentuk shalat maupun ibadah-ibadah *mahdhah* yang lain (*vertical*). Namun perlu diimbangi pula dengan hubungan sesama manusia (*habluminannas-horizontal*) dalam segala bentuk muamalah keseharian. Dengan ajaran ini diharapkan kepada setiap Muslim tanpa kecuali agar mereka mampu menebar keselamatan dan kesejahteraan kepada orang lain. Dalam dunia wisata, implementasinya juga perlu menjamin keselamatan setiap pengunjung, baik Muslim maupun yang non Muslim tanpa kecuali. Tanpa ada sikap diskriminasi yang mencerminkan bahwa inti ajaran *rahmatan lil 'alamin* itu berlaku secara universal tanpa tersekat oleh isu SARA yang sempit.

Selain itu Islam sangat menekankan agar menghormati setiap tamu yang datang. Bukankah setiap wisatawan yang berkunjung ke sebuah destinasi itu ibarat para tamu yang akan melakukan silaturahmi. Sehingga dengan demikian, bagaimanapun mereka harus disambut dengan rasa suka cita, dengan penuh kerahaman, dijamu dengan jamuan yang terbaik, disediakan dengan akomodasi yang patut dan layak, dan lain sebagainya. Memperlakukan setiap wisatawan yang datang dengan penuh kasih (rahmah) berpotensi akan menimbulkan kesan positif bahwa destinasi yang dikunjungi benar-benar memberi kepuasan yang prima. Inilah sejatinya inti ajaran *rahmatan lil 'alamin* yang sangat ditekankan di dalam Islam, agar merefleksi dalam setiap kehidupan manusia secara universal.

Untuk selanjutnya, sejatinya, siapakah yang wajib mengekspresikan ajaran *rahmatan lil 'alamin* dalam dunia pariwisata yang berbasis syariah (halal)?. Apabila dilihat dari aspek wisata sebagai sebuah industri, tentu banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Artinya, palakunya tidaklah tunggal, atau hanya cukup dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja. Jika demikian, maka akan menimbulkan kesan, seakan-akan ajaran rahmah itu hanyalah

sebatas milik kalangan tertentu saja sehingga akan mengurangi makna universalitasnya yang hakiki.

Mereka, antara lain adalah para pamangku kebijakan, dalam hal ini adalah para penguasa yang terkait. Para pelaku usaha, seperti pemilik (pengelola) hotel, restoran, transportasi (travel), pemandu wisata, dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka inilah yang harus menjadi ujung tombak pengembangan destinasi wisata halal sebagai ekspresi dari ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Ekspresi ajaran *rahman* inilah yang seharusnya menjadi karakter spesifik dan unik yang membedakannya dengan destinasi wisata konvensional. Di dalamnya perlu ada nilai-nilai *plus* yang tidak diperoleh oleh mereka yang pernah berkunjung ke tempat lain yang tidak atau kurang mencerminkan nilai-nilai syariat Islam.

Peran masyarakat, di mana destinasi wisata halal dikembangkan, tentu saja tidaklah sedikit signifikansinya untuk mendukung keberhasilan industri wisata halal yang dikembangkan. Keramahan mereka (penduduk lokal) dalam setiap berinteraksi, bertransaksi, berkomunikasi dalam segala kepentingan tentu akan memiliki makna tersendiri bagi para wisatawan yang pernah berkunjung. Inti daripada ekspresi itu adalah bentuk pelayanan dalam sebuah atmosfer yang kondusif yang akan membuat para wisatawan merasa tenang, aman baik jiwa maupun hartanya. Mereka akan merasa puas dalam banyak hal setelah berkunjung karena adanya pelayanan yang prima (*excellence*) dalam segala lini, situasi, dan kondisi.

4. Sebagai Media Dakwah *bi-al-Hal*

Dakwah dalam Islam berarti mengajak kepada kebaikan yang bertujuan akhir (*goals-ending*) adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Bahkan yang terpenting lagi adalah meraih keselamatan dunia dan akhirat. Dakwah pada intinya mensosialisasikan atau menyampaikan kepada masyarakat secara luas mana yang baik dan mana yang buruk, selain juga mana yang hak dan yang mana batil sebagaimana yang diajarkan dalam syariat

Islam. Sumber utamanya adalah wahyu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw pada zamannya kepada para sahabat beliau. Karena itu, kendati Rasulullah saw telah tiada, namun dakwah tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman.

Islam sebagai salah satu agama langit yang bersifat universal yang penuh dengan ajaran *rahmatan lil 'alamin* dipertuntukkan bagi seluruh umat manusia. Pasca Rasulullah saw, dakwah itu dilanjutkan oleh para sahabat beliau, para tabi'in, para tabiinat tabiin dan seterusnya, sampai dengan abad modern ini dilanjutkan oleh para ulama sebagai pewaris para nabi.

Dalam melakukan dakwah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw bisa dilakukan secara verbal (oral), di samping melalui tindakan (*uswatun hasanah*). Kedua cara dakwah ini harus seiring sejalan. Namun demikian, hal ini, al-Qur'an mengancam sebagai perbuatan dosa besar kepada siapa yang menyampaikan sesuatu kebenaran namun dirinya sendiri tidak melakukannya. Inilah kiranya rahasia keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saw sehingga Islam terus berkembang pesat sampai abad modern ini. Di samping itu cara lain di abad global ini dakwah bisa dilakukan secara kultural dalam arti yang luas melalui infrastruktur yang sedemikian beragam.⁵⁹

Tentu saja banyak media yang dapat digunakan untuk melakukan dakwah kepada masyarakat secara luas. Artinya, dakwah belumlah dianggap cukup jika hanya menggunakan satu media tanpa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sejatinya, di antaranya dapat melalui aktivitas wisata halal yang saat ini sudah mulai banyak diminati oleh komunitas Muslim sebagai bagian dari *lifestyle* mereka di banyak kawasan. Justru karena itu, menjadikan wisata halal yang saat ini sedang menjadi *trending topic* sebagai media dakwah merupakan momen yang sangat tepat di kalangan masyarakat modern.

⁵⁹ Pijakan teologis (syar'i) kewajiban melakukan dakwah yang pada dasarnya mengajak manusia pada kebenaran dalam Islam (jalan lurus), antara lain dapat dipahami dari inti ayat-ayat Qur'ani sebagai berikut: QS. At-Taubah, 122, an-Nahl, 125' dan al-Hajj, 41, Ali 'Imran, 104 dan 114., dan masih banyak lagi.

Atau dengan kata lain, wisata halal sejatinya merupakan salah satu media dakwah untuk membumikan syariat Islam di ranah bisnis. Untuk itu, apa saja yang dapat dijadikan dasar untuk meyakinkan kita selaku umat Islam sehingga perlu didukung eksistensi dan kehadirannya. Selanjutnya daya dukung apa saja yang perlu disiapkan oleh pemangku kebijakan, investor maupun pengusaha dengan segala macam aktivitas yang perlu dilakukan.

Memaksimalkan fungsi kehadiran masjid yang representatif di berbagai tempat wisata halal dengan segala aktivitasnya adalah juga merupakan salah satu media dakwah. Setiap datang waktu shalat, selalu dikumandangkan panggilan adzan, selanjutnya dilakukan shalat berjamaah yang diikuti oleh para wisatawan dengan imam tetap yang bertugas secara khusus.⁶⁰ Syiar semacam ini juga merupakan bagian dari aktivitas dakwah kepada komunitas Muslim.

Hotel tempat menginap, tidak kalah pentingnya sebagai sarana dakwah dalam melayani para pengunjung Muslim yang datang. Ucapan salam oleh setiap pelayan dengan senyum keramahan yang menyejukkan. Keberadaan sarana ibadah yang pantas dan layak, ketersediaan makanan dan minuman yang berlabel halal, fasilitas spa dan kolam renang yang Islami, jaminan keamanan yang prima, dan lain sebagainya adalah merupakan bagian dakwah *bilhal* di dalam Islam. Itulah ekspresi dakwah bisu dari perkataan yang agitatif, namun hidup dan komunikatif dalam aktivitas yang sarat

⁶⁰ Bukankah masjid itu merupakan ikon (lambang) ketakwaan manusia terhadap Tuhan, sekaligus lambang peradaban Islam. Bukankah Rasulullah saw sebelum melakukan dakwahnya di Madinah, awal kali yang dibangun beliau adalah tempat ibadah umat ini, tepatnya, Masjid Quba,' sebelum beliau mendirikan Masjid Nabawi di Madinah pada saat melakukan hijrah di era awal Islam klasik saat itu. Dalam kaitan dengan pengembangan wisata halal, kebutuhan masjid bagi wisatawan, antara lain sebagaimana sekarang yang sedang dibangun sebuah Masjid Agung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah (NTB) oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Lihat, Muhammad Nursyamsi., "Menanti Wisata Religi di Mandalika," dalam *Republika*, edisi 27 Juli 2017, 2. Selain itu, lihat pula, Irwan Kelana, "PWH Gelar Bangkok Pattaya Halal Edu Trip," dalam *Republika*, edisi 27 Juli 2017, 2. Terlebih lagi, saat ini umat semakin mencintai masjid, dengan begitu kehadiran tempat ibadah sangatlah dibutuhkan oleh mereka. Termasuk oleh wisatawan Muslim. Lihat, Wahyu Suryana, "Umat Makin Cintai Masjid," dalam *Republika*, edisi 24 Mei 2017, 11

makna dan penuh hikmah yang dapat dipetik pelajaran oleh para pengunjung Muslim.

Demikian pula apa menjadi tugas pemandu wisata halal yang tentu saja mempunyai karakteristik berbeda dengan pemandu wisata konvensional. Selama dalam perjalanan wisata, tugas pemandu, jika waktu shalat tiba, hendaknya ia mengingatkan wisatawan yang dipandu untuk melakukan kewajiban ibadahnya menuju masjid yang terdekat.⁶¹ Demikian pula, jika masuk waktu untuk makan, pemandu wajib mengantarkan ke tempat makan (restoran) yang sudah jelas kehalalannya.⁶²

Kiranya semua aktivitas tersebut di atas merupakan salah satu bentuk atau cara menyadarkan para wisatawan agar dalam kondisi apa pun harus selalu mengingat Tuhan dan tidak boleh meninggalkan kewajiban ibadahnya kepada-Nya. Dalam kondisi apa pun harus tetap konsilsten dengan apa yang diajarkan dalam Islam.

Inilah sejatinya salah satu karakter wisata halal yang di dalamnya banyak pesan-pesan langit (religiositas-transenden) yang dapat digali oleh setiap Muslim yang pada akhirnya akan mengantarkan pada kesadaran mereka bahwa dalam hidup ini tidak boleh hanya mengajar kepentingan lahir semata. Namun juga harus juga diimbangi dengan kepentingan batin (spiritualitas) secara berkeselimbangan.⁶³ Bukankah keseimbangan (*tawazun-balancing*)

⁶¹ Dalam kaitan dengan bagaimana peran pemandu wisata ini, baca, Reja Irfa Widodo, "Menjadi Tour Leader Muslim Bersertifikat," dalam *Republika*, edisi 27 Juli 2017, 2. Tugas Tour Leader Muslim, antara lain mengingatkan peserta tour untuk melakukan shalat selama dalam perjalanan, setiap masuk waktu shalat sebagai bagian dari kewajiban mereka selaku Muslim.

⁶² Berkaitan dengan restoran halal ini, Irwan Kelana, "PWH Gelar Bangkok Pattaya Halal Edu Trip," dalam *Republika*, edisi 27 Juli 2017, 2 dan Irwan Kelana, "Stakeholder Wisata Muslim Perlu Sinergi," dalam *Republika*, edisi 27 Juli 2017, 2

⁶³ Dalam kaitan ini, baca QS., Al-Jumu'ah, 62:9-11. Maksudnya apabila telah ada panggilan mu'azzin untuk menunaikan shalat Jumat, maka kaum Muslimin wajib meninggalkan aktivitas jual-belinya. Ini menunjukkan bahwa pada diri kaum Muslimin perlu ada keseimbangan antara kepentingan duniawi dengan kepentingan ukhrawi, antara kepentingan materialistik dengan kepentingan spiritualistik.

watak dasar dari ajaran Islam yang perlu didakwahkan kepada seluruh umat manusia di planet bumi ini.

Pesan lain agar para wisatawan Muslim semakin meyakini ajaran Islam yang bersikap ramah, adil, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan etika, bersikap terbuka, dan sikap konstruktif lainnya yang tercermin di dalam praktik wisata yang pernah dialami oleh mereka.

Pesan lain niscaya akan dapat diperoleh para wisatawan jika sekiranya mereka berziarah ke makam tokoh besar dalam Islam seperti Makam Walisongo yang sudah terkenal. Demikian pula jika mereka berkunjung ke masjid-masjid bersejarah seperti Masjid Demak di Jawa Tengah dan Masjid Sunan Ampel di Surabaya, atau Masjid Sunan Giri di Gresik, niscaya mereka akan mendapat pelajaran melalui penjelasan pemandu bagaimana perjuangan para ulama terkenal itu. Termasuk bagaimana sejarah pembangunan masjid beserta keunikannya masing-masing. Ini semua adalah bagian dari dakwah yang sejatinya akan menyadarkan dan mendekatkan wisatawan Muslim kepada ajaran Islam melalui wisata.

5. Medan *Silat al-Rahim* dan *Fastabiq al-Khairat*

Sebagaimana kita ketahui dan kita pahami bahwasanya urusan wisata adalah urusan bisnis yang di dalam sistematika ajaran Islam masuk dalam kajian bab muamalah. Di dalamnya banyak dibahas bagaimana hubungan antarmanusia dalam menjalani kehidupan ini sesuai prinsip syariah. Termasuk di dalamnya adalah aspek bisnis dalam bentuk industri wisata halal.

Sebagaimana lazimnya dalam aktivitas bisnis, tentu paling tidak ada produsen dan konsumen, ada penjual dan pembeli, dan seterusnya. Tugas produsen adalah memproduksi, sedangkan konsumen adalah sebagai pengguna (*stakeholders*). Dalam kaitan dengan industri wisata halal, produsen adalah di antara pemangku kepentingan yang memproduksi apa saja yang akan disajikan di

dalam destinasi wisata yang dikembangkan. Sedangkan konsumen adalah penikmat, pengguna dan pemakai dari apa saja yang disajikan oleh produsen itu.

Namun demikian, di sisi lain pemangku kepentingan (produsen-pengusaha) juga sebagai penjual jasa kepada pembeli (konsumen). Karena yang dinikmati oleh pembeli itu bukanlah dalam bentuk barang (materi), tetapi sebatas menikmati segala atraksi yang disajikan. Apakah konsumen atau pembeli itu puas atau tidak, tentu saja sangat tergantung kepada bagaimana kualitas atraksi yang dijual beserta fasilitas dan pelayanan yang diberikan.

Akan tetapi secara hukum, bagaimanapun kedua pihak di atas, dalam hal ini produsen dan konsumen atau penjual dan pembeli, sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama yang harus saling menghormati dan melindungi. Apa yang menjadi hak produsen, misalnya, pada hakikatnya merupakan kewajiban bagi konsumen. Demikian pula apa yang menjadi hak konsumen justru merupakan kewajiban bagi produsen. Demikian seterusnya dalam kapasitas hubungan antara produsen dan konsumen.⁶⁴

Namun demikian, di sisi lain dalam dunia wisata, halal maupun konvensional, pasti ada interaksi antarwisatawan, selaku konsumen, baik sesama Muslim maupun yang beragama lain. Tujuan mereka adalah sama, yakni untuk berlibur dan bertadabbur, sehingga perlu saling menghormati dan menghargai antara yang satu dengan yang lain. Justru di sinilah ajang saling mengenal antara yang satu dengan yang lain, baik yang domestik maupun mancanegara. Di sinilah ajang silaturahmi antarmanusia dan antarbangsa. Bahkan sesama Muslim bisa saling mengenal antara yang satu dengan yang lain, kendati bisa jadi interaksi tidak dalam jangka waktu yang lama. Tetapi secara teologis itulah kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan manusia yang beragam etnis, kulit, budaya, tingkat sosial ekonomi, kebangsaan, dan lain sebagainya.⁶⁵

⁶⁴ Dalam hal ini, baca, Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penebar Plus, 2012), 138-162 dan Djakfar, *Hukum Bisnis*, 409-437

⁶⁵ Dalam kaitan ini, lihat QS., Al-Hujurat, 49:13

Lebih jauh sebagaimana umumnya bahwa dalam dunia bisnis juga dikenal adanya pesaing (*competitor*) yang sama-sama menggarap objek bisnis yang sama sehingga rawan munculnya persaingan yang tidak sehat antara yang satu dengan yang lain. Namun demikian, dalam industri wisata halal, sejatinya persaingan itu tidak perlu terjadi, karena masing-masing destinasi memiliki keunikannya sendiri.

Hanya saja untuk bisa memenangkan persaingan itu sangatlah tergantung pada bagaimana cara mengemas atraksi dari potensi masing-masing sehingga benar-benar mempesona dan mempunyai daya tarik yang tinggi. Sebab itu menurut hemat penulis dalam membangun industri wisata halal bukanlah persaingan yang berkonotasi negatif, namun lebih tepat bila dikatakan *fastabiq al-khairat* antarpelaku.⁶⁶ Berlomba dalam kebaikan dan saling menolong antara yang satu dengan yang lain.

Bukankah tolong-menolong dalam kebaikan itu merupakan anjuran di dalam Islam.⁶⁷ Kebaikan di sini dapat diartikan karena membangun wisata halal pada dasarnya adalah untuk memberikan solusi dan alternatif agar wisatawan Muslim tidak terus terjebak dalam dunia wisata konvensional yang tidak jarang bertentangan dengan prinsip syariah. Sebab itu untuk memenangkan persaingan dengan wisata konvensional perlu ada sinergi sesama pelaku dan perlu terus berlomba dalam arti yang positif, konstruktif, dan produktif.

Namun demikian bagaimanapun realitas persaingan itu merupakan *sunnatullah* yang pasti terjadi dalam bidang apa pun. Dalam konteks persaingan internasional, saat ini, menurut Global Muslim Travel Index (GMT) Indonesia masih penduduki peringkat ketiga, di bawah Malaysia yang menempati peringkat pertama dan Uni Emirat Arab di peringkat kedua. Tetapi karena termotivasi untuk terus meningkatkan pendapatan negara ke depan, tepatnya

⁶⁶ Lihat, QS.,Al-Maidah, QS.,5:48

⁶⁷ Dalam kaitan dengan perintah saling tolong-menolong ini, baca, QS.,Al-Maidah, 5:2

tahun 2018 Indonesia menargetkan berada pada peringkat kesatu.⁶⁸ Mencoba mengalahkan kedua negara tersebut yang selama ini mendahului Indonesia.

6. Sumber Daya Manusia: Butuh Penguasaan Sains dan Syariah

Industri wisata halal adalah merupakan salah satu pilihan di dunia bisnis yang memproduksi dan menjual jasa kepada wisatawan selaku *stakeholder*. Menurut Muhammad Abdul Mannan, paling tidak ada empat faktor produksi dalam upaya pengembangan industri yang harus terpenuhi ketersediaannya, yakni tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi.⁶⁹ Bagaimanapun keempat komponen ini harus tersedia agar industri yang akan dibangun terus berkembang dan berkelanjutan. Tentu saja, kesemuanya itu harus sama-sama kuat dan saling melengkapi agar tidak terjadi kesenjangan yang tidak diinginkan.

Namun demikian, dari keempat komponen tersebut, bagaimanapun yang paling strategis adalah tenaga kerja (*human resource*) dalam menjalankan perannya masing-masing. Yang dimaksud tenaga kerja atau faktor manusia dalam dunia industri tidaklah dalam pengertian yang sempit, seperti tenaga kasar tanpa *skill* dan penguasaan pengetahuan (sains). Tetapi perlu diperluas pengertiannya, yang antara lain meliputi pemangku kebijakan, perencana, dan para pelaku mulai dari tingkat atas sampai bawah semisal petugas *cleaning service*. Kemua sumber daya manusia (SDM) ini harus fungsional, dalam arti mau menjalankan fungsi masing-masing secara proporsional. Hal ini juga harus berlaku di dunia industri wisata halal.

⁶⁸ Perlu diketahui Malaysia yang saat ini berpenduduk 31 juta, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke negara ini mencapai 29 juta orang per tahun. Karena itu untuk menggenjot perolehan visa, Indonesia saat ini tengah berambisi meningkatkan daya saing sektor wisatanya, termasuk wisata halal. Dengan alasan bahwa sektor ini merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Lihat, Irwan Kelana dan Rahmat Fajar, "Tiga Jurus Majukan Wisata Halal," dalam *Republika*, edisi 18 Agustus 2017, 16

⁶⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, ter.M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 55-63

Peran sentral dan strategis SDM itu karena tidak lepas karena kelebihan dan potensi yang dimilikinya sehingga manusia menjadi makhluk yang sempurna dan mulia di hadapan manusia dan Tuhan selaku Pencipta. Manusia memiliki akal untuk berpikir, sebagai piranti, agar dapat menghasilkan segala apa yang bermanfaat bagi yang lain. Demikian pula diberi hati nurani yang menjadi sumber perilaku, dan lain sebagainya. Sebab itu sangatlah logis apabila Tuhan menyerahkan tanggung jawab mengelola bumi beserta isinya ini kepada manusia yang oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya dibahas pada sub topik konsep *Istikhlaf*.⁷⁰ Yang dimaksud adalah manusia dalam kapasitasnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi mendapat amanah untuk mengelola dan memakmurkannya sesuai ketentuan-ketentuan-Nya.

Bukankah apa yang dikelola dalam industri wisata halal itu pun pada hakikatnya adalah milik Allah swt semata. Sedangkan manusia hanyalah sebatas pemilik nisbi (relatif-sementara) dan penyandang amanah yang kelak wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.⁷¹

Semakin kuat, terampil, dan profesional SDM yang mengelola, berkecenderungan akan semakin cepat akselerasi industri wisata halal yang akan dikembangkan di Indonesia guna mengejar ketertinggalannya selama ini dari negara-negara lain di pentas global. Bukankah destinasi wisata halal itu ibarat sebuah negara, jika SDM yang mengelola kuat selaku bangsa, maka niscaya negara itu akan lebih cepat mengalami kemajuan yang kompetitif.

Contoh konkret dalam hal ini antara lain adalah Jepang dan Singapura. Kendati dari aspek sumber daya alamnya yang terbatas, namun karena dihuni oleh SDM yang berkualitas, profesionalisme tinggi, penguasaan skill dan ilmu pengetahuan yang memadai dan mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi pula, mereka bisa menjadi negara yang maju. Bahkan dalam bidang industri wisata, Singapura

⁷⁰ Lihat, Qardhawi, *Peran Nilai*, 39. Lihat pula QS. Al-Baqarah: 30

⁷¹ Dalam kaitan ini, baca, Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi*, 85-109

merupakan salah satu destinasi yang menjadi salah satu tujuan wisatawan di tingkat dunia. Mereka mampu mengemas destinasi wisata yang berdaya tarik dan mempesona sebagai buah inovasi dan hasil kreasi anak bangsa Negara Pulau itu.

Iniilah bukti nyata bagaimanakah sejatinya peran sentral SDM dalam mengelola sebuah industri yang bisa memperkuat daya saing tinggi di pentas dunia. Namun demikian, khusus untuk SDM wisata halal belumlah cukup hanya menguasai ilmu kepariwisataan (sains) semata, karena bagi mereka masih perlu pula memahami prinsip-prinsip syariah.⁷² Terutama yang berkaitan dengan masalah kepariwisataan dalam segala aspeknya, agar para wisatawan memperoleh kepuasan.

7. Infrastruktur Pendukung

Perlu diakui bahwa untuk pengembangan industri wisata, tanpa kecuali wisata halal pasti dibutuhkan infrastruktur yang mendukung keberlangsungannya. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, niscaya industri yang akan dibangun tidak akan berkembang secara maksimal sebagaimana yang diharapkan. Jika di satu kawasan, di mana destinasi wisata halal baru dikembangkan, namun demikian di sisi lain, wisatawan tidak mudah mendapatkan tempat ibadah untuk melakukan shalat. Atau pun jika ada, namun sangatlah tidak memadai, maka hampir dapat dipastikan mereka tidak akan merasakan kepuasan sesuai yang diharapkan.

Demikian pula apabila jalan masuk (akses) menuju destinasi juga kurang memadai, atau sulit terjangkau, maka bukanlah tidak mungkin akan menjadi salah satu kendala berkembangnya sebuah

⁷² Dalam kaitan dengan *Tour Leader Muslim*, sebagai salah satu SDM di dunia wisata halal misalnya, di samping memiliki kemampuan manajerial atau mengatur perjalanan wisata, termasuk pengetahuan serta seluk-beluk tujuan wisata, juga sepatutnya mengerti soal nilai-nilai keislaman. Untuk jelasnya, seorang *tour leader* harus memenuhi lima kompetensi umum, 14 kompetensi inti, dan tiga kompetensi khusus atau pendukung. Karena itu untuk mendapat pengakuan secara resmi tentang kemampuan seorang *tour leader* seharusnya diberi sertifikat bagi mereka. Lihat, Reja Irfa Widodo, "Menjadi Tour Leader Muslim Bersertifikat," dalam *Republika*, edisi 27 Juli 2017, 2

destinasi wisata. Karena bagaimanapun kepuasan itu sangat ditentukan pula oleh faktor ketercukupan dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Bukankah, ketercukupan infrastruktur dalam sebuah destinasi wisata samahalnya dengan adanya pelayanan yang prima bagi wisatawan.

Selain itu yang berkaitan dengan kebutuhan makan, infrastruktur ketersediaan restoran atau kafe halal sudah pasti menjadi bagian kebutuhan primer para wisatawan. Mereka butuh rumah makan halal yang sudah jelas kehalannya yang antara lain ditandai dengan adanya label halal setiap makanan dan minuman yang disajikan. Jika sekiranya fasilitas ini tidak tersedia, maka niscaya akan mengurangi daya tarik destinasi wisata halal yang ada di kawasan itu.

Demikian pula yang terkait dengan kebutuhan penginapan, seperti hotel yang menerapkan prinsip syariah harus benar-benar tersedia di kawasan atau di sekitar destinasi yang menjadi tujuan wisata. Kesulitan atau ketidakhadiran sarana ini dampaknya akan sama dengan ketidaktersediaan sarana yang lain, yakni para wisatawan tidak akan merasakan kepuasan.

Selanjutnya infrastruktur lain yang telah kalah krusialnya adalah ketersediaan travel Muslim (syariah) yang akan memandu *travelers* Muslim selama melakukan wisata yang didukung pula dengan *Tour Leader* Muslim yang terpercaya. Jika pengusaha travel melayani secara prima, niscaya *travellers* Muslim akan memperoleh kepuasan yang prima pula. Inilah sejatinya cermin esensi ajaran Islam sebagai ajaran *rahmatan lil 'alamin* bagi kehidupan di dunia.

Daya dukung lain yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan pusat belanja yang menerapkan prinsip syariah agar pembeli merasa nyaman, aman, dan yang terpenting lagi perlu adanya transparansi harga yang layak dan patut. Selain juga adanya pelayanan yang baik kepada para pengunjung sehingga mereka akan merasakan kepuasan sesuai yang diharapkan.

Dengan kehadiran infrastruktur pendukung dan para pemangku kepentingan tersebut,⁷³ kiranya perlu ada sinergi antarmereka dengan prinsip saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Dan dengan sinergitas itulah destinasi wisata halal di sebuah kawasan akan mudah dan cepat berkembang yang dapat memberi keuntungan atau manfaat kepada semua pihak.

G. Strategi Pengembangan Destinasi

Paling tidak yang dapat dijadikan destinasi dalam industri wisata halal dapat dipilah ke dalam tiga kategori. Yakni memelihara apa yang selama ini telah ada dan dianggap mapan. Katakan saja, yang dapat masuk ke dalam kategori pertama ini adalah wisata religi Walisanga yang telah sangat termasyhur di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, terutama di kalangan Sunni. Wisata religi ini, dalam kenyataan, tidaklah sebatas sampai pada situs Sunan Ampel di Surabaya atau Sunan Giri di Gresik, namun juga berlanjut sampai ke Makam Kiai Cholil (Pesarean-Madura) di Bangkalan, Pesarean Batuampar di Pamekasan, dan Makam Syaikh Yusuf di Telango Sumenep Pulau Madura. Tanpa kecuali Asta Tinggi dan Masjid Jamik Kota Sumenep.

Bahkan akhir-akhir ini objek destinasi itu semakin meluas karena mereka yang melakukan ziarah ke Walisanga juga melanjutkan ziarah ke Makam Gus Dur di Jombang. Oleh mereka, mantan Presiden Republik Indonesia yang keempat itu dianggap *waliyullah* (kekasih Allah), sehingga mempunyai daya magnet tersendiri. Salah satu bentuk ekspresi penghormatan mereka antara lain adalah perlu menziarahi makamnya.

⁷³ Menurut Yenny Erika Andriani, *Founder* Pasar Wisata Halal (PWH) para pemangku kepentingan pariwisata, antara lain adalah hotel, restoran, pusat belanja, dan pertunjukan. Lihat, Irwan Kelana, "PWH Gelar Bangkok Pattaya Halal Edu Trip," dalam *Republika*, edisi 27 Juli 2017, 20. Namun demikian menurut penulis, pemangku kepentingan itu lebih dari itu, yakni antara lain kehadiran perusahaan travel dan pemandu wisata misalnya, juga tidak kalah pentingnya untuk memajukan industri wisata halal di suatu negara.

Selanjutnya yang kedua adalah melakukan modifikasi dan renovasi dari apa yang sudah ada sebelumnya sehingga akan mempunyai nilai tambah sebagai tujuan wisata. Jika dikemas sebagai bentuk wisata halal misalnya, maka dengan sendirinya tidak boleh kontra produksi dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Jika bertentangan, maka predikat “halal” yang dilekatkan di belakang kata “wisata” tidak akan mempunyai makna sesuai prinsip syariah.

Adapun sebagai ilustrasi kategori yang kedua ini, jika sekiranya di suatu kawasan terdapat kampung Muslim yang dikenal sangat taat terhadap agamanya dengan segala keunikan budayanya, maka kiranya bisa direnovasi dan dimodifikasi menjadi sebuah destinasi wisata halal baru yang menarik pengunjung karena keunikan yang dimiliki. Dalam kaitan ini kiranya berlaku kaidah *al-Muhafadhatu ‘alal Qadimis Sholeh wal Akhdhu bil Jadidil Ashlah*.⁷⁴

Contoh lain adalah dunia pendidikan. Katakan saja jika ada Pondok Pesantren yang telah dikenal luas oleh masyarakat, kiranya bisa saja institusi ini direnovasi dan dimodifikasi pula menjadi sebuah destinasi wisata halal yang berbasis pendidikan Islam. Namun demikian di sini perlu dikemas sedemikian menarik dan mempesona bagi pengunjung agar tidak terkesan suasananya tidak lebih dari lembaga pendidikan sebagaimana umumnya. Sebab itu bagaimanapun inovasi baru perlu dilakukan agar potensi keunikannya yang tersembunyi dapat dieksplorasi dan disajikan sehingga mempunyai nilai tambah kepada para pengunjung.

Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, memiliki beragam bangunan maupun situs sejarah (*legacy*) yang membanggakan yang mempunyai potensi daya tarik wisata. Cagar budaya itu, antara lain adalah rumah HOS Cokroaminoto, Gedung Nasional Indonesia (GNI) Jalan Bubutan, Monumen Tugu Pahlawan, Kampung Kraton di Jalan

⁷⁴ Lihat, antara lain H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 110

Kramat Gantung, dan Rumah WR Soepratman Jalan Mundu.⁷⁵ Oleh karena itu, dengan cagar itu, Pemerintah Kota Surabaya bertekad untuk menjadikan situs atau cagar budaya itu sebagai destinasi wisata⁷⁶ Demikian pula Kabupaten Bondowoso, yang selama ini dikenal sebagai Kota Tapai, untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, khususnya bagi pecinta kopi, mulai mengembangkan apa yang dikenal “Sensasi Wisata Kampung Kopi.”⁷⁷ Untuk sementara “Kampung Kopi,” hanya dibuka pada pekan kedua dan keempat setiap bulan. Di tempat wisata ini wisatawan dapat menyeduh aneka ragam jenis kopi arabika seperti “ekspreso, blue mountain, blue ijen, robusta,” dan beberapa jenis lainnya.⁷⁸

Sejatinya objek-objek wisata yang dimiliki kedua kota tersebut dapat dimodifikasi sebagai bagian dari wisata halal baru di tanah air, asalkan saja bisa mencerminkan nuansa Islami secara universal. Tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi karakter wisata halal pada umumnya.

Dalam kaitan ini, Ketua Indonesian Islamic Travel Communication Forum (IITCF), Eddy Hamdi dan Ketua Asosiasi Tour Leader Muslim Indonesia (ATLMI), Priyadi Abadi, menegaskan bahwa “sesungguhnya banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikemas menjadi wisata Muslim.”⁷⁹ Namun demikian, lanjut Priyadi Abadi, bagaimanapun dalam hal ini, “*Stakeholder* wisata Muslim harus bersinergi untuk membangun wisata Muslim Indonesia dan dunia. Kita butuh berkembang serta sukses bersama.”⁸⁰ Ini menunjukkan bahwa dalam membangun destinasi wisata tidaklah cukup hanya mengandalkan keberadaan objek semata, namun juga ditentukan faktor kebersamaan antarpemangku kepentingan.

⁷⁵ Lihat, Binti Sholikah, “Cagar Budaya Surabaya Jadi Destinasi Wisata,” dalam *Republika*, edisi 29 Juli 2017, 10

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Lihat, Yusuf Asssidiq (ed), “Sensasi Wisata Kampung Kopi Bondowoso,” dalam *Republika*, edisi 4 Mei 2017, 13

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Lihat, Irwan Kelana, “Stakeholder Wisata Muslim Perlu Sinergi,” dalam *Republika*, edisi 27 Juli 2017, 20

⁸⁰ Ibid.

Sedangkan yang ketiga, bentuk pengembangan industri wisata halal adalah menciptakan sesuatu yang baru, misalnya melalui *event-event* tertentu yang sengaja diciptakan dengan daya tarik tersendiri. Misalnya saja ekspo Islamic Book Fair, Festival Muslim Fashion, Kuliner Halal yang berbasis makanan lokal dan lain sebagainya.

Contoh konkret berkaitan dengan bentuk yang ketiga ini antara lain adalah Pesona Khazanah Ramadhan sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Ramadhan 1438H yang lalu. *Event* ini sarat dengan kegiatan ibadah sesuai dengan momennya, selain juga diisi dengan berbagai atraksi penunjang lain yang bernuansakan Islam. Keunikan *event* yang dikemas sedemikian menarik dan mempesona itu, selain karena dianggap baru pertama kali di Indonesia, juga karena dikemas yang bernuansa wisata halal pola baru yang diharapkan ke depan akan menginspirasi daerah lain di Nusantara.

Di Indonesia, potensi untuk mengembangkan destinasi wisata halal baru sebenarnya bukanlah hal yang mustahil, karena tidak sedikit potensi tersembunyi yang sampai saat ini belum tereksplorasi. Antara lain aspek penduduk, kekayaan alam dengan segala macamnya, etnis, bahasa, agama, budaya dan lain-lainnya, yang apabila dikelola secara profesional dan dikemas dengan baik dan menarik, niscaya akan mempunyai nilai tambah ekonomi yang tinggi dan lebih menjanjikan bagi masa depan bangsa Indonesia.

Contoh lain lagi yang tidak kalah menariknya, adalah Banyuwangi Ethnic Carnaval (BEC) dan Jember Fashion Carnaval (JFC). Kedua carnaval ini sejatinya dapat dikemas sebagai bagian dari destinasi wisata halal baru yang menarik dan unik di tanah air. Bahkan untuk JFC sampai dengan tahun 2017 telah masuk event yang ke 16 yang mengusung tema "Victory Unity in Diversity."⁸¹

⁸¹ Dalam hal ini, lihat "Ajak Daerah Tetangga Meriahkan JFC," dalam *Jawa Pos*, edisi 10 Agustus 2017, 10. Lihat pula, "Jember Fashion Carnaval," dalam *Kompas*, edisi 10 Agustus 2017, 23, dan "Jember Kota Karnaval Indonesia," dalam *Republika*, edisi 14 Agustus 2017, 21

Dalam kaitan dengan strategi pengembangan destinasi wisata ini, Arif Yahya, selaku Menteri Pariwisata, mengemukakan beberapa resep peningkatan kunjungan wisata yang meliputi tiga aspek. Yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.⁸² Yang dimaksud dengan atraksi adalah berkaitan erat dengan apa yang disuguhkan, atau apa yang dijual dalam sebuah destinasi. Aspek suguhan inilah sejatinya yang menjadi *core* atau ruh daya tarik, sekaligus menjadi daya magnet sebuah destinasi, apakah atraksi itu mempesona atau tidak, sehingga perlu dikemas dengan sebaik dan semaksimal mungkin oleh para pengelolanya.

Sedangkan yang kedua, yakni aksesibilitas. Yang dimaksud adalah jalan masuk menuju objek, termasuk alat transportasi pendukungnya (udara, laut, dan darat).⁸³ Jika di suatu daerah yang telah terbangun sebuah destinasi wisata halal baru yang menarik dan unik sekalipun, namun jika tidak ditunjang dengan kemudahan jalan masuk yang mamadai, niscaya destinasi itu akan sulit berkembang sesuai harapan. Karena itu untuk mengatasi masalah ini sinergitas antara pemangku kepentingan dengan pihak-pihak yang dianggap menunjang perlu dilakukan, dengan harapan agar akselerasi pengembangan wisata halal benar-benar akan menjadi kenyataan di Indonesia.

Adapun aspek yang ketiga, yakni amenitas. Aspek ini selain berkaitan dengan masalah fasilitas yang memberi atmosfer kenyamanan, juga berkaitan dengan pelayanan yang memadai. Kiranya aspek amenitas ini juga merupakan ruh kekuatan daya tarik sebuah destinasi wisata yang sejatinya tetap harus mendapat perhatian para pengelola secara berkesinambungan. Karena

⁸² Sumber, Wawancara wartawan Metro TV dengan Menteri Pariwisata yang disiarkan oleh Metro TV, 2 Agustus 2017, jam 13.45 WIB.

⁸³ Dalam kaitan dengan aksesibilitas ini negara Vietnam telah membuka jalur penerbangan khusus langsung dari Ho Chi Minh City ke Jakarta yang dibuka mulai Desember 2017. Ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan, khususnya Muslim, ke negeri itu. Lihat, Ahmad Fikri Noor, "Persaingan Maskapai Makin Meriah, dalam *Republika*, edisi 25 Agustus 2017, 5

bagaimanapun pesona objek tidak akan mempunyai nilai yang berarti tanpa diimbangi dengan ketercukupan fasilitas yang dibutuhkan yang disertai pula dengan pelayanan yang prima. Inilah kiranya kiat yang dimaksud oleh Menteri Pariwisata di atas.⁸⁴

Selain ketiga aspek di atas, pendapat lain, dalam hal ini, Carter menegaskan bahwa unsur-unsur penting (sebagai elemen dasar) destinasi pariwisata tidak hanya sebatas *attraction*, *accessibility*, dan *amenity*, namun juga *image*, dan *price*.⁸⁵ Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun citra (*image*) dan harga (*price*) merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing suatu destinasi pariwisata. Runtuhnya citra samahalnya dengan runtuhnya industri pariwisata yang telah dibangun dalam jangka waktu yang lama. Sebab itu bagaimanapun harus senantiasa dipertahankan dan terus dibangun.

Dan dalam hal ini Baloglu menyatakan pendapatnya bahwa pembangunan citra dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni personal, sosial, dan stimulasi.⁸⁶ Pendapat lain menyatakan juga karena situasi makro dalam sebuah negara seperti stabilitas politik, ekonomi, keamanan, wabah penyakit, penguasaan bahasa dan lain sebagainya.⁸⁷ Tanpa kecuali masalah harga juga sangat menentukan sekali, seperti tarif hotel yang terindeks yang sangat vital bagi para wisatawan.⁸⁸ Selain juga dituntut agar hotel-hotel menggunakan standar halal sebagai indikasi adanya kepatuhan terhadap prinsip

⁸⁴ Dalam kaitan dengan ketiga aspek tersebut, baca pula, Rahmat Fajar, "Memfaatkan Potensi Besar Pariwisata Halal," dalam *Republika*, edisi 24 Agustus 2017, 24. Dalam rubrik ini, Riyanto Sofyan, Ketua Tim Percepatan Wisata Halal Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa pengembangan destinasi dan industri halal, seperti atraksi, aksesibilitas, dan amenitas juga merupakan bagian dari pengembangan pariwisata halal yang harus dilakukan. Termasuk peningkatan kapasitas, seperti pengembangan sumber daya manusia, dukungan dari komunitas dan pemangku kepentingan, serta sertifikasi industri.

⁸⁵ Lihat, Hermantoro, *Creative-Based Tourism*, 79

⁸⁶ *Ibid.*, 81

⁸⁷ Thavorn Thitthongkam dan John Walsh, *An Analysis of Factors Influencing the Competitiveness of the Thai Tourism Industry*, 2010 International Conference on Business and Economics Research Vol.1 (2011) @ (2011) IACSIT Press, Kuala Lumpur Malaysia.

⁸⁸ Azhar Harun dan Eko Suprayitno, *The Important Factors of Tourism Development in Singapore*, University of Malaya, Kuala Lumpur Malaysia. Email: azharh@um.edu.my

syariah.⁸⁹ Tentu saja hal ini semua membutuhkan regulasi yang jelas dari pemerintah agar pariwisata halal benar-benar terimplementasi secara nyata dalam dunia industri pariwisata.⁹⁰

Dalam kaitan ini, Mahathir Mohammad, mantan Perdana Menteri Malaysia, mengajukan kiat pula untuk memajukan wisata halal berdasarkan pengamatannya di negaranya sendiri. Karena bagaimanapun pariwisata halal bukan hanya bicara soal penyediaan sarana dan prasarana yang ramah Muslim (*Muslim friendly*). Namun ada beberapa aspek yang harus diperhatikan agar wisata halal di sebuah negara bisa maju dan kompetitif.

Dalam sebuah acara diskusi bertajuk “Peluang & Tantangan Halal Tourism Era Digital,” yang diadakan Ikatan Alumni SMP 5 Doktor Soetomo dan Halal Travel Konsorsium (HTK), di Jakarta, 16 Agustus 2017, Mahathir Mohammad menyimpulkan ada tiga jurus utama yang harus dilakukan untuk memajukan wisata halal.⁹¹

Pertama, menurut Mahathir, mengedepankan dan menjaga nilai-nilai Islami dan kearifan lokal. Jelasnya, “Mengedepankan perilaku atau akhlak yang baik, yaitu baik dalam memberikan pelayanan maupun menciptakan produk wisata,”

Selanjutnya yang kedua, mengadopsi hal-hal yang baik dari sistem dan standar yang didominasi peradaban Barat. “Sebagai contoh pelayanan prima dalam produk pariwisata, dalam mengembangkan program-program *capacity building* untuk meningkatkan pelayanan dan produk wisata, katanya lagi.

Sedangkan kiat yang ketiga, menjalankan konsep dan *market oriented*. Ia mencontohkan, wisatawan dari Barat kemungkinan menginginkan hal-hal yang tidak selaras dengan produk wisata

⁸⁹ Salleh, Nor Zafir Md, et al., *The Practice of Shariah-Compliant Hotel in Malaysia*, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 5 No. 1, February 2014

⁹⁰ Kamarulzaman, Yusniza, et al., *The Acceptance of Islamic Hotel Concept in Malaysia: A Concept Paper*, Departemen of Marketing and Information System Faculty of Business and Accountancy University of Malaya, Phone: 03-73673915, Fax: 03-79673810, E-mail: yusniza@um.edu.my

⁹¹ Irwan Kelana dan Rahmat Fajar, “Tiga Jurus Majukan Wisata Halal.” Dalam *Republika*, edisi 18 Agustus 2017, 16

halal. Menurut Mahathir, hal tersebut tidak perlu dilarang atau dipaksakan. Akan tetapi, mereka harus diberikan fasilitas atau alternatif lain pada produk wisata lainnya yang sesuai dengan wisatawan tersebut.”⁹²

Demikian pula terhadap wisatawan Muslim, produk wisata halal harus juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka dari berbagai negara yang berbeda pula. Antara lain yang terkait dengan ketersediaan hotel dan restoran yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Turis Timur Tengah menurut Mahathir, sangat membutuhkan makanan yang sesuai dengan selera mereka, yakni masakan Timur Tengah seperti Arab, Lebanon, Suriah, dan lainnya. Untuk itu, lanjut Mahathir, jika kita ingin menarik sebanyak mungkin turis dari Timur Tengah, kita harus mendorong restoran-restoran Timur Tengah di negara kita.⁹³

Sejatinya jurus yang dikemukakan Mahathir tersebut secara substansial mengandung titik persamaan dengan jurus yang dikemukakan Arif Yahya sebelum ini. Yang paling pokok adalah ketersediaan fasilitas dan maksimalisasi pelayanan yang penuh keramahan. Jika keduanya terpenuhi, niscaya para turis akan merasakan kepuasan, karena di sana tercipta sebuah atmosfer yang penuh kedamaian, kenyamanan, ketenangan, dan pesona, baik secara lahir maupun batin .

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.



Bagian Ketiga

Pariwisata Halal Kajian Normatif Multidimensi



Bab III

Pariwisata Halal: Perspektif Hukum Islam (*Fiqh*)

A. Pengantar

Sebagaimana kita ketahui, dalam dunia pariwisata akhir-akhir ini banyak dibicarakan dan dikembangkan apa yang namanya wisata halal, sebagai destinasi baru yang membedakannya dengan wisata konvensional yang sudah lama berkembang selama ini. Dikatakan berbeda karena destinasi yang pertama bernuansa agama (*spiritualitas-religiousitas*), sedangkan yang kedua bernuansa sekularistik-materialistik. Atau dengan kata lain, yang pertama bersentuhan dengan ajaran wahyu (langit), sedangkan yang kedua bersentuhan dengan hasil pemikiran manusia (bumi-sains).

Pertanyaan mendasar adalah justru mengapa dalam realitas tidak disebut dengan istilah wisata Islam atau wisata syariah. Kiranya, dalam hal ini dapat dipahami dari dua kemungkinan. Pertama,

penggunaan istilah “halal” nampaknya lebih umum dan lebih populis di kalangan masyarakat luas. Sedangkan yang kedua, jika menggunakan istilah “syariat”, apalagi “Islam”, secara politis kadangkala terseret ke dalam konotasi yang negatif. Terutama oleh kalangan masyarakat Barat yang secara apriori kurang respek terhadap ajaran Islam. Akhir-akhir ini, tidak jarang predikat Islam oleh mereka dikaitkan dengan paham terorisme dan sektarianistik yang dianggap sebagai sumber ajaran kekerasan di berbagai belahan dunia. Padahal tidaklah demikian, karena sejatinya ajaran Islam adalah merupakan *rahmatan lil ‘alamin* bagi seluruh kehidupan di dunia ini.

Dengan demikian, mempersepsikan Islam sebagai sumber malapetaka kekerasan hanyalah bias semata yang seringkali dijadikan komoditas politik global untuk mendeskreditkan umat Islam di dunia internasional. Nampaknya stereotip yang demikian itulah yang terus menjadi sumber kebencian antara dunia Barat yang mayoritas Kristen versus dunia Timur yang mayoritas Islam. Hingga saat ini segala isu yang beraromakan ajaran Islam terus digoreng oleh komunitas yang tak bersimpati sehingga muncul konflik yang berkepanjangan di berbagai peta bumi ini.

Sebab itu bagi siapa pun yang memahami Islam secara *holistic* penggunaan istilah halal, atau syariah, atau bahkan Islam sekali pun, pada hakikatnya adalah sama. Bukankah istilah halal itu merupakan salah satu terma dalam ajaran Islam yang seringkali juga dikorelasikan dengan istilah syariah. Namun demikian penggunaan istilah “halal” dalam aktivitas wisata mengandung pesan teologis, dalam arti, hendaknya segala aktivitas wisata yang dibangun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ajaran yang disyariatkan Islam.

Karena itu Islam melarang segala bentuk perbuatan yang haram hukumnya, tanpa kecuali dalam dunia pariwisata karena akan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan (bahaya-sisi *negative*) daripada kemaslahatan yang akan diperoleh. Kendati secara realitas, tidaklah

semua Muslim menyadari bagaimana efek negatif ini karena praktik wisata yang sekularistik telah menjadi *mindset* di alam pikiran masyarakat global. Sampai akhirnya, menjadi semacam gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat di berbagai belahan dunia.

Karena itu, pada bagian ini, untuk selanjutnya, akan dikemukakan berbagai infrastruktur yang seyogianya steril dari perilaku haram secara syar'i dalam kaitan dengan wisata halal yang sejatinya bertujuan untuk menciptakan *lifestyle* yang berbasiskan syariah di kalangan masyarakat luas. Terutama di kalangan Muslim sebagai implemetasi dari ajaran agama yang dianutnya.

B. Hukum Islam : Gambaran Umum

Hukum Islam adalah salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Di samping sistem hukum lain, seperti hukum adat, hukum Eropa (produk legislasi kolonial) dan sistem hukum yang merupakan produk legislasi nasional dalam berbagai bentuk perundang-undangan dengan segala turunannya yang diberlakukan di kawasan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Tradisi pembentukan hukum Indonesia menunjukkan bahwa keempat bentuk dasar itu tidak pernah diabaikan menjadi sumber materiil pada tiap perumusan konsep hukum baru. Hukum Islam pada awalnya mewakili paham tekstual keagamaan yang hidup dan mengikat masyarakat Islam.²

Sistem hukum yang bersumber, sekaligus yang menjadi bagian dari agama Islam itu berlaku hanya bagi umat Islam karena secara demografis mereka merupakan populasi yang paling banyak jumlahnya, dibanding penganut agama lain di Indonesia.³

¹ Lihat dan bandingkan dengan Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 16

² Ibid.

³ Dalam hitungan kasar, di tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 255-260 juta jiwa. Jika sekiranya pemeluk Islam mencapai rentang antara 87-88 % dari total keseluruhan, maka dapat diperkirakan pula bahwa negeri ini dihuni oleh sekitar 210-220 juta penduduk yang beragama Islam.

Selanjutnya, dalam sistem hukum Islam, dikenal dua istilah yang biasa digunakan, yakni Syariat Islam (*Islamic Law*) dan Fiqih Islam (*Islamic Jurisprudence*). Atau dalam bahasa Indonesia, untuk syariat Islam digunakan istilah hukum syariat, sedangkan untuk fiqih Islam dipergunakan istilah hukum fiqih atau hukum (fiqih) Islam.⁴

Namun demikian di dalam praktik, seringkali, kedua istilah tersebut dirangkum dalam satu istilah hukum Islam saja. Ini disebabkan karena hubungan antara keduanya sangat erat sekali, sekalipun dapat dibedakan, namun tidak mungkin dipisahkan. Syariat merupakan dasar daripada fiqih, sedangkan fiqih adalah ilmu untuk memahami syariat. Keduanya sama-sama mempunyai sumber dalam al-Qur'an, seperti surat al-Jaatsiyah, 45:18 merupakan sumber dari ajaran syariat, sedangkan surat at-Taubah, 9:122 sumber dari ajaran fiqih.⁵

Sebagaimana ghalibnya, dalam sistem hukum Islam, baik dalam pengertian syariat maupun fiqih mengandung dua ajaran pokok, yakni tentang ibadah dan muamalah. Ibadah mengkaji tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan secara vertikal (*habl min al-Allah*) yang tata caranya telah diatur oleh Allah swt sendiri melalui Rasul-Nya. Berkaitan dengan ajaran ibadah ini berlaku asas *fiqhiyyah* yang menyatakan bahwa semua perbuatan ibadah dilarang dilakukan, kecuali ada perintah untuk melakukannya,⁶ sebagaimana tertuang di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Dengan demikian jika hal itu dilakukan maka haram hukumnya.

Sebaliknya tentang muamalah yang membicarakan aktivitas hubungan antarmanusia secara horizontal (*habl min al-nas*), karena biasanya yang diajarkan terbatas yang pokok-pokok saja, maka bersifat terbuka. Artinya banyak ruang atau pintu masuk untuk dilakukan tinjauan ulang sesuai kebutuhan melalui pintu ijtihad

⁴ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 49

⁵ Ibid., 49-50. Dalam kaitan ini, untuk selanjutnya, periksa selengkapnya QS. al-Jaatsiyah, 45:18 dan QS. at-Taubah, 9:122

⁶ Baca, H.M. Ichwan Sam, dkk (tim.penyunting), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Kerja sama DSN-MUI dengan Bank Indonesia, 2003)

atas dasar asas umum yang berlaku bahwa pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali ada perintah yang melarangnya.⁷ Inilah sisi perbedaan dengan perbuatan ibadah yang bersifat tertutup.

Di antara contoh mengenai muamalah itu adalah pengembangan destinasi wisata halal yang saat ini mulai banyak dikembangkan niscaya belum ada ketentuannya secara tegas, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Dengan demikian jika dikaitkan dengan *al-ahkam al-khamsah*, maka termasuk dalam kategori *ja'iz*, (*mubah-ibahah*).⁸ Artinya destinasi wisata halal itu mengandung kebebasan, apakah akan dilakukan atau tidak, sangatlah tergantung kepada siapa pun yang akan melakukannya. Namun demikian, sebagai konsekuensi dari predikat halal itu sendiri, bagaimanapun atmosfer dunia wisata halal tidak selayaknya jika berseberangan dengan ketentuan syariah Islam. Jika berlawanan, maka kata halal itu sendiri tidak akan mempunyai makna apa pun.

C. Tujuan Utama Hukum Islam (Peranan Syariah Islam)

Kehadiran sebuah hukum, baik produk manusia maupun Tuhan (syariat-agama) pasti mempunyai tujuan untuk mengatur kepentingan manusia, baik dalam hubungannya dengan dirinya, orang lain maupun dengan lingkungannya. Atau, untuk menjamin kepastian hukum yang dapat menjamin keamanan, kenyamanan, ketenangan dalam hidup bermasyarakat. Namun demikian perlu dipahami bahwasanya ada sisi perbedaan yang sangat mendasar sekali antara kedua produk itu, di mana hukum hasil rekayasa manusia hanyalah sebatas mengatur perilaku manusia di dunia

⁷ Dalam kaitan ini baca, H. Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), dan baca pula Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*

⁸ *Al-Ahkam al-Khamsah* yang dimaksud adalah penggolongan hukum yang lima yang disebut pula dengan lima kategori hukum yang meliputi *ja'iz* (*mubah-ibahah*), *sunnah*, *makruh*, *wajib* dan *haram*. Dalam hal ini lihat Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1987), 5

semata. Hukum manusia tidak akan mampu menjangkau dan menjelaskan bagaimanakah sejatinya hidup setelah mati di alam fana ini.

Sedangkan hukum Tuhan yang dikenal dengan sebutan syariah, tidak saja menjangkau masalah kehidupan di dunia, namun juga bagaimana sebenarnya kehidupan di akhirat kelak. Islam mengajarkan ada kelanjutan kehidupan setelah kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Bahkan diajarkan pula, bahwa kebahagiaan hidup akhirat yang abadi akan sangat ditentukan oleh perilaku setiap diri manusia selama hidup di dunia. Artinya, secara syar'i, kepatuhan seseorang terhadap ketentuan syariat akan menjadi faktor penentu keselamatan yang bersangkutan kelak di akhirat. Itulah ajaran Islam kepada umat manusia secara universal.

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, baik individu maupun sosial. Atau, kemaslahatan yang tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, namun juga untuk kehidupan akhirat kelak.⁹ Dalam kaitan ini, Abu Ishak al-Shatibi (m.d. 790/1388) telah merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang pada akhirnya disepakati oleh ilmuwan hukum Islam yang lainnya.¹⁰

Para ulama salaf dan khalaf tidak pernah bersilang pendapat, bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*'illah*) dan juga tujuan (*maqashid*) pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia¹¹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah sebagaimana yang dikutip Jasser Audah, menyatakan bahwa syariah adalah suatu hikmah dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang dalam kehidupan di dunia dan akhirat.¹²

⁹ Mohammad Daud, *Hukum Islam*, 61

¹⁰ Ibid.

¹¹ Fauzia Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), 44

¹² Ibid.

Namun demikian perlu dipahami bahwa kemaslahatan yang diharapkan dalam Islam, tidaklah sebatas untuk individu atau komunitas tertentu, namun untuk seluruh umat manusia secara universal, kapan pun dan di mana pun saja. Inilah sejatinya yang dimaksudkan bahwa ajaran Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin* bagi seisi alam kehidupan.

Atau, jika dikaitkan dengan wisata halal yang perlu mendapat perlindungan adalah para wisatawan agar mereka merasa aman, nyaman, dan tenang dalam menikmati wisata. Tidaklah sebatas yang beragama Islam saja, namun apa pun agama, etnis, kebangsaan maupun status sosial mereka tetap memiliki hak untuk mendapat sentuhan rahmat atau perlindungan yang sama. Sehingga dengan demikian, kemaslahatan yang dicita-citakan dalam syariat Islam adalah kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Ini menunjukkan bahwa doktrin syariah merupakan akumulasi dari aspek keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan.¹³ Apabila elemen-elemen dasar ini tidak hadir dan terakomodir, maka berkecenderungan kemaslahatan yang diidealkan tidak akan pernah terwujud. Baik dalam diri seseorang maupun umat manusia secara keseluruhan yang pada akhirnya akan mencederai ajaran Islam itu sendiri sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Atau, untuk lebih jelasnya lagi, peranan, sekaligus tujuan syariah Islam adalah untuk pemeliharaan dan pengayoman umat manusia dalam kehidupannya. Menjauhkan mereka dari segala perbuatan yang terlarang menurut syariah.¹⁴ Tentu saja ajaran semacam ini harus terimplikasi di dalam dunia wisata yang berlabel halal, sebagai indikasi bahwa pariwisata halal benar-benar telah mencerminkan apa yang disyariatkan dalam ajaran Islam

¹³ Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Law: A Systems Approach*, dalam Ibid., 44

¹⁴ Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, 89

D. Ciri-ciri / Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam, baik dalam pengertian syariat maupun fiqh secara umum dapat dipetakan ke dalam dua bagian, yakni tentang ibadah dan muamalah. Bagian yang pertama berkaitan dengan hubungan manusia (makhluk) dengan Tuhan (Khalik-Pencipta-*Great Creator*) yang bersifat vertikal yang dikenal dengan ibadah *mahdhah* (murni ibadah-*pure*). Antara lain tentang shalat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, yakni muamalah, berisikan ketentuan-ketentuan syariat yang mengatur hubungan antarmanusia secara horizontal dalam segala aspek kehidupan, seperti masalah perkawinan, ekonomi dalam segala bentuk dan macamnya, politik, dan lain sebagainya. Di antara kedua ranah ini, tentu wisata halal merupakan kawasan dari kajian muamalah yang mengatur hubungan antarmanusia dalam masalah aktivitas keduniawian (profan).

Ciri mendasar yang membedakan hukum Islam dengan hukum modern adalah tentang sumber yang menjadi dasar ketentuannya. Hukum Islam sudah pasti bersumber pokok dari ajaran wahyu, baik al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan hukum modern merupakan produk sains (imajinasi/akal manusia) yang tidak jarang membuka ruang ijtihad (*debatable*) sejalan dengan situasi dan kondisi yang sedemikian dinamis sesuai tempat dan perubahan zaman.

Pada zaman dulu, bisa jadi orang melakukan wisata makruh hukumnya, karena dianggap kurang manfaatnya. Terlebih lagi jika destinasi yang dikunjungi banyak praktik perbuatan yang kontra produksi dengan syariat Islam, maka bukanlah tidak mungkin haram untuk dikunjungi. Sebab itu untuk mencari solusi, sekaligus memberi alternatif kepada masyarakat agar terhindari dari yang haram akhirnya dikembangkanlah destinasi wisata baru yang sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk itu, paling tidak secara fiki, menurut hemat penulis, hukum wisata halal adalah mubah, artinya boleh dilakukan. Hal

ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa hukum asal melakukan muamalah apa pun adalah boleh, terkecuali jika ada dalil yang melarangnya.

Adapun karakteristik hukum Islam sebagai pembeda dari hukum modern, secara lebih rinci dapat dikemukakan sebagai berikut,¹⁵ yakni (1) merupakan bagian dari agama Islam; (2) mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan akhlak Islam; (3) mempunyai dua istilah kunci, yakni syariat dan fiqih; (4) meliputi dua bidang utama, yakni ibadah dan muamalah; (5) strukturnya berlapis yang meliputi: a) nas atau teks al-Qur'an, b) Sunnah, c) hasil ijtihad yang memenuhi syarat, d) pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim maupun yang berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqih); (6) mendahulukan kewajiban daripada hak, mengedepankan amal daripada pahala; (7) meliputi: a) hukum *taklifi* (*al-ahkam al-khamsah*), yakni Jaiz, sunnah, makruh, wajib dan haram,¹⁶ dan b) hukum *wadh'i* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.¹⁷

Namun demikian, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam sebuah karyanya Falsafah Hukum Islam, menyempurnakan ketujuh ciri tersebut menjadi sepuluh, yakni (8) berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam di mana pun mereka berada, dalam arti tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau suatu masa tertentu saja; (9) menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan

¹⁵ Mohammad Daud, *Hukum Islam*, 58-59

¹⁶ Dalam kaitan dengan *ahkamul khamsah* ini lihat dan bandingkan dengan H. Amir Syarifuddin dalam sebuah karyanya *Ushul Fiqh* dalam sebuah topik bahasannya tentang pembagian hukum syara'. Ia membagi hukum syara' itu ke dalam hukum wajib, mandub, haram, karahah, mubah, rukhshah dan 'azimah. Dengan demikian di samping hukum yang lima masih ada hukum lagi yakni rukhshah dan 'azimah. Lihat H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 336-380

¹⁷ Titah Allah yang berkaitan dengan hukum-hukum *taklifi* disebut hukum *wadh'i*. Hukum *wadh'i* ini tidak harus berhubungan dengan tingkah laku manusia, namun bisa berbentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang dinamakan hukum *taklifi*. Baik hubungan itu dalam bentuk sebab dan yang diberi sebab, atau syarat yang diberi syarat atau penghalang dan yang dikenakan halangan. Dengan demikian, hukum *wadh'i* itu ada tiga macam, yakni *sabab* (sebab), syarat, dan *mani'*. Lihat dalam *ibid.*, 394

raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan; dan (10) pelaksanaannya dalam praktik dikendalikan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam.¹⁸

Untuk itu jika pendapat Ash-Shiddieqy dikaitkan dengan aktivitas kepariwisataan, hendaknya destinasi wisata halal yang dibangun harus mengedepankan harga diri (*muruah*) kemanusiaan, tidak bersikap diskriminatif dengan alasan yang tidak jelas, memperlakukan wisatawan bukanlah karena status sosialnya, namun semata karena martabat kemanusiaannya secara hakiki. Menyediakan infrastruktur yang layak dan aman, kiranya juga merupakan bagian dari menghargai hak-hak kemanusiaan yang universal. Selalu melindungi keselamatan dalam bentuk dan sekecil apa pun bagi wisatawan agar mereka merasa aman (*safety*), nyaman dan tenang dalam menikmati wisata.¹⁹

Hal itu akan tercipta jika nilai-nilai etika menjadi panduannya dan rasa keimanan menjadi pengendali para palakunya. Bukankah hukum Islam itu sangat mengedepankan hak asasi manusia, hak-hak dasar yang wajib ditunaikan kepada pemiliknya secara adil sesuai dengan ketentuan Islam yang bersandar pada ajaran wahyu (*teosentris*).

Sebab itu, jika semuanya itu mendapatkan perhatian (atensi) dan diaplikasikan dengan sepenuh hati secara bersama-sama, niscaya apa yang disebut dengan atmosfer *muslim friendly tourism* akan terwujud di dunia wisata halal yang berbasiskan syariah Islam. Betapa indahnya ajaran Islam, jika para pelakunya secara konsisten bertekad mengimplemantasikannya ke dalam atmosfer dunia wisata secara komprehensif.

¹⁸ Lihat, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, 59

¹⁹ Dalam kaitan ini dalam kaidah-kaidah fiqih diajarkan, antara lain: “menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat,” dan “kemudharatan (harus) dihilangkan,” Lihat, H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 11. Dalam sebuah hadits, riwayat al-Hakim, ditegaskan, “Janganlah memudaratkan dan jangan dimudaratkan,” Lihat Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qwa'id al-Fiqhiyah* (Beirut: Daar al-Qalam, 1420H), 288

E. *Al-Ahkam al-Khamsah* : Posisi Hukum Wisata Halal

Yang dimaksud dengan *al-ahkam al-khamsah* yang dalam Indonesianya dikenal dengan *ahkamul khamsah* (hukum *taklifi*) adalah lima kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam.²⁰ Dikatakan *taklifi* karena kelima hukum inilah yang dibebankan kepada manusia selaku makhluk hidup yang berakal secara sempurna. Dengan kemampuan akal yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, pada akhirnya memiliki kemampuan untuk membedakan (*tamyiz*) mana yang boleh dikerjakan, atau sebaliknya mana yang wajib ditinggalkan.

Selanjutnya dalam kaitan dengan dunia pariwisata misalnya, manakah destinasi wisata yang boleh dikunjungi dengan alasan karena tidak mengandung unsur-unsur yang berseberangan dengan ketentuan syariah. Atau, sebaliknya justru destinasi wisata yang boleh dikunjungi karena di dalamnya ada hikmah atau nilai-nilai yang membawa pada kemaslahatan bagi kehidupan. Apabila dilkaji dari perspektif fiqih, maka niscaya destinasi wisata halal-lah yang boleh dijadikan objek para wisatawan Muslim.

Di dalam sistem hukum Islam, *ahkamul khamsah* itu meliputi wajib, sunnah, jaiz (mubah), makruh dan haram. Sejatinya *ahkamul khamsah* inilah yang membedakannya dengan produk hukum manusia yang hanya berkisar pada komitmen hitam dan putih, Hitam dalam arti dilarang dilakukan, sedangkan putih berarti boleh dilakukan dan bebas dari sanksi terhadap pelakunya.

F. Hukum Islam dan Perkembangan Kepariwisata

Kehadiran hukum dalam kehidupan sosial tentu saja merupakan sebuah keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat luas. Tanpa adanya hukum yang jelas, niscaya akan terjadi anomali yang menimbulkan ketidakjelasan dalam kehidupan. Dampaknya, selain memunculkan kedaliman yang bisa

²⁰ Mohammad Daud, *Hukum Islam*, 145

jadi dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, namun di sisi lain akan menyuburkan rasa ragu atau was-was di kalangan masyarakat banyak.

Untuk itu, bagaimanapun fungsi hukum dalam segala bentuk dan turunannya merupakan rambu-rambu dalam beraktivitas, mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang. Demikian pula dalam kaitan dengan aktivitas dunia pariwisata, di mana aktivitas wisata halal merupakan bagian di dalamnya.²¹

Dalam kehidupan ini masyarakat tanpa kecuali harus menaati dua macam hukum secara bersamaan. Dalam kapasitasnya sebagai warga negara, mereka wajib taat terhadap hukum negara di mana mereka hidup. Demikian pula dalam kapasitasnya sebagai pemeluk sebuah agama, katakan saja sebagai Muslim, mereka wajib taat terhadap ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku. Pemberlakuan kedua hukum itu, tanpa kecuali, berlaku bagi penguasa, para pengusaha, maupun masyarakat pendukung wisata. Karena pada prinsipnya mereka adalah sama di muka hukum, dalam arti, tidak ada diskriminasi antara yang satu dengan yang lain.

Perlu dipahami, tidak jarang perkembangan hukum kalah cepat dengan dinamika sosial kemasyarakatan sehingga tidak jarang terjadi kevakuman hukum di tengah masyarakat tentang sebuah objek hukum. Kendati dikatakan bahwa fungsi hukum antara lain adalah sebagai instrumen merekayasa sosial masyarakat (*social engineering*), tetapi di sisi lain hukum juga harus peka terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

Pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah apakah hukum (peraturan perundangan) yang berkaitan dengan masalah wisata halal telah tersedia. Sementara perkembangan industri wisata berdasarkan prinsip syariah saat ini mulai menarik perhatian para wisatawan Muslim di berbagai kawasan, sehingga perlu dikelola secara sungguh-sungguh dan profesional. Oleh karena itu dengan

²¹ Lihat, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, N0. 108/DSN-MUI/108/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

mencermati fenomena yang terus berkembang saat ini, baik di tingkat lokal maupun global, yang menjadikan destinasi *halal tourism* sebagai alternatif baru oleh komunitas Muslim untuk berwisata sehingga perlu digali landasan yuridisnya dalam perspektif Islam.

Sejatinya di tahun 2016 telah lahir sebuah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang menjadi landasan standarisasi aspek –aspek wisata halal. Namun nampaknya fatwa ini masih belum final dan masih butuh penyempurnaan sehingga ke depan masih diperlukan produk ijihad baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Tentu saja ijihad baru tersebut sejalan dengan perkembangan wisata halal itu sendiri untuk menjamin kepastian hukum dunia kepariwisataan. Secara bahasa, ijihad berarti sungguh-sungguh, mencurahkan pikiran, menghabiskan kesanggupan. Sedangkan secara istilah diartikan dengan mencurahkan kesanggupan yang ada dalam membahas suatu masalah untuk mendapatkan suatu hukum yang sulit bertitik tolak kepada Kitab dan Sunnah.²² Atau, dengan kata lain, ijihad adalah merupakan usaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang pengaturannya tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum Islam.²³

Dalam hukum Islam dikenal beberapa metode untuk melakukan ijihad, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif sebagaimana yang dilakukan oleh DSN-MUI. Di antara metode dimaksud adalah *ijmak*, *qiyas*, *istidal*, *al-masalih al-mursalah* (*maslahat mursalah*), *istihsan*, *istishab*, dan *'urf*.²⁴

Jika sekiranya ke depan, wisata halal yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan Muslim agar tidak hanya mengunjungi wisata konvensional, maka dengan demikian, dasar pertimbangannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan

²² Mohammad Daud, *Hukum Islam*, 38

²³ Ibid., 112

²⁴ Ibid., 119-120

umum. Untuk itu, metode ijtihad yang dapat digunakan adalah masalah mursalah.²⁵

Karena itu, dengan adanya wisata halal, maka diharapkan para wisatawan Muslim, dalam memenuhi kebutuhan rekreasinya, tidak terjebak ke dalam destinasi wisata yang seringkali kontroversi dengan prinsip-prinsip syariah. Inilah yang dimaksudkan perlu adanya produk hukum baru dalam dunia kepariwisataan agar kemaslahatan masyarakat bisa terwujud. Karena bagaimanapun hukum harus memenuhi perkembangan dunia kepariwisataan seperti wisata halal yang mulai banyak diminati.

G. Objek dan Infrastruktur

1. Objek Wisata : Destinasi (Sasaran Kunjungan)

Dalam kaitan dengan objek wisata, sebagaimana telah sering disinggung sebelum ini, secara realitas sangat variatif sekali, baik yang berupa alam dengan segala bentuk dan jenisnya. Alam yang indah dan penuh pesona yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi adalah merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, sekaligus sebagai amanah yang wajib diperlihara ekosistemnya. Jika tidak, sama halnya manusia berbuat mungkar yang tidak jarang dampaknya akan terkena pada manusia sendiri.

Alam jagad raya yang membentang di planet bumi ini banyak sekali ragamnya yang apabila dieksplorasi akan mempunyai nilai tambah yang dapat memberi kesejahteraan kepada umat manusia. Kekayaan alam itu, antara lain dapat berupa alam pegunungan, lautan, fauna, flora, budaya dan lain sebagainya. Semua ini jika dikelola secara baik dan profesional akan menjadi destinasi wisata yang sangat menarik bagi wisatawan. Bahkan masing-masing kekayaan alam itu mempunyai keunikannya sendiri yang kadangkala

²⁵ Maslahat mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya, baik di dalam al-Qur'an maupun Hadits. Lihat. dan bandingkan dengan Ibid., 121

tidak sama, antara kawasan yang satu dengan kawasan yang lain, antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Itulah salah satu panorama yang perlu ditangkap makna teologisnya, bahwa keberagaman isi alam yang unik dengan sejuta pesonanya menunjukkan betapa Kemaha Besar Tuhan semesta alam yang wajib disyukuri oleh manusia. Sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan itu Indah dan mencintai keindahan. Demikian Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka banyak mengambil *ibrah* (pelajaran) dalam mengarungi kehidupan. Artinya, hamparan alam yang dianugerahi Tuhan, tidaklah sia-sia,²⁶ karena banyak hikmah yang dapat dipetik dan memberi banyak inspirasi bagi siapa pun yang mau berpikir dengan sungguh-sungguh.

Akan tetapi perlu disadari bahwasanya objek wisata itu tidak tunggal, namun jamak, dalam arti sangat bervariasi, terlebih lagi di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Katakan saja wisata peninggalan sejarah, budaya, atau bahkan objek hasil teknologi baru yang kesemuanya itu sah-sah saja untuk dikunjungi selama tidak ada sesuatu pun yang kontra produksi dengan ketentuan syariat.

Serlanjutnya, untuk lebih jelasnya, objek wisata itu secara garis besar dapat dipetakan menjadi beberapa basis (kategori), yakni yang berbasis **alam** (kreasi Tuhan sebagai Pencipta alam), **budaya** (hasil karsa, rasa, dan cipta manusia), **teknologi** (produk pikir, imajinasi, sains), **religi** yang erat hubungannya dengan kehidupan agama (ketuhanan), **sejarah** (produk peristiwa masa lampau, yang mengandung banyak pesan historis bagi generasi setelahnya). Demikian pula destinasi wisata **perdesaan** yang menampilkan keunikan atau ikon spesifik sebuah kawasan di daerah tertentu. Namun demikian, akhir-akhir ini mulai muncul wisata berbasis **pendidikan**, sebagaimana yang dikembangkan di Mataram Lombok

²⁶ Dalam hal ini, lihat QS., Ali'Imran,3:191 yang pada perinsipnya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada ini tidaklah sia-sia, tanpa kecuali dalam hal penciptaan alam semesta ini.

untuk mendukung pengembangan wisata halal di Pulau Seribu Masjid tersebut.

Bahkan lebih jauh, sesuai perkembangan zaman, saat ini wisata itu dikaitkan dengan *event-event* tertentu. Seperti *Islamic Book Fair*, yakni sebuah acara yang dalam jangka waktu tertentu dilakukan pameran terbitan buku-buku Islam yang mengundang banyak pengunjung. Di samping itu wisata belanja yang terkonsentrasi di beberapa *mall* (supermarket dan hypermarket) di berbagai kota besar yang merupakan fenomena baru, terutama bagi masyarakat perkotaan (urban). Mereka lebih suka berbelanja ke pasar-pasar swalayan besar daripada ke pasar-pasar tradisional dengan alasan *berlanja (shopping)* sambil rekreasi.

Contoh lain adalah wisata kuliner yang saat ini banyak tumbuh dan berkembang yang telah memacu berkembangnya ekonomi kreatif di berbagai daerah.²⁷ Wisata basis ini saat ini banyak diminati oleh masyarakat luas lintas status sosial karena dianggap relatif masih baru sebagai produk kreatifitas yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh dalam hal ini antara lain produk jenis makanan Bebek Sinjay di daerah Burneh Bangkalan Madura yang sedemikian banyak diminati oleh pembeli dari berbagai daerah bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Madura. Dalam kapasitasnya sebagai jenis kuliner yang berbahan baku bebek ini sudah sedemikian dikenal, dan nampaknya usaha makanan ini saat ini mulai membuka cabang di berbagai kota, khususnya di kawasan Jawa Timur, seperti Surabaya, Pandaan dan Malang.

Di samping itu, makanan khas daerah Madura ini yang sudah melegenda antara lain adalah soto dan sate yang dianggap khas. Selain itu, Sate Lala' di Pamekasan, Kripik Tanggug, Kripik Tette, Rengginang Lorju,' Nasi Serpang di Bangkalan, Kikil Kacangijo di Sampang, Rujak Sabrang dan Jubadha di Sumenep. Jenis kuliner ini kiranya sama terkenalanya dengan kuliner di beberapa daerah

²⁷ Dalam kaitan dengan ekonomi kreatif ini silakan baca Maulel Moelyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan dan Kebutuhan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010). Baca pula, Yusak Anshori dan Dewa Gde Satrya, *Pariwisata Dengan Huruf L* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)

di kawasan Jawa Tmur. Seperti Wingko Babat di Babat, Tahu Campur dan Soto di Lamongan, Pudak dan Otag-otag Bandeng di Gresik, Bandeng Asap Sidoarjo, Sate Kerang dan Kupang Lontong di Pasuruan, Brem dan Pecel Pincuk di Madiun, Swar-Swir di Jember, Pecel Tumpang di Malang, Kripik dan Jenang Apel di Batu, dan masih banyak lagi.

Selain beragam kuliner di atas, tentu masih banyak macam pula produk ekonomi kreatif masa lalu, sekaligus juga mencerminkan kekhasan sebagai makanan daerah, seperti produk Tempe di Sanan Malang dengan beragam turunan produknya. Produk Tahu di Kediri yang sudah lama dikenal kalangan luas di tanah air sehingga Kediri akhirnya dikenal dengan sebutan Kota Tahu. Geplak, Bakpia, Gudeg, Ayam Goreng Suharti di Yogyakarta dengan destinasi Malioboronya. Kerak Telor Betawi dan Nasi Uduk di Jakarta. Serabi, Srundeng Kelapa, Kerak Goreng, Sego Liwet, dan Tengkleng Kambing di Solo Jawa Tengah.²⁸ Demikian pula jenis makanan Dodol di Garut, Asinan Bogor di Bogor. Di luar Jawa dikenal jenis kuliner Ayam dan Kangkung Taliwang di Lombok, berbagai jenis makanan laut di Bali, dan Coto Makasar di Sulawesi.²⁹ Demikian juga makanan Rendang sebagai menu khas masakan Padang yang sudah sedemikian terkenal, tidak saja di tanah air, bahkan juga di mancanegara. Karena itu makanan ini telah dipatenkan sebagai khazanah kekayaan kuliner Nusantara.

Khusus untuk kuliner Surabaya sebagai kota kedua terbesar di Indonesia, antara lain dikenal jenis makanan seperti Rujak Cingur, Lontong Balap dan Tahu Tek. Makanan khas Surabaya ini telah banyak dikenal karena salah satu bahannya mengandung petis, sehingga makanan tersebut telah meregional sehingga secara tidak langsung telah menjadi ikon Jawa Timur.³⁰

²⁸ Dalam kaitan ini, silakan baca Anonim, *Petunjuk Pariwisata Jawa Tengah & DIY* (Yogyakarta: PT Purimedia Wisataria, 1992)

²⁹ Lihat kembali Yusak Anshori dan Dewa Gde Satrya, *Pariwisata*, 139

³⁰ Ibid., 140

Khusus untuk wisata kategori alam, banyak objek yang dapat dijadikan sasaran kunjungan, seperti pegunungan, air terjun, air panas, bendungan, gua, pantai, danau, tebing, hutan, binatang dan masih banyak lainnya lagi. Semuanya ini banyak ditemui di berbagai belahan bumi di dunia dengan keunikannya sendiri yang menunjukkan betapa kaya dan luas kreatifitas Tuhan untuk memberi rahmat dan nikmat kepada makhluk ciptaan-Nya.

Tidak demikian dengan destinasi wisata yang berbasis budaya seperti Sekaten di Yogyakarta. *Event* tahunan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan peristiwa kelahiran Nabi Besar Muhammad saw ini merupakan sebuah produk budaya Jawa yang telah berasimilasi (berdialog-berakulturisasi) dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai sebuah hasil pergulatan budaya lokal (Jawa) dengan nilai-nilai Islam yang universal akhirnya tereskspresi dan mempersonifikasi dalam bentuk aktivitas budaya yang sedemikian unik yang dikenal dengan acara Sekatenan yang sedemikian banyak menyedot banyak pengunjung, baik domestik maupun mancanegara. Sampai akhirnya acara ini dikemas sebagai *event* budaya rutin setiap tahun sekali di Yogyakarta.

Namun demikian, akhir-akhir ini muncul event budaya baru yang digalakkan oleh beberapa pemerintah daerah, seperti Karnaval Beas Perelek di Purwakarta Jawa Barat, Banyuwangi Ethno Carnival, Jember Fashion Carnival, dan kiranya masih banyak lagi di Nusantara ini. Khusus untuk Jember Fashion Carnival (JFC), adalah merupakan event tahunan yang telah mendunia yang telah mengangkat nama Jember ke tingkat internasional, dan untuk tahun 2017 telah mempersembahkan tiga kategori, yakni *kids carnival*, *artwear carnival*, dan *grand carnava*.³¹ Bahkan khusus untuk event ke-16, tahun 2017 mengangkat tema *Victory Unity in Diversity*.³²

Contoh lain, objek sejarah, seperti tradisi wajib tahunan masyarakat Baduy yang dikenal dengan Gelaran Seba Baduy. Yakni

³¹ "Ajak Daerah Tetangga Meriahkan JFC," dalam Jawa Pos, edisi 10 Agustus 2017, 10

³² "Jember Fashion Carnival," dalam Kompas, edisi 10 Agustus 2017, 23

sebuah tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun, di mana mereka berjalan kaki puluhan kilometer dengan membawa hasil tani untuk dihadiahkan oleh Jaro Baduy, tokoh adat kepada kepala daerah Propinsi Banten.³³ Pemberian hadiah hasil tani kepada penguasa Banten ini merupakan produk kearifan lokal yang kiranya sangat menarik menjadi destinasi wisata halal tahunan selama tidak ada unsur melawan hukum sebagaimana tradisi Sekatenan di Yogyakarta.

Adapun destinasi wisata lain yang berbasis teknologi adalah merupakan sebuah destinasi yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi yang tidak jarang pula banyak menyerap para wisatawan. Seperti menara Eiffel di Perancis yang pada akhirnya menjadi ikon negara ini. Demikian juga menara kembar di Malaysia yang dapat dikatakan relatif baru merupakan dua pencakar langit yang akhirnya menjadi ikon wisata dan menjadi kebanggaan negeri jiran itu. Atau contoh lain seperti Batu Night Spektakuler di Kota Batu Jawa Timur adalah merupakan destinasi baru yang menampilkan wisata berbasis hasil rekayasa teknologi.

Sedangkan yang berbasis religi, kiranya banyak contoh yang dapat dikemukakan seperti makam para tokoh agama yang melegenda di tengah masyarakat. Makam para Walisanga adalah contoh yang berbasis agama, samahalnya dengan wisata gunung Uhud di Arab Saudi yang menampilkan sebuah kawasan di mana para syuhada perang Uhud di era Rasulullah saw gugur dalam membela agama Allah Swt. Di antara para syuhada itu yang terkenal adalah Hamzah bin Abdul Muthalib ra, paman Rasulullah saw yang karena kecintaannya kepada agama, sehingga beliau ikhlas meregang nyawa.³⁴

³³ "Seba Baduy 2017," dalam *Republika*, edisi 29 April 2017, 11. Selanjutnya lihat pula, "Seba Baduy," dalam *Republika*, edisi 30 April 2017

³⁴ "Cinta Agama Meski Nyawa Taruhannya," dalam *Republika*, edisi 30 April 2017, 21. Dalam kaitan dengan wisata religi (sekalius sejarah) ini baca pula I. Rofi'ie Ariniro, *Panduan Wisata Religi Ziarah Wali Sanga* (Yogyakarta: Saufa, 2016) dan Zen Abdurrahman, *Wisata Sejarah Bersama Al-Qur'an* (Yogyakarta: Diva Press, 2012)

Kiranya tidak kalah menariknya jika makam Syaikh Yusuf al-Makassary di Afrika Selatan dijadikan sebagai khazanah destinasi wisata halal transnasional. Bukankah ia adalah seorang ulama, namun karena kegigihannya melawan penjajah di tanah air Indonesia, akhirnya diasingkan oleh kolonial Belanda ke Afrika Selatan. Sampai akhirnya ia meninggal dan dimakamkan di tempat pengasingannya sehingga namanya hingga saat ini tetap harum bagi bangsa Indonesia, karena dari beliau selama hidup banyak dipetik pelajaran bagi generasi muda di Indonesia.

Demikian pula makam Syaikhona Cholil di Bangkalan, Makam Batuampar di Pamekasan, dan makam Syaikh Yusuf di Pulau Telango Sumenep Madura tidak sedikit para wisatawan Muslim yang menjadikan objek-objek tersebut sebagai sasaran wisata, sekaligus sebagai bagian ibadah bagi mereka. Bahkan saat ini muncul fenomena baru, makam KH Abdurrahman Wahid di Jombang, mantan Presiden Republik Indonesia dan mantan Ketua PB Nahdlatul Ulama yang akrab disapa dengan Gus Dur, oleh masyarakat, terutama pengagumnya, dijadikan destinasi wisata ziarah baru yang konon dipersepsikan sebagai makam wali yang ke sembilan.

Selanjutnya destinasi wisata yang berbasis sejarah, antara lain dalam bentuk masjid-masjid kuno, di samping mengandung nilai religi juga memuat nilai historis di masa lalu. Khusus untuk masjid yang mengandung sejarah, katakan saja, Masjid Demak di Kabupaten Demak Jawa Tengah, Masjid Sunan Ampel di Surabaya, Masjid Jamik dan Sabilillah di Kota Malang, Masjid Jamik Kota Sumenep yang keempat masjid terakhir ini berlokasi di Jawa Timur.

Di Jakarta (dulu Batavia dan Sunda Kelapa) dikenal beberapa masjid bersejarah seperti Masjid Jami' Al-Atiq Kampung Melayu Besar, Masjid Jami' An-Nawier Pekojan, dan Masjid Al-Anwar Muara Angke. Ketiga tempat ibadah bagi umat Islam tidak kalah menariknya untuk dijadikan destinasi yang menunjukkan bahwa ibu

kota Indonesia ini sejatinya sejak dulu, secara historis, telah dihuni oleh sebagian besar penganut Islam dari kalangan etnis Betawi.³⁵

Atau, di era modern saat ini bermunculan masjid-masjid baru, seperti Masjid Kubah Emas di Depok Jawa Barat. Demikian pula Masjid Akbar Surabaya (MAS) yang saat ini menjadi kebanggaan masyarakat Islam Jawa Timur, khususnya Muslim Surabaya, tidak kalah daya tariknya sebagai khazanah baru destinasi wisata halal Kota Surabaya. Melengkapi daya tarik masjid Sunan Ampel yang telah lama berdiri yang banyak menyimpan nilai-nilai historis dalam kaitannya kisah Sunan Walisongo sebagai garda pensyiar Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Tentu saja selain itu masih banyak lagi.

Kiranya destinasi wisata yang berbasis sejarah itu dapat pula dikemukakan contoh lain dalam bentuk makam, yakni makam Raden Ajeng Kartini yang telah dinobatkan sebagai salah seorang Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 108 Tahun 1964 Tanggal 2 Mei 1964. Makam ini, menurut Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa akan ditetapkan sebagai tujuan wisata ziarah nasional, antara lain karena status Kartini sebagai pahlawan nasional karena jasanya yang dianggap telah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan Indonesia di bidang pendidikan³⁶.

Menurut Khofifah, Kartini telah bertekad menjadi Muslimah yang baik sebagai mana bunyi surat al-Baqarah ayat 193, *Minazh zhulumaati ilan nuur* (dari gelap menuju cahaya).³⁷ Kutipan itu kiranya terpatril dalam buku Kartini yang terkenal, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, yang berisi kumpulan surat Kartini kepada rekan-rekannya di Belanda.

³⁵ Baca, Abdul Baqir Zein, "Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia," dalam *Republika*, edisi 30 April 2017, 13

³⁶ "Makam RA Kartini Jadi Tujuan Wisata Ziarah Nasional," dalam *Republika*, edisi 22 April 2017, 11

³⁷ Ibid.

Selanjutnya Khofifah menyatakan, “Saya melihat bahwa sosok spiritualitas Kartini ini tidak banyak muncul. Kita bisa menempatkan referensi Islam *rahmatan lil ‘alamin*, yang penuh damai, penuh kasih. Islam yang memberikan ruang untuk membangun toleransi dan moderasi bagi kita di tengah keragaman dan keberagaman negeri ini.”³⁸

Dikatakan pula, semasa hidupnya, Kartini pernah menuntut ilmu agama dari seorang ulama Semarang bernama Kiai Sholeh Darat, seorang guru pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari, dan guru pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dhalan.³⁹ Sebab itu dilihat dari jejak hidupnya, maka Kartini patut menjadi salah satu destinasi wisata halal tingkat nasional di negeri ini.

Untuk lebih meyakinkan bahwa Kartini adalah seorang Muslimah yang santriyati yang selama ini belum banyak terkuak, ditegaskan dalam sebuah wacana yang menyatakan bahwa “Kartini dilahirkan dari keluarga religious dan mawarisi darah ulama dari jalur sang ibu, yakni Ngasirah.”⁴⁰ Bahkan dalam wacana yang lain lebih tegas lagi dinyatakan bahwa “Dalam dimensi kesetaraan jender, itulah sisi yang selama ini dikumandangkan ketika berbicara tentang RA Kartini. Sementara itu, jejak perjalanannya tidak lepas dari sisi kemanusiaan, bahkan spiritualitas yang menyatu dalam diri Kartini.”⁴¹

Karena itu dengan melihat bagaimana kiprah Kartini yang santri dalam mengangkat derajat perempuan Indonesia, kiranya tidaklah ada salahnya jika kita menjadikan pusaranya sebagai salah satu objek wisata halal di negeri ini. Ini dimaksudkan agar wisatawan yang berkunjung ke sana akan menarik hikmah dengan mengingat bagaimana jasa Kartini untuk Indonesia yang patut menjadi uswah bagi para generasi muda. Sebagaimana jasa para pejuang dan ulama

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid.

⁴⁰ “Jalan Terjal Memaknai Agama,” dalam *Republika*, edisi Ahad 22 April 2017, 15

⁴¹ “Nilai Spiritualitas Kartini,” dalam *Republika*, edisi 27 April 2017, 5

Islam lainnya, sebagaimana telah disebut di atas, dengan tidak menafikan jasa dari para pejuang dari agama yang lain.

Semua objek wisata di atas, kiranya layak dikembangkan menjadi destinasi wisata halal selama tidak ada indikasi yang bertentangan dengan hukum syariat. Terkecuali jika ada pesta budaya yang mempertontonkan perilaku maksiat, katakan saja memamerkan aurat yang jelas haram hukumnya dilihat oleh yang bukan muhrimnya, rasanya acara semacam itu tidak layak lagi menjadi destinasi wisata yang sejatinya memelihara kehalalan menurut syariat.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan destinasi ini akan dikemukakan beberapa ketentuan berikut. **Pertama**, destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk: mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan umum; pencerahan, penyegaran dan penenangan; memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan; dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. **Kedua**, destinasi wisata wajib memiliki: fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah. Sedangkan yang **ketiga**, destinasi wajib terhindar dari: kemusyrikan dan khurafat; maksiat, zina, pornografi, minuman keras, narkoba dan judi, pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴²

Itulah beberapa ketentuan fikih yang telah dirumuskan melalui ijtihad yang dilakukan Dewan Syariah Nasional di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini adalah lembaga yang telah memiliki otoritas berkaitan dengan penetapan hukum syariah di Indonesia yang patut dijadikan pedoman oleh masyarakat secara luas.

⁴² Lihat kembali, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, N0.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

2. Perhotelan : Infrastruktur Akomodasi

Dunia pariwisata, bagaimana pun butuh infrastruktur pendukung, sebagai prasyarat, sekaligus prakondisi keberlangsungan dan kesempurnaannya. Antara lain adalah ketersediaan hotel sebagai tempat menginap para wisatawan. Terutama bagi wisatawan dari tempat yang jauh atau manca negara, kehadiran sebuah tempat akomodasi sangatlah vital sekali agar kebutuhan istirahat bagi mereka dapat terpenuhi.

Sebab itu dengan semakin maraknya fenomena destinasi wisata halal yang berbasiskan syariat tentu saja merupakan peluang, sekaligus tantangan bagi para pengusaha industri perhotelan syariah di Indonesia. Dikatakan peluang dimaksudkan karena bisnis ini belum sedemikian banyak dibangun, padahal ke depan tidak sedikit kehadiran wisatawan yang membutuhkan. Terutama dari kalangan wisatawan Muslim, sejalan dengan perkembangan wisata halal itu sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan tantangan adalah tidak sedikit kendala yang dihadapi untuk membangun sebuah hotel dengan “brand” baru yang berpredikat “halal” dalam perspektif syariah yang mempunyai karakter berbeda dengan yang konvensional. Bukankah selama ini para wisatawan telah sedemikian nyaman dan percaya dengan hotel yang ada. Atau mereka masih ragu sehingga muncul pertanyaan, seperti apakah hotel syariah itu? Inilah kiranya salah satu tantangan yang harus dihadapi dan disosialisasikan di tengah publik untuk meyakinkan mereka bahwa hotel jenis baru ini adalah merupakan industri alternatif agar mereka terhindar dari situasi dan kondisi yang tidak jarang kurang syar’i.

Karena itu kehadiran hotel syariah pada hakikatnya merupakan upaya melindungi keberagaman wisatawan Muslim dari dampak negatif berbagai anasir yang dapat menciderai keyakinan agamanya, dalam hal ini adalah Islam. Atau, dengan kata lain, kehadiran hotel yang berlabel syariah tidaklah berarti akan menciptakan sekelompok komunitas eksklusif, dalam arti yang berkonotasi negatif. Namun

tidak lain adalah sebagai sebuah konsekuensi karena semakin maraknya wisata halal, baik di negeri Muslim maupun negeri sekuler sekali pun. Bukankah perkembangan usaha perhotelan di Indonesia selaras dengan kemajuan di bidang pariwisata.⁴³ Kendati sejatinya hal ini juga akan terjadi di mana pun saja dan kapan pun saja di dunia. Atau dengan kata lain, perhotelan adalah merupakan bidang usaha yang berkembang seiring dengan kemajuan sektor pariwisata.⁴⁴

Untuk itu, merupakan sebuah keniscayaan, apabila pertumbuhan destinasi wisata halal perlu diikuti pula dengan ketersediaan hotel yang berpredikat halal pula. Jika tidak, maka berarti telah terjadi asimitrisasi atau tidak *kaffah* menurut pemahaman terma syariat Islam. Hal ini menyimak firman Tuhan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, 2:208⁴⁵ Dari substansi ayat ini dapat dipahami, apabila kita telah berserah diri kepada Tuhan, dalam arti telah menjadi orang Islam (Muslim), maka hendaknya dalam berperilaku bertekad mengikuti segala ketentuan syariat Islam.

Tuntutan para wisatawan Muslim yang membutuhkan pelayanan akomodasi nampaknya telah memotivasi para pengusaha hotel secara meluas, tidak saja secara kuantitatif, namun juga kualitatif. Secara kuantitatif dimaksudkan perlu ketercukupan dari aspek jumlah yang tersedia guna memenuhi permintaan pasar. Sedangkan kualitatif dimaksudkan perlu semakin meningkatnya kualitas pelayanan agar pengunjung merasa lebih nyaman dan aman sesuai yang diharapkan. Kiranya hal ini selaras dengan tingkat frekuensi perjalanan, sekaligus tuntutan umat manusia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu.⁴⁶ Terutama di era globalisasi saat ini yang ditunjang dan dipercepat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih.

⁴³ Bagyono, *Teori dan Praktik Hotel Front Office*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 5

⁴⁴ Ibid., 1

⁴⁵ Dalam ayat ini Allah swt berfirman yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."

⁴⁶ Lihat dan bandingkan dengan Bagyono, *Teori dan Praktik Hotel*, 1

Bahkan dewasa ini, usaha perhotelan tidak lagi sebagai bagian dari bisnis tradisional sebagaimana yang telah banyak dipraktikkan sebelum ini, namun telah berkembang secara signifikan menjadi sebuah industri yang peranannya sangat menentukan bagi internasionalisasi usaha perjalanan, kesejahteraan ekonomi dan peningkatan transportasi baik darat, laut maupun udara.⁴⁷ Sebab itu penurunan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara di suatu daerah destinasi wisata akan secara langsung berimbas pada *occupancy* (tingkat hunian kamar) hotel.⁴⁸ Dalam hal ini jelas ada korelasi antara daya pikat (pesona) destinasi wisata dengan jumlah hunian hotel yang tersedia. Inilah kiranya tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha pariwisata, tanpa kecuali usaha wisata halal di Indonesia.

Namun demikian perlu disadari bahwasanya rendahnya tingkat kunjungan wisata bisa jadi karena belum terpenuhinya kebutuhan akomodasi yang representatif sesuai yang diharapkan. Karena itu di antara kiatnya adalah perlu adanya sinergi antara pengusaha pariwisata dengan pengusaha perhotelan. Selain perlu adanya upaya melengkapi fasilitas infrastruktur perhotelan yang memadai, terlebih lagi di era modern saat ini industri perhotelan tidaklah sebatas usaha hotel dan restoran. Namun lebih dari itu, meliputi pula beragam usaha, seperti bar, gerai *fast food*, *guest house*, *laundry*, dan *dry cleaning*, rekreasi keluarga, kebugaran dan lain sebagainya.⁴⁹

Bertolak dari uraian di atas, apakah sebenarnya hotel itu secara definitif? Menurut Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 37/PW-340/MPPT-86, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan layanan penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.⁵⁰

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid., 2

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Republik Indonesia Pasal 67 dinyatakan bahwa “Pelayanan pokok usaha hotel yang harus disediakan sekurang-kurangnya harus meliputi penyediaan kamar tempat menginap, penyediaan tempat dan pelayanan makan minum, penyediaan pelayanan pencucian pakaian/binatu dan penyediaan fasilitas lainnya. Peraturan Pemerintah tersebut secara implisit memberikan definisi mengenai kata hotel.”⁵¹

Karena itu bertitik tolak dari kedua definisi di atas dapat dipahami bahwa ada dua fungsi penting dalam bisnis perhotelan, yakni menjual produk riil yang kasat mata (*tangible product*) dalam wujud kamar (dengan berbagai fasilitasnya) dan konsumsi (makanan dan minuman). Di samping menjual yang tidak tampak (*intangible product*) yakni jasa pelayanan yang dapat dirasakan.

Oleh karena itu kedua bentuk produk tersebut dalam perspektif fikih tidak boleh ada aspek apa pun yang kontra produksi dengan hukum Islam, sebagai konsekuensi dari karakter sebuah hotel yang berprerdikat halal.⁵² Misalnya bebas dari berbagai jenis makanan yang memabukkan dan mengandung bahan yang haram dikonsumsi. Mengedepankan pelayanan yang mencerminkan ajaran etika dalam Islam yang tidak saja nampak baik secara lahir, namun juga batin secara padu seperti amanah, jujur, ramah, terbuka, dan perilaku terpuji lainnya.

3. Restoran : Infrastruktur Kebutuhan Konsumsi

Sebagaimana perlunya ketersediaan hotel, maka ketercukupan restoran pun dalam dunia wisata juga merupakan keniscayaan. Restoran dengan segala bentuk dan tingkatan kelasnya juga merupakan bagian sarana atau aspek penunjang kemajuan, sekaligus

⁵¹ Ibid.

⁵² Lihat kembali, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia. N0. 108/DSN-MUI/X/2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

keberlangsungan dunia pariwisata secara universal. Karena bagaimana pun para wisatawan pasti butuh makan dan minum sebagaimana lazimnya manusia pada umumnya.

Jika durasi waktu berwisata dalam rentang waktu yang relatif singkat, maka bisa jadi wisatawan membawa pembekalan dari rumah masing-masing. Namun demikian untuk jangka waktu yang lama, terutama bagi wisatawan mancanegara, bagaimana pun mereka pasti membutuhkan tempat makan. Karena itu di sinilah kiranya signifikansi perlunya kehadiran restoran di kawasan destinasi wisata di mana pun saja.

Sebagaimana jamaknya, dalam setiap usaha restoran perlu ada sumber daya manusia (*owner* dan *worker*), tempat (*palace*) dan objek yang dijual yang berupa jasa dan bentuk makanan serta minuman. Selanjutnya, bagaimanakah seyogianya ketiga komponen tersebut dalam perpektif hukum Islam?

Dari aspek fikih dan etika antara lain pelayan wajib berpakaian yang sopan dan syar'i, tidak mengumbar aurat yang diharamkan, tersedianya fasilitas ibadah yang memadai, adanya daftar harga setiap menu yang dijual, adanya label halal setiap makanan dan minuman yang disajikan dan lain sebagainya.⁵³ Jika hal ini tidak terpenuhi, maka berarti persyaratan sebagai sebuah restoran syariah belumlah terpenuhi.

Selanjutnya, berkaitan dengan restoran ini, Korea Selatan dalam upaya memanjakan wisatawan Muslim, menurut Andrew Kim Jong Hoon, Direktur Korea Tourism Organization (KTO), menetapkan beberapa jurus. Pertama, bersertifikasi halal resmi (*halal-certified*), serifikasi halal sendiri (*self certified*), ramah Muslim (*Muslim-friendly*), dan bebas babi (*pork free*).⁵⁴

Tidak hanya itu, untuk terus meningkatkan jumlah wisatawan Muslim, Korea Selatan dengan menyediakan mushala di banyak

⁵³ Lihat, Ibid.

⁵⁴ Setyanavidita, Livikacansera, "Manjakan Wisatawan Muslim," dalam *Republika*, edisi 25 Agustus 2017, 5

tempat wisata. Sampai saat ini, terdapat 42 mushala yang tersebar di bandara, hotel dan tempat wisata seperti Pulau NaMI, Everland, Seoul Land, Lotte World, COEX, Pelite France dan tempat wisata lainnya.⁵⁵

Itulah kiat-kiat Negeri Ginseng itu dalam upaya mencoba memberi pelayanan yang maksimal kepada para wisatawan Muslim agar mereka mau berkunjung agar destinasi wisata halal yang dibangun semakin berkembang dan semakin kompetitif di pentas global.

4. Travel : Infrastruktur Biro Perjalanan dan Transportasi

Dalam dunia kepariwisataan masalah kemudahan informasi dan transportasi merupakan salah satu infrastruktur yang tidak kalah pentingnya dengan faktor pendukung yang lain. Tanpa adanya sarana dan prasarana travel (biro perjalanan) yang memadahi mustahil rasanya sebuah destinasi wisata akan banyak diminati oleh para wisatawan, karena sulitnya informasi segala sesuatunya yang terkait dengan destinasi yang akan dituju. Tanpa kecuali kemudahan sarana transportasi untuk menjamin keterjangkauan dari tempat asal wisatawan menuju ke arah tujuan wisata.

Karena itu ketercukupan sarana pemandu dan transportasi tentu merupakan keniscayaan guna mendukung pembangunan dan keberlanjutan sebuah destinasi wisata, terlebih lagi bagi destinasi yang baru dibangun atau baru dipasarkan di tengah masyarakat. Baik dalam skala regional, nasional maupun internasional. Tentang hal ini kiranya terkait dengan tugas kehumasan atau bagian pemasaran dalam mengiklankan dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa destinasi wisata yang dijual telah didukung oleh infrastruktur yang memadahi sehingga mudah dijangkau.

Untuk itu, tentu saja ketersediaan biro perjalanan merupakan peluang, sekaligus tantangan bagi para pengusaha di bidang travel

⁵⁵ Ibid.

untuk memperkuat usahanya atau sebagai lahan usaha baru bagi pengusaha baru.⁵⁶ Karena bagaimanapun mereka harus masuk ke arena persaingan usaha jasa dalam menangkap peluang, sekaligus merebut hati masyarakat pengguna. Untuk dapat memenangkan persaingan di era kemajuan teknologi saat ini, agar mampu memenangkan persaingan, tentu bagi seorang pengusaha selain mampu memanfaatkan jasa teknologi juga dituntut kemampuan membangun strategi baru, inovasi baru, kreasi baru dan lain sebagainya. Kiranya hal ini merupakan prasyarat (prakondisi) yang harus disadari dan dipersiapkan oleh para pengusaha travel, terlebih lagi bagi pemain baru.

Akan tetapi kesemua prasyarat itu belumlah cukup dalam menghadapi kerasnya persaingan, karena pada hakikatnya usaha transportasi adalah terkait dengan masalah pelayanan dalam menjual jasa kepada konsumen. Ini berarti pengguna jasa belumlah cukup disuguhi indahnya kendaraan secara fisik, namun di balik itu perlu ada kepatuhan dan keterbukaan dalam transaksi antara pengusaha dengan pengguna. Perusahaan, harus jujur antara apa yang diiklankan dengan praktik di lapangan. Katakan saja yang berkaitan dengan masalah harga, ketepatan waktu, kelayakan kendaraan, dan keramahan pelayanan. Demikian pula dalam kaitan dengan suguhan konsumsi (*snack* misalnya) harus benar-benar halal, dan lain sebagainya.

Atau untuk wisata halal ada perjanjian khusus yang membedakan dari wisata konvensional yakni, selama dalam menempuh perjalanan ada titik-titik tertentu untuk memberi kesempatan kepada wisatawan melakukan rehat, makan, menunaikan shalat dan lain sebagainya. Rumah makan sebagai tempat rehat, makan dan shalat haruslah rumah makan yang hanya menyuguhkan makanan halal.⁵⁷ Kiranya hal ini merupakan salah satu kiat untuk memanjakan konsumen sebagai salah satu bentuk pelayanan *excellent* dari sebuah usaha

⁵⁶ Dalam hal ini, baca, Ronny Anggrianto, *Revolusi Gila Bisnis Tour & Travel* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012)

⁵⁷ Lihat kembali Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0, 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

transportasi. Karena bagaimanapun perusahaan harus mampu melayani kepentingan konsumen agar terbangun kesan bahwa perusahaan yang digunakan mengedepankan nilai-nilai syariat.

5. Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Dalam kaitan dengan keberlangsungan dunia wisata tidak lepas dari daya dukung lain yang sangat krusial yang berupa sumber daya manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai penguasa, pengusaha, pemandu wisata (pramuwisata), kaum intelektual (ulama), dan masyarakat luas. Kesemuanya ini tentu saja memiliki fungsi sesuai peran masing-masing. Dalam arti kata, jika mereka melakukan peran sesuai tugas masing-masing, maka berkecenderungan industri wisata halal yang dibangun akan mengalami kemajuan dan akan menjadi pesona yang menarik. Kata kuncinya adalah mereka sama-sama memenuhi ketentuan yang berlaku tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, terutama bagi para wisatawan yang berkunjung.

Bagi pengusaha makanan misalnya perlu tarif yang jelas untuk setiap menu yang disediakan tanpa kecuali bahwa setiap apa pun yang disajikan harus steril dari zat yang haram dikonsumsi Muslim. Tanpa kecuali pula dalam proses pengolahannya dan seterusnya. Demikian pula bagi pengusaha penginapan, baik dalam bentuk hotel, villa, *guest house*, rumah singgah, dan lain-lain perlu ada keberpihakan pada ketentuan hukum. Seperti perlu dilakukan pemisahan fasilitas sesuai jenis kelamin, kecuali untuk muhrim yang dibuktikan dengan surat identitas (keterangan resmi nikah). Selain juga harus steril dari minuman dan makanan haram, spa dan kolam renang syar'i. Syar'i untuk renang antara lain ditandai dengan penggunaan pakaian renang dan terpisah antara kolam lelaki dan perempuan.

Selain itu peran pemandu, tidak kalah krusialnya dalam menyukseskan pembangunan industri wisata halal. Bagaimanakah cara mereka berpakaian, menentukan tarif jasa selama memandu bagaimanapun harus ada transparansi agar pengunjung mempunyai kepastian yang menenangkan dan menyamankan. Tarif jasa ini

bukanlah tidak mungkin dilakukan tanpa melalui jasa travel sehingga akan menimbulkan kerawanan ketidakjujuran yang berpotensi merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Atau dengan kata lain, sumber daya manusia (SDM) pemandu wisata syariah (*halal tourism*) bagaimanapun wajib paham dan melaksanakan nilai-nilai syariah dalam tugasnya, antara lain profesional, memahami dan mampu melaksanakan fikih pariwisata, berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, menarik, dan bertanggung jawab.⁵⁸ Dengan demikian, SDM yang berkiprah di bidang *halal tourism* niscaya harus memahami kebutuhan dasar wisatawan Muslim. Selain juga, mereka harus memahami dan menguasai pelayanan yang profesional.⁵⁹

Perlu dipahami bahwa industri pariwisata adalah menjual jasa. Sebab itu adanya sertifikasi SDM tentu merupakan keniscayaan.⁶⁰ Kiranya para pelaku sadar bahwa kompetitor mereka tidak hanya sesama pelaku di dalam negeri, tetapi juga regional seperti Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Kiranya ketiga negara sekuler ini dilihat dari sumber daya yang mendukung pengembangan industri wisata halal secara umum, belum bisa menyamai potensi yang dimiliki Indonesia dalam banyak hal. Namun demikian mereka memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun dan mengemas sebuah destinasi wisata yang berdaya tarik bagi wisatawan Muslim. Karena itu, jika Indonesia ingin memenangkan persaingan dan meningkatkan jumlah wisatawan Muslim mancanegara, bagaimanapun SDM yang mengelolanya pun harus siap bersaing.⁶¹

Apabila pemerintah memiliki komitmen dan benar-benar konsisten dengan dukungan kualitas SDM yang memadai, maka bukanlah tidak mungkin ke depan, Indonesia akan memiliki prospek yang cerah. Bahkan akan menjadi pusat, sekaligus pangsa pasar destinasi wisata halal tingkat dunia yang benar-benar mempesona.

⁵⁸ Lihat kembali, Ibid.

⁵⁹ Fuji Pratiwi, "SDM Wisata Halal Harus Profesional," dalam *Republika*, edisi 23 Mei 2017, 12

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

Tentu saja kunci sukses itu tetap harus didukung oleh segenap elemen bangsa yang berkompeten, seperti dari kalangan ulama. Karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari sumber daya manusia *halal tourism* yang mempunyai otoritas di bidang syariah (hukum).⁶²

Dalam kaitan itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang menjadi landasan standarisasi aspek –aspek wisata halal.⁶³ Untuk mempercepat implementasi fatwa ini, nampaknya DSN-MUI mencoba bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk membuat standar yang akan dirumuskan, antara lain yang berkaitan dengan ketentuan standarisasi dan SDM.

Dengan demikian peran serta para ulama untuk membangun destinasi wisata halal di Indonesia tidak kalah strategis dan krusialnya, baik yang dilakukan secara individual maupun terorganisir dalam sebuah wadah seperti DSN-MUI. Apakah peran itu dalam bentuk ceramah, khotbah maupun fatwa-fatwa yang dibutuhkan. Dan dari mereka justru diharapkan banyak koreksi berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh para penguasa atau para pengusaha. Tanpa kecuali kritik dan koreksi terhadap segala bentuk aktivitas wisata halal jika sekiranya dalam praktik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena bagaimanapun, dalam kaitan dengan masalah kebijakan dan pengawasan, peran dan kearifan penguasa dan pengusaha sangatlah diperlukan.

Jika kedua soko guru negara itu, yakni ulama dan penguasa (umara) saling bersinergi sesuai fungsi masing-masing, maka niscaya wisata halal Indonesia akan semakin prospektif yang akan berdampak pada perkembangan ekonomi, tanpa kecuali ekonomi

⁶² Dalam kaitan dengan bagaimana sumbangsih pemikiran ulama berkaitan dengan pengembangan ekonomi syariah di mana wisata halal merupakan bagian dan mempunyai dampak terhadap *income* negara, secara tidak langsung lihat, Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*, disampaikan dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah, 24 Mei 2017 di UIN-Maliki Malang

⁶³ Fuji Pratiwi, *SDM Wisata Halal*, 12

syariah. Bukankah ekonomi syariah itu akan memberikan manfaat ekonomi (*economic benefit*) bagi para pelakunya.⁶⁴ Inilah sejatinya yang diharapkan perlunya sinergitas para SDM wisata halal agar berujung pada kesejahteraan umat.

H. Catatan Akhir

Syariat bukanlah fiqh, karena keduanya merupakan entitas tersendiri, kendati kadangkala disamakan antara keduanya. Syariat sejatinya adalah merupakan kumpulan perintah (*awamir*) dan sejumlah larangan (*nawahi*) untuk manusia yang bersumber dari ajaran wahyu. Sedangkan fiqh adalah merupakan kumpulan hukum-hukum yang bersifat amaliah yangt digali dari dalil-dalilnya yang rinci melalui ijtihad oleh imam mujtahid atau imam madzhab.⁶⁵

Oleh karena itu bertitik tolak dari kedua entitas di atas, kata “halal” di dalam istilah wisata halal yang sekarang banyak dibicarakan dalam dunia pariwisata, secara makro merupakan bagian dari ranah syariah. Artinya, segala aktivitasnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebab itu untuk memperjelas apa saja sejatinya kawasan yang terlarang itu, maka tentunya dalam hal ini perlu penjelasan yang lebih detail (rinci) dari fiqh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wisata halal secara operasional merupakan wilayah kajian fikih (mikro).

Oleh karena itu, bagaimanapun kehadiran dan perkembangan industri wisata halal ke depan tentu membutuhkan peran fikih (fukaha) agar praktik wisata yang berbasis syariah terhindar dari hal-hal yang secara syar’i justru wajib dihindari. Inilah sejatinya benang merah yang membedakannya dengan wisata konvensional yang teralienasi dari ketentuan-ketentuan syariat Islam.

⁶⁴ Ma’ruf Amin, *Solusi Hukum Islam*, 5

⁶⁵ Dalam hal ini lihat dan bandingkan dengan Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, 110

Bab IV

Pariwisata Halal: Perspektif *Maqashid* *al - Syariah*

A. Pengantar

Tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan dalam arti holistik atau utuh yang meliputi baik lahir maupun batin, dunia maupun akhirat, untuk kepentingan diri maupun sosial lain dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa karakter ajaran Islam menekankan pada adanya keseimbangan (*tawazun-balance*) di kalangan umatnya. Seorang Muslim tidaklah dapat dibenarkan jika dalam hidupnya hanyalah mengejar kepentingan keduniawian, sementara kepentingan akhiratnya diabaikan, atau bahkan ditinggalkan. Padahal dalam Islam, keduanya haruslah sama-sama mendapatkan perhatian secara berkeseimbangan. Bukankah kehidupan dunia hanyalah sesaat, karena kehidupan akhiratlah yang kekal dan abadi sebagai tempat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama di dunia. Sebab itu Islam mengajarkan pula

agar seorang Muslim selama hidup dunia banyak melakukan amal shaleh sebagai bekal di dalam menghadapi hidup setelah mati.

Demikian pula seorang Muslim tidaklah dibenarkan hanya mementingkan dirinya sendiri (*egoistic-ananiyyah*) tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Samahalnya dengan jika seorang pengusaha yang hanya mementingkan korporat, sementara di sisi lain kepentingan *stakeholder* justru dikorbankan. Sikap semacam ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan sikap tolong-menolong, menebar kasih-sayang kepada siapa pun dan mengedepankan keadilan dalam bermuamalah. Sebagai ekspresi dari ajaran dalam Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Selanjutnya dalam kaitan dengan destinasi wisata halal, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwasanya wisatawan itu bagaikan tamu yang bersilaturahmi kepada sebuah keluarga. Karena itu mereka perlu dihormati kedatangannya dan dilindungi segala kepentingannya agar merasa mendapat kepuasan lahir dan batin dalam melakukan kunjungan. Di dalam filosofi budaya Jawa, penghormatan seorang tuan rumah terhadap setiap tamu yang datang tersimpul di dalam ajaran, yakni *gupuh, lungguh dan sugu*. *Gupuh* dimaksudkan agar tuan rumah segera menyambut baik tamunya dengan penuh hormat dan ramah, setelah itu sang tamu dipersilakan duduk, dan jika memungkinkan bisa dijamu dengan sekadar makanan dan minuman seperlunya.

Itulah sekadar ilustrasi yang mencoba menggambarkan, bagaimanakah seyogianya destinasi wisata halal menyambut dan melayani para turis yang datang agar mereka merasa mendapat kepuasan. Atau, mereka merasa ada kesan dan daya tarik tersendiri yang pada akhirnya ada keinginan untuk menjadi pelanggan yang setia.

Praktik semacam itu sejatinya samahalnya dengan apa yang diajarkan dalam Islam yang mewajibkan setiap Muslim agar memuliakan tamunya sebagai ekspresi rasa keimanan mereka

kepada Allah swt. Selanjutnya bagaimanakah bentuk penghormatan dan pelayanan itu jika diaplikasikan ke dalam dunia wisata dalam perspektif *maqashid al-syariah* yang pada dasarnya mengajarkan untuk melindungi kepentingan wisatawan yang meliputi aspek: agama, jiwa, akal, keturunan, harta milik, dan bahkan juga lingkungan sekitarnya.

B. *Maqashid al-Syariah* : *Hifdz al-Din* (Melindungi Akidah)

Pariwisata halal jelas beda dengan pariwisata konvensional yang selama ini telah banyak berkembang di berbagai belahan bumi. Perbedaan itu dapat dipahami dari karakteristik antarkeduanya karena berangkat dari paradigma yang berbeda pula. Pariwisata konvensional bersumbu pada paradigma materialistik yang dapat dikatakan steril dari nuansa nilai-nilai spiritualistik yang transenden.

Serbaliknya, pariwisata halal yang sangat bertumpu pada paradigma *rabbaniyyah* yang transenden spiritualistik, sebagaimana tercermin dari perekatan predikat halal di belakang kata pariwisata. Sebab itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menyatakan pariwisata halal adalah pariwisata yang berdasarkan pada prinsip syariah.

Penggunaan kata “Prinsip Syariah,” mengandung konsekuensi terhadap segala aktivitas yang dilakukan, tanpa kecuali aktivitas pariwisata, yakni harus mengikuti ketentuan-ketentuan Tuhan sebagaimana yang tersirat dan tersurat di dalam sumber ajarannya, yakni al-Qur’an dan Sunnah. Artinya, jika sekiranya pariwisata halal, lepas kendali dari sumber pokok ajaran ini, maka samalahnya dengan lepas dari prinsip syariah yang sejatinya wajib ditaati oleh setiap Muslim di manapun mereka berada.

Karena itu kehadiran ajaran *maqashid al-syariah* pada dasarnya dapat memperkuat makna halal dalam aktivitas pariwisata agar para wisatawan dalam melakukan wisata sesuai tuntunan syariah. Sekaligus ingin melindungi keyakinan mereka agar terjauh dari kemusyrikan, khurafat, kemaksiatan, dan lain sebagainya yang saat ini banyak terjadi dan berkembang di tengah masyarakat yang tentu saja kontraproduktif dengan yang diajarkan di dalam Islam.¹ Sebab itu untuk menjauhkan wisatawan Muslim dari kemaksiatan itu dalam konsep wisata halal antara lain perlu dihadirkan hotel-hotel yang bersertifikasi halal, pantai halal yang menyediakan pembatas permanen untuk turis perempuan dan laki-laki.² Termasuk pula restoran-restoran yang berlabel halal agar para turis Muslim tidak merasa ragu lagi mengonsumsi setiap produk makanan, minuman, dan lain sebagainya sebagaimana yang digalakkan oleh Negeri Ginseng, Korea Selatan dalam upaya menarik wisatawan Muslim yang sebanyak-banyaknya.³

Dengan demikian menurut perspektif ajaran *maqashid al-syariah* pengembangan industri pariwisata halal saat ini adalah merupakan antitesis atas praktik pariwisata konvensional yang terjauh dari norma spiritualitas yang sejatinya merupakan kebutuhan asasi bagi wisatawan Muslim secarta universal.

Bukankah pariwisata halal itu sejatinya merupakan sarana dakwah di ruang publik untuk membumikan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Di satu sisi wisatawan dapat terpenuhi kebutuhannya untuk *refreshing* dan berhibur,⁴ namun di sisi lain kebutuhan ibadah (spiritual) sebagai kewajiban mereka tetap terpenuhi pula. Dalam hal ini posisi pariwisata halal, dalam perspektif *maqashid al-syariah*,

¹ Dalam kaitan ini baca, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

² "Wisata Halal Andalan Baru NTB," dalam *Jawa Pos*, edisi 8 September 2017, 16

³ Lihat, Harun Husein, "Geliat Wisata Ramah Muslim Korea Selatan," dalam *Republika*, edisi 7 September 2017, 24

⁴ Dalam kaitan dengan apa saja motivasi masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, lihat Henky Hermantoro, *Creative-Based Tourism Dari Wisata Rekreatif Menuju Wisata Kreatif* (Depok: Penerbit Adtri, 2011), 53-69

melakukan peran sebagai pengawal akidah wisatawan. Salah satu cirinya antara lain adanya fasilitas ibadah.⁵ Baik dalam bentuk masjid atau mushalla agar para turis Muslim tidak mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajiban ibadahnya kepada Tuhan, kendati mereka sedang melakukan wisata.⁶

Tentu saja hal itu sangat tergantung kepada para pemangku kepentingan. Di satu sisi mereka dapat mengembangkan usaha di sektor pariwisata yang dipandang prospektif ke depan,⁷ namun di sisi lain mereka berkomitmen untuk memfasilitasi kebutuhan wisatawan untuk tidak meninggalkan kewajibannya beribadah kepada Tuhan dan mengabaikan ajaran-ajarannya.

Inilah sekadar gambaran yang akan menunjukkan bahwa untuk membangun industri pariwisata halal bagaimanapun harus mengedepankan karakter spesifiknya yang paling asasi, antara lain memberi perlindungan terhadap agama wisatawan sebagaimana yang diajarkan dalam *maqashid al-syariah* yang akan diulas lebih jauh dalam kajian berikutnya.

C. *Maqashid al-Syariah* : Pandangan Para Pakar

Dalam dunia Islam tidaklah sedikit para pakar (ulama) yang membahas tentang ajaran *maqashid al-syariah* yang menuntut manusia untuk memperoleh kemaslahatan dalam kehidupan. Baik secara khusus dalam satu bentuk kajian tersendiri atau pun dikaitkan dengan berbagai disiplin yang lain sesuai tujuan dan kebutuhan. Khusus untuk yang terakhir ini, sebagaimana yang dilakukan oleh M. Umer Chapra dalam berbagai wacananya yang seringkali mengaitkan wacana ekonomi dengan ajaran *maqashid al-syariah*.⁸

⁵ Wisata Halal Andalan Baru NTB, 16

⁶ Lihat kembali, Husein, *Geliat Wisata*, 24

⁷ Dikatakan prospektif karena pasar wisata halal dunia yang diprediksi tumbuh menjadi 180 miliar dolar AS pada 2020 membuat banyak negara semakin serius berbenah untuk menyambut turis Muslim, antara lain Korea Selatan dengan menggulirkan pariwisata ramah Muslim (*Muslim friendly tourism*). Lihat, Husein, “Geliat Wisata, 24

⁸ Dalam hal ini lihat, M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* ((Herndon: The

Dalam kaitan dengan *maqashid al-syariah*, Ahmad Al-Mursi Husaian Jauhar, dalam sebuah kitabnya “Maqashid al-Syariah fi al-Islam” mengutip pendapat Asy-Syatibi yang membagi kemaslahatan menjadi dua kategori, baik yang pencapaiannya dengan menarik kemanfaatan atau pun menolak kemudaratannya, yakni kemaslahatan *dharuriyyah* dan kemaslahatan *ghairu dharuriyyah*.⁹

Kemaslahatan kategori pertama, yakni *dharuriyyah*, adalah merupakan yang inti (pokok) sebagai dasar dan tujuan umum syariat yang mencakup lima aspek yang harus dilindungi yang dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khums*. Sedangkan kategori yang kedua, yang bukan pokok (bukan inti) dibagi lagi menjadi dua kategori, yakni *hajji* (berdasar kebutuhan) merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pekerjaan dan memperbaiki kehidupan mereka, seperti sewa-menyewa, bagi hasil dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, yakni *tahsini*, yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika yang bisa mengantarkan seseorang menuju *muruah*.¹⁰

Pakar lain seperti Muhammad Tahir Ibnu ‘Ashur (W. 1973M) membagi *maqashid al-syariah* menjadi dua kategori, yakni *maqashid al-tasyri’ al-‘ammah* dan *maqashid al-khashshah*. Yang pertama, meliputi seluruh aspek kehidupan, sedangkan yang kedua berkaitan dengan aspek-aspek khusus, seperti bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain sebagainya.¹¹ Atau *maqashid al-syariah al-juz’iyyah* yang meliputi setiap hukum syara’ seperti kewajiban melaksanakan shalat, larangan berbuat zina dan sebagainya.¹²

Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1995) dan M. Umer Chapra, *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy*, dalam Khurshid Ahmad (ed), *Studies in Islamic Economics* (Jeddah and United Kingdom: International Centre for Research in Islamic Economics and The Islamic Foundation, 1976), 144-170

⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, ter. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2010), xiv-xv

¹⁰ Ibid., xv-xvi

¹¹ Dalam, H. Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid al-Syariah Ibnu ‘Ashur* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 45

¹² Ibid., 46

Itu semua dimaksudkan untuk merealisasikan tujuan akhir dengan diaplikasikannya syariat melalui ajaran *maqashid al-syariah*. Untuk itu dalam kaitan dengan ajaran *maqashid al-syariah* ini Ibnu 'Ashur mendefinisikan masalah sebagai suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya, baik secara umum maupun khusus.¹³

Kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum, sedangkan kemaslahatan khusus (*mashlahah khashshah*) adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan diri sendiri (individu).¹⁴ Betapa staregisnya posisi ajaran *maqashid al-syariah* ini dalam penetapan masalah hukum, sehingga dengan demikian Ibnu 'Ashur menekankan betapa pentingnya seorang fukaha' menguasai ajaran ini.¹⁵

Pendapat Ibnu 'Ashur tersebut ada titik persamaannya dengan pendapat Wahbah Zuhayli (L. 1932M) yang membagi *maqashid al-syariah* ke dalam dua bagian,¹⁶ yakni pertama, yang berhubungan dengan kepentingan publik (*al-mashlahah al-kulliyah*) dan kepentingan individu (*al-mashlahah al-juz'iyah al-khashshah*). Sedangkan yang kedua pembagian menurut kepentingan pemenuhannya dan penghindaran terhadap kerusakannya, yakni *al-mashlahah al-qath'iyah* (kemaslahatan yang sudah pasti), *al-mashlahah al-dzanniyah* (kemaslahatan yang tingkat kesalahannya sedikit), dan *al-mashlahah al-wahmiyyah* (kemaslahatan yang tingkat kesalahannya dominan).

Selanjutnya Zuhayli membedakan antara pengertian darurat (*dlarurah*) dan kemaslahatan (*mashlahah*).¹⁷ Darurat adalah kondisi di mana kebutuhan manusia sampai kepada situasi yang mengancam jiwa atau pun harta benda mereka (katakan saja yang berhubungan dengan kebutuhan makan, minum, pengobatan dan papan, pen.)

¹³ Ibid., 47

¹⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014), 103

¹⁵ Ibid., 101-102

¹⁶ Ibid., 109

¹⁷ Ibid., 110

Sedangkan kemaslahatan yakni penjagaan terhadap tujuan syariah dengan menghindari kerusakan pada penciptaan.

Selanjutnya Zuhayli menegaskan bahwa *maqashid al-syariah* merupakan dasar keadilan dan menjadi acuan para fukaha' dan kaum Muslimin dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum Islam. Karena menurutnya, banyak ulama yang salah menempatkan *maqashid al-syariah* dengan beranggapan bahwa ajaran ini berasal dari luar syariah itu sendiri.¹⁸

Dalam kaitan dengan kemaslahatan, pakar lain, dalam hal ini Yusuf Qardhawi mempertegas jika terjadi pertentangan antara *mashlahah* dengan nash yang *qath'i*, maka yang harus dimenangkan adalah nash terlebih dulu, terlebih lagi jika kemaslahatan itu masih diragukan. Karena bagaimanapun tujuan nash itu sendiri adalah untuk memelihara kemaslahatan.¹⁹

Tidak demikian jika sekiranya ada pertentangan antara *al-mashlahah al-mu'tabarah* dengan nash yang memungkinkan untuk ditakwilkan, maka menurut Qardhawi, diharuskan mentakwilkan nash yang ada agar sesuai dengan *al-mashlahah al-mu'tabarah*.²⁰

Selanjutnya Qardhawi menekankan betapa urgennya mempelajari dan memahami *maqashid al-syariah* (termasuk juga *illah*), bagi siapa pun yang ingin memperdalam syariah guna mengetahui realitas dan rahasia yang terkandung di dalamnya agar tidak menimbulkan kesalahan yang fatal. Atau, bahkan akan mengingkari dan akan menimbulkan prasangka bahwa *maqashid al-syariah* merupakan dalil yang diada-adakan oleh manusia di dalam berijtihad.²¹ Secara substansial pendapat Qardhawi ini sejalan dengan pendapat Ibnu 'Ashur dan Zuhayli sebagaimana telah dikemukakan di atas.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.,106

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid., 108

Lebih jauh, dalam kaitan dengan *mashlahah* ini, Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi (1929 M-2013 M) menyatakan bahwa *mashlahah* identik dengan manfaat. *Mashlahah* adalah manfaat yang menjadi tujuan Tuhan terhadap hamba-Nya dalam hal melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda miliknya.²² Hal ini sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi yang menyatakan bahwa *mashlahah* merupakan dasar bagi kehidupan manusia yang terdiri dari lima hal, yakni *dyn*, *nafs*, *'aql*, *nasl*, dan *maal* (*wealth*).²³ Sedangkan manfaat, menurut Buthi, adalah kenikmatan atau sesuatu yang menjadi perantara pada kenikmatan dan menolak bahaya atau pun semua yang menjadi perantaranya.²⁴

Menurut Buthi selanjutnya, dampak *mashlahah* dan *mafsadah* tidak hanya di dunia, bahkan juga di akhirat kelak.²⁵ Setiap amal yang diyakini akan menghasilkan kebaikan di masa kini dan akan datang adalah termasuk *mashlahah*. Selain itu, *mashlahah* tidak saja dinilai dari aspek materi saja, namun juga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh, jiwa, dan roh manusia.²⁶ Maksudnya, dalam menilai *mashlahah* hendaknya secara holistik dan seimbang, baik secara materi maupun nonmateri.²⁷

Menurutnya lagi, *mashlahah* agama merupakan dasar bagi *mashlahah* yang lain dan harus diprioritaskan.²⁸ Atau, dengan kata lain, untuk jelasnya, *mashlahah* agama posisinya sebagai kausa prima dari *mashlahah* yang lain, sehingga perlu didahulukan dalam implementasinya dalam kehidupan, tanpa kecuali dalam dunia pariwisata halal.

²² Ibid., 111

²³ P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 5-6

²⁴ Fauzia dan Riyadi, *Prinsip Dasar*, 111

²⁵ Pendapat ini, dibandingkan dengan P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi*, 6

²⁶ Fauzia dan Riyadi, *Prinsip Dasar*, 112

²⁷ Lihat kembali, P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi*, 6

²⁸ Ibid., 112

Bertolak dari uraian di atas dapat dipahami bahwa meraih *mashlahah* adalah merupakan tujuan mendasar syariah untuk mendapatkan kebahagiaan tidak saja di dunia, namun juga kelak di kemudian hari setelah mati. *Mashlahah* di dunia baru akan dicapai, apabila telah dilakukan perlindungan terhadap lima aspek sebagaimana tertuang dalam *maqashid al-syariah* yang pada prinsipnya merupakan prakondisi untuk meraih *mashlahah* di akhirat. Inilah sejatinya *core concept* yang disajikan oleh para pakar di atas yang perlu diperhatikan dan diacu oleh para pemangku kepentingan pariwisata halal yang benar-benar memiliki komitmen terhadap ajaran syariah.

D. Mewujudkan *Mashlahah* : Tujuan Mendasar Syariah

Sebagaimana kita pahami bersama bahwasanya tujuan syariat Islam (Hukum Islam) adalah meraih kemaslahatan hidup, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat. Inilah sejatinya tujuan yang hakiki karena yang perlu diraih dalam hidup tidak saja kehidupan dunia fana yang sesaat, namun juga untuk jangka waktu yang kekal dan abadi yang dikenal dengan kehidupan setelah mati. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam al-Syatibi bahwa “syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”²⁹

Dalam kaitan ini, agar *mashlahah* itu dapat dicapai, Abu Ishaq al-Syatibi (wafat 1388 M) mempertegas lima aspek yang perlu mendapat perlindungan yang diajarkan dalam *maqashid al-syariah* sebagaimana yang telah banyak disinggung pada bagian topik kajian ini.³⁰

Tujuan syariah sebagaimana di atas, dapat dilihat dari dua sisi, yakni a). Dari sisi Pembuat Syariah itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul-Nya dan b) sisi manusia sebagai pelaku (eksekutor) hukum

²⁹ Dalam Fauzia dan Riyadi, *Prinsip Dasar*, 44

³⁰ Lihat, H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 61

itu sendiri. Jika dilihat dari sisi Pembuat Hukum, pertama, adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*) dan tersier (*tahsiniyyat*).

Kedua, tujuan syariat adalah untuk ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan ketiga, agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan benar oleh manusia, maka mereka perlu meningkatkan kemampuannya untuk memahami syariat itu sendiri. Itulah sejatinya prasyarat untuk meraih kemaslahatan hidup dalam arti luas dari aspek Tuhan sebagai Pembuat Hukum yang bersifat Raman dan Rahim terhadap makhluk ciptaan-Nya.

Sedangkan jika dilihat dari sisi manusia sebagai pelaku hukum (subjek), yakni mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan syarat mereka mampu menangkap yang bermanfaat. Sebaliknya, mereka juga mampu mencegah yang mudarat dalam kehidupan. Prasyarat semacam ini sangatlah tergantung pada sikap dan komitmen manusia itu sendiri dalam kapasitasnya sebagai makhluk *mukallaf* yang dibebani tanggung jawab oleh Tuhan selaku Pembuat Hukum.

Sebab itu inilah sejatinya yang perlu menjadi bahan renungan bagi para pemangku kepentingan industri pariwisata halal dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang datang berkunjung. Yakni mengedepankan kebutuhan untuk berwisata, sehingga mereka merasakan kepuasan dan kebahagiaan dalam berwisata. Bukankah syariat itu diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqashid*-nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.³¹

Atau dengan kata lain, para pengusaha memiliki komitmen dan selalu berupaya agar para wisatawan memperoleh *mashlahah* dan terhindar dari segala hal yang membahayakan atau merugikan bagi diri dan keluarganya dalam arti luas sesuai tujuan syariat itu sendiri. Bukankah pariwisata halal itu merupakan salah satu media di era

³¹ Fauzia dan Riyadi, *Prinsip Dasar*, 45-46

kehidupan modern saat ini dalam mewujudkan kemaslahatan sesuai prinsip syariah di tengah maraknya pariwisata sekuler yang hanya mengejar gemerlap duniawi yang materialistik semata.

E. Mengejar *Mashlahah*, Menolak *Mafsadah* : Esensi Utama *Maqashid al-Syariah*

Sebagaimana telah ditegaskan sebelum ini bahwasanya tujuan mendasar syariah adalah untuk meraih kemaslahatan, tidak saja di dunia, bahkan yang terpenting juga kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Untuk itu sangatlah logis sekali jika dalam ajaran *maqashid al-syariah* ditegaskan bahwa di dalam mengejar kemaslahatan itu, sekaligus juga harus menolak segala bentuk kerusakan yang merugikan. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain secara luas. Inilah sejatinya esensi utama ajaran dalam Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* bagi kehidupan.

Dalam kaitan ini Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sesungguhnya syariah hadir untuk menghasilkan kemaslahatan dan melengkapinya, sekaligus juga untuk mencegahnya dari segala kerusakan.³² Selanjutnya ia menyatakan salah satu kebaikan di antara dua kebaikan dan juga salah satu kerusakan di antara dua kerusakan. Yang dimaksudkan adalah jika ada dua kemaslahatan, maka yang perlu dimenangkan adalah kemaslahatan yang paling dominan. Sebaliknya jika ditemui ada dua kerusakan, maka yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu adalah menghilangkan kerusakan yang paling dominan dari adanya kemungkinan kerusakan yang lebih rendah (ringan).³³

Jika pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut diaplikasikan dalam konsep pariwisata halal, maka para pengelola perlu mempertimbangkan tampilan atraksi yang terbaik dari sekian banyak pilihan yang dianggap baik agar wisatawan merasakan

³² Ibid., 85

³³ Baca kembali dan bandingkan dengan Ibid.

kepuasan dan terlayani dengan prima. Namun demikian di balik itu perlu mempertimbangkan pula sekian banyak risiko yang mungkin terjadi dengan upaya menekan risiko yang sekecil mungkin agar wisatawan terhindar dari ancaman bahaya dan kerugian yang jelas tidak dikehendaki.

Inilah sejatinya yang sepatutnya pula perlu mejadi bahan renungan dan pertimbangan bagi para pengusaha apa yang dimaksud dengan mengejar *mashlahah*, menolak *mafsadah* dalam dunia industri pariwisata halal dalam perspektif ajaran *maqashid al-syariah* dalam syariat Islam. Intinya adalah untuk menggapai masalah dalam dunia wisata dengan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

F. *Maqashid al-Syariah* : Posisi Pariwisata Halal sebagai Kebutuhan Universal

Pada bagian sub ini akan dicoba dikaji bagaimanakah posisi Pariwisata Halal dalam kaitan dengan kebutuhan hidup manusia dalam kapasitasnya sebagai wisatawan. Dalam ajaran Islam, kebutuhan itu dapat dipetakan ke dalam tiga tingkatan, yakni primer (pokok-utama-dasar), sekunder (pendukung), dan tersier (pelengkap-penyempurna). Dikatakan primer, karena kebutuhan ini dalam keadaan apa pun dan di manapun harus terpenuhi agar manusia tetap bisa bertahan hidup. Contoh konkretnya adalah kebutuhan sandang, pakan, dan papan. Ini sejatinya kebutuhan pokok dan mendasar manusia yang harus terpenuhi. Jika tidak, maka manusia akan mengalami nasib fatal yang mungkin bisa mengalami kematian.

Selanjutnya, untuk kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan penunjang kemudahan dalam kehidupan. Maksudnya, dengan terpenuhinya kebutuhan ini, niscaya kehidupan manusia akan semakin mudah dijalani. Contohnya adalah kebutuhan alat transportasi dan komunikasi. Jika sekiranya kebutuhan ini dalam

keadaan normal, belum terpenuhi, niscaya manusia masih bisa mempertahankan hidupnya. Tidaklah sebagaimana kebutuhan primer yang selalu harus terpenuhi.

Berikutnya kebutuhan tersier yang fungsinya adalah sebagai pelengkap kebutuhan yang lain. Namun demikian dengan tertundanya pemenuhan kebutuhan pelengkap ini kiranya tidak akan banyak berpengaruh secara signifikan terhadap irama atau stabilitas kehidupan seseorang. Katakan saja melakukan wisata, kiranya dapat dikategorikan ke dalam kebutuhan yang ketiga ini.

Namun demikian perlu disadari bahwa berwisata pada hakikatnya merupakan kebutuhan psikis semua orang, karena dengan berwisata seseorang akan menambah kepuasan dalam kehidupannya. Dengan melalui wisata seseorang akan merasa ter-
cerahkan pikirannya dan akan merasakan tenang batinnya.³⁴

Sebab itu dalam kaitan wisata sebagai kebutuhan batin bagi seseorang, pada akhirnya kebutuhan berwisata itu tidak lagi sebagai kebutuhan tersier, namun bisa jadi meningkat kebutuhan sekunder. Atau, bahkan sebagai kebutuhan primer yang akan merasakan lebih bahagia sesuai status sosial seseorang.

G. Pariwisata Halal : Antara *Mashlahah* dan Fitrah

Muhammad Tahir ibn 'Asyur, dalam kitabnya *Maqashid al-Syariah* memetakan *mashlahah* menjadi empat bagian, yakni pertama, *mashlahah* dari aspek pengaruhnya terhadap tegaknya umat. Sedangkan yang kedua dilihat dari aspek relasinya dengan umat secara umum, kelompok (komunitas) maupun individu (personal). Adapun yang ketiga, *mashlahah* dilihat dari aspek terwujudnya

³⁴ Dalam kaitan ini, Murphy mengatakan bahwa pada dasarnya motivasi seseorang melakukan perjalanan dapat diklasifikasi menjadi empat kelompok besar, yakni physical or physiological motivation, cultural motivation, social motivation or interpersonal motivation dan fantasy motivation. Khusus untuk kelompok pertama antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai, dan sebagainya. Lihat, I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), 58

kebutuhan atau terhindarinya kerusakan (*mafsadah*) dan yang keempat, adanya *mashlahah* karena sebagai tujuan atau implikasi dari perbuatan.³⁵

Pertanyaan mendasar adalah, apakah pengembangan industri wisata halal telah sesuai dengan konsep *mashlahah* atau tidak, dalam arti dapat menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Dalam hal ini dapat digunakan analisis *mashlahah* dan hubungannya dengan masyarakat, yakni *mashlahat al-kulliyah* dan *mashlahat al-juz'iyah*. *Mashlahah* yang pertama adalah *mashlahah* yang kembali kepada masyarakat secara umum (luas). Sedangkan *mashlahah* yang kedua adalah *mashlahah* bagi perseorangan atau beberapa individu yang harus dijaga sesuai ketentuan-ketentuan muamalah.³⁶

Dilihat dari aspek *mashlahah*, kehadiran destinasi wisata halal diharapkan akan banyak memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat dalam arti luas, baik bagi para pengusaha maupun pengunjung yang pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD ini pada akhirnya akan berimbas pada kesejahteraan penduduk daerah di mana destinasi wisata halal dikembangkan.³⁷ Dan dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung merupakan indikator bahwa pengunjung merasa puas dengan segala macam objek yang disajikan dengan segala faktor pendukungnya. Sebab itu, jika sekiranya realitas menunjukkan demikian, maka secara *kulliyah* maupun *juz'iyah* kehadiran destinasi wisata halal telah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

Selanjutnya menurut konsep *maqashid al-'ammah* bahwa tujuan yang akan dibangun adalah berdasarkan *fitrah*. Yakni *fitrah* yang

³⁵ Muhammad Tahir ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syariah* (Yordania: Dar al-Nafais, 2001), 91

³⁶ Ismail al-Hasaniy, *Nadariyat al-Maqashid 'Inda al-Imam Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur* (Herdon: Al-Ma'had al-Islami li al-Fikr al-Islami, 1995), 90

³⁷ Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, yakni dampak terhadap penerimaan devisa, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, harga-harga, distribusi manfaat/keuntungan, kepemilikan dan kontrol, pembangunan pada umumnya, dan pendapatan pemerintah, Lihat kembali, Pitana dan Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, 109-110

secara umum menghendaki adanya persamaan, kebebasan, toleransi dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan umum syariah.³⁸ Dalam kaitan dengan fitrah ini Ibnu 'Asyur mempertegas bahwa segala perbuatan yang sesuai dengan akal sehat adalah termasuk fitrah. Sebaliknya jika kontra produksi dengan akal sehat, maka berarti telah menyimpang dari fitrah.³⁹ Bukankah fitrah itu adalah naluri manusia yang pada dasarnya selalu condong kepada kebaikan yang menjadi harapan semua orang.

Dalam kaitan dengan menjual jasa di bidang kepariwisataan, tentunya wisata halal tidaklah perlu melakukan diskriminasi terhadap para pengunjung. Dalam arti, siapa pun saja bebas menikmati tanpa dibatasi oleh suku, agama, ras, dan antargolongan apa pun. Jika tidak, samahalnya dengan melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini jelas, Islam, sangat menghormati hak asasi manusia, sebagaimana Deklarasi Kairo tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk di dalamnya adalah Indonesia.⁴⁰

Bukankah dunia wisata adalah sebatas muamalah yang mengatur hubungan antarmanusia, selama tidak ada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Mereka adalah sama, sehingga dengan demikian perlu dibangun sikap toleransi, saling menghormati, saling melindungi dan saling menghargai sejalan dengan fitrah manusia yang pada akhirnya akan menghasikan kemaslahatan dan kepuasan bagi wisatawan dalam menikmati pesona wisata halal di manapun dan kapanpun saja.

Itulah kiranya gambaran *moslem friendly tourism* yang harus menjadi ikon wisata halal sebagai wujud ekspresi bahwasanya kehadiran syariat Islam adalah merupakan *rahmatan lil 'alamin*

³⁸ al-Hasaniy, *Nadariyat al-Maqashid*, 273. Dalam hal ini lihat bandingkan dengan Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*.

³⁹ al-Hasaniy, *Nadariyat al-Maqashid*, 278. Selanjutnya lihat dan bandingkan pula, dengan Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, 136

⁴⁰ Dalam deklarasi itu ditegaskan bahwa "semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam. Satu-satunya ukuran, mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syariat Islam," lihat, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, 60

yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis serta menghargai eksistensi manusia. Hal ini sejalan dengan karakter ekonomi syariah yang *uluhiyyah, insaniyyah, akhlaqiyyah* dan *washatiyyah*.⁴¹ Tentunya, karakter ini, secara universal harus terimplementasi ke dalam atmosfer dunia wisata halal yang mengedepankan terciptanya kedamaian, keamanan, kenyamanan, kemaslahatan dan sebagainya sehingga para wisatawan akan mendapat kepuasan secara total. Inilah sejatinya fitrah ajaran Islam yang selalu mendorong tercapainya *mashlahah* di dalam kehidupan.

H. *Al-Dzari'ah* : Antara *Mashlahah al-Khashshah* dan *Mashlahah al-'Ammah*

Secara harfiah *dzari'ah* adalah jalan menuju sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kerusakan (*mafsadah*).⁴² Ibnu Qayim membedakannya ke dalam dua macam, yakni *saad al-dzira'ah* dan *fath al-dzira'ah*. *Saad dzira'ah* adalah sesuatu yang dilarang, sedangkan *fath al-dzira'ah* sesuatu yang dianjurkan.⁴³

Saad al-dzira'ah adalah melakukan suatu perbuatan yang mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kerusakan. Maksudnya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang semula dibolehkan karena mengandung kemaslahatan, namun tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kerusakan. Karena itu dilarang untuk dilakukan. Sedangkan *fath al-dzari'ah* adalah merupakan perbuatan yang dapat membawa kepada suatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan syara', seperti shalat, puasa, haji dan lain sebagainya.⁴⁴

Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *saad al-dzari'ah* dapat dijadikan hujjah dengan menyandarkannya kepada firman Allah

⁴¹ Lihat Yusuf Qardhawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (Kairo-Mesir: Maktabah Wahbah, 1995)

⁴² H. Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 243

⁴³ Ibid

⁴⁴ Baca, Ibid., 244

surat al-An'am, 108 yang artinya''' Janganlah kamu memaki sembahsan yang mereka sembah selain Allah karena nanti mereka akan memaki Allah dengan tanpa batas tanpa pengetahuan."'. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah dapat dijadikan hujjah hanya saja dalam hal-hal tertentu saja. Adapun untuk *fath al-dzari'ah*, para ulama sepakat dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.⁴⁵

Selanjutnya Ibnu Qayim memetakannya *dzari'ah* atas dua macam. Pertama, suatu pekerjaan, di mana kemaslahatannya lebih kuat dari kemafsadahannya, sedangkan yang kedua kemafsadahannya lebih kuat dari kemaslahatan yang ditimbulkan.⁴⁶ Khusus untuk yang kedua ini dapat dipetakan lagi ke dalam empat kemungkinan, yakni, a) secara sengaja pekerjaan ditujukan untuk kemafsadatan, seperti meminum minuman keras, b) pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, namun ditujukan untuk melakukan suatu kemafsadatan, c) pekerjaan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan kemafsadatan, namun biasanya akan berakibat pada suatu kemafsadatan, d) suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, ada kalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan⁴⁷

Lebih lanjut dalam kaitan dengan *dzari'ah* ini Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa membuka *dzari'ah* yang mengakibatkan kemaslahatan hukumnya wajib, walau asalnya dilarang atau mubah.⁴⁸ Karena itu dalam kaitan dengan membangun destinasi industri wisata halal baru yang membawa dampak kemaslahatan terhadap umat, maka bisa jadi hukumnya wajib, kendati hukum asalnya dilarang atau mubah. Dengan pertimbangan, karena secara global, industri pariwisata terus mengalami perkembangan secara signifikan dengan jumlah pengunjung yang semakin bertambah.

Namun perkembangan wisata yang saat ini banyak diminati tidak sedikit yang teralienasi dari nilai-nilai kebajikan sebagaimana

⁴⁵ Ibid., 246

⁴⁶ Ibid., 245

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, 140

yang diajarkan di dalam syariat Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Dunia wisata seakan-akan lepas sama sekali dari nilai-nilai ajaran spiritual sehingga mengakibatkan munculnya kerusakan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kerusakan itu telah banyak cukup lama menggerogoti eksistensi nilai-nilai kemanusiaan, karena telah sedemikian lama dialami sehingga tanpa disadari praktik itu dianggap benar secara syar'i.

Sebab itu jika muncul inisiasi secara personal, terlebih jika ada *good will* (program) dari pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mengembangkan destinasi wisata halal seperti saat ini, kiranya merupakan sebuah karya yang patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Membangun destinasi wisata halal secara langsung maupun tidak langsung samahalnya dengan telah turut menyelamatkan agama (akidah) para wisatawan Muslim sebagaimana yang diajarkan di dalam *maqashid al-syariah*.

Membangun destinasi wisata halal yang selama ini masih dalam fase perjuangan, niscaya akan memberi banyak dampak kemaslahatan, baik secara individual (*mashlahah al-khashshah*) maupun secara umum (*mashlahah al-'ammah*). Baik yang berupa materi maupun spiritual dengan panduan nilai-nilai syariah. Inilah sejatinya tujuan mulia dalam membangun wisata halal yang bernafaskan ajaran syar'i, yang semula hukumnya mubah atau bahkan terlarang, namun karena untuk mencegah terjadinya kerusakan umat yang semakin parah, pada akhirnya bisa menjadi wajib. Terlebih lagi jika destinasi itu banyak membawa manfaat (*mashlahah*) secara lahir maupun batin, baik bagi individu, masyarakat, maupun bagi bangsa dan Negara.

Dengan demikian *dzari'ah* dalam Islam dapat dijadikan landasan pertimbangan (terutama *fath dzari'ah*) untuk membangun destinasi wisata halal guna mengendalikan dampak negatif perkembangan wisata yang selama ini dianggap kurang memenuhi ketentuan syariah. Sekaligus untuk memenuhi tuntutan masyarakat global yang mulai menaruh minat terhadap wisata yang berbasis syariah.

Terlebih lagi jika kehadiran destinasi wisata baru itu akan banyak mendatangkan *mashlahah*, baik bagi individu maupun masyarakat luas di mana destinasi itu dikembangkan.

I. Sumber Daya Manusia: Pengawal *Maqashid al-Syariah* dalam Pariwisata

Sebagaimkana kita ketahui bahwasanya saat ini sektor pariwisata merupakan sebuah industri yang harus dikelola secara profesional sehingga dibutuhkan kehadiran sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.⁴⁹ Khusus untuk industri pariwisata halal, keberadaan SDM sangat dibutuhkan untuk mengawal segala aktivitas programnya agar bersesuaian dengan semangat ajaran *maqashid al-syariah* dalam Islam. Semakin kapabel SDM yang tersedia, maka berkecenderungan akan semakin cepat perkembangan pariwisata yang dikelolanya.

Adapun yang dimaksud SDM pariwisata di sini adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi alam untuk mencapai kesejahteraan yang seimbang dan berkelanjutan di bidang kepariwisataan.⁵⁰ Atau dengan kata lain, yakni “semua orang yang berkecimpung dan atau menyumbangkan tenaga dan pikirannya pada seluruh potensi yang terkandung di dalam usaha pariwisata demi tercapainya kesejahteraan dalam tatanan yang berkeeseimbangan dan berkelanjutan.”⁵¹

⁴⁹ Beberapa pakar seperti Wall, Murphy, Smith, Inskeep, Kadt, dan yang lain, hampir semuanya sepakat bahwa kepariwistaan adalah sebagai suatu industri, baik industri jasa perjalanan (*travel industry*) ataupun industri jasa yang menjual keramah tamahan (*hospitality industry*). yang menghasilkan produk yang bersifat spesifik dan tidak nyata (*intangible*). Tentu pula dengan karakter-karakter positif yang bersifat spesifik untuk membedakannya dengan jenis-jenis industri yang lain. Kiranya hal ini berlaku pula bagi pariwisata halal yang juga memiliki karakteristiknya yang berbeda pula jika dibandingkan dengan pariwisata yang konvensional. Untuk selanjutnya, lihat, Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2013), 32-33

⁵⁰ Lihat, *Ibid.*, 200-201

⁵¹ *Ibid.*, 201

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, SDM Pariwisata jika dikategorikan berdasarkan lembaganya dapat dipetakan sebagai berikut, yakni, 1). Institusi Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah; 2). Institusi Swasta/Industri; dan 3). Masyarakat.⁵²

Tentu saja ketiganya memiliki SDM dan kompetensinya sendiri-sendiri sesuai kapasitas masing-masing. SDM Pemerintah dari kalangan perguruan tinggi negeri misalnya, memiliki kompetensi sebagai akademisi atau peneliti.⁵³ Sedangkan dari kalangan institusi swasta/industri seperti dari masyarakat perguruan tinggi negeri atau lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat memiliki kompetensi sebagai akademisi atau peneliti dan teknokrat.⁵⁴

Adapun dari kalangan masyarakat, seperti pengusaha pariwisata, pengelola dari *top* hingga *low management* dan *craft level* selain juga harus profesional, juga sejatinya juga harus memiliki kompetensi berupa skill untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis dalam pariwisata.⁵⁵

Khusus untuk SDM industri pariwisata halal, selain memiliki kompetensi tersebut, juga diharapkan memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah Islam.⁵⁶ Untuk selanjutnya agar mereka mampu mengimplementasikan ajaran *maqashid al-syariah* ke dalam dunia pariwisata. Karena itu dari kalangan mereka dituntut agar memiliki komitmen dan integritas dalam turut mengawal pembumih *maqashid al-syariah* di kancah pariwisata sehingga pariwisata halal benar-benar mampu mengekspresikan ajaran syariah kapan pun dan di mana pun saja.

⁵² Ibid. Lihat pula Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

⁵³ Sunaryo, *Kebijakan pembangunan*, 201

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid., 202

⁵⁶ Lihat kembali Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No, 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

J. Catatan Akhir

Bertolak dari uraian di atas dapat dipahami bahwa bagaimanapun kehadiran pariwisata halal secara teoritik normatif butuh kawalan ajaran *maqashid al-syariah* agar pelaksanaan wisata benar-benar sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan dan diidealkan. Kesesuaian aktivitas wisata halal dalam realitas di lapangan dengan norma yang terkandung di dalam *maqashid al-syariah* mengindikasikan bahwa wisata itu benar-benar telah mengetarapkan prinsip yang disyariatkan. Bukanlah hanya sekadar kamuflase yang menyebabkan ketidakpuasan bagi wisatawan.

Katakan saja, jika wisatawan Muslim berkunjung ke sebuah destinasi wisata halal, namun pada suatu saat mereka sulit mendapatkan tempat shalat (masjid-mushala), atau pun jika fasilitas itu tersedia, namun kurang memadai, maka bukanlah tidak mungkin mereka akan merasakan kekecewaan. Demikian pula jika fasilitas restoran halal yang mereka butuhkan tidak atau belum tersedia, kiranya juga berpotensi melahirkan rasa kecewa yang sama. Sekiranya ada, namun belum secara transparan mencantumkan label halal sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan-perundangan.

Demikian pula jika faktor keamanan yang kurang terjamin yang menyebabkan para pengunjung merasa tidak aman, maka dampaknya bisa jadi sama dengan kedua fasilitas di atas. Ini semua tentu merupakan tantangan bagi pengelola destinasi wisata halal agar para wisatawan merasa enjoy dan aman sesuai yang diharapkan.

Bukankah kata kunci kepuasan wisatawan berkunjung ke sebuah destinasi wisata adalah adanya pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Kebutuhan dimaksud baik yang berkaitan dengan masalah spiritual, sosial, keamanan, kenyamanan dan lain sebagainya. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, kebutuhan spiritual antara lain adalah pemenuhan fasilitas ibadah, makanan dan minuman halal.

Namun di sisi lain para wisatawan beserta keluarga juga merasa aman dari segala bentuk ancaman bahaya sekecil apa pun. Bahkan, sebaliknya, justru dengan berwisata mereka akan merasa memetik banyak *'ibrah* dan wawasan baru sehingga bisa men dorong mereka untuk berinovasi dan berkreasi untuk kepentingan diri dan orang lain ke depan.

Selain itu yang tidak kalah krusialnya adalah para pengelola perlu bersikap proporsional, antara lain dalam kaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengunjung. Di samping perlu ada transparansi, juga perlu ada kesesuaian harga dengan segala fasilitas dan atraksi yang disajikan. Karenanya bagaimanapun juga dapat dikatakan kurang fair atau berlebihan, jika sekiranya secara finansial akan merugikan para pengunjung.

Itulah yang dimaksud bagaimanakah sistem pengelolaan industri pariwisata halal dalam perspektif *maqashid al-syariah* yang pada prinsipnya harus melindungi agama, jiwa, akal, keluarga dan harta wisatawan sebagaimana tercermin dalam uraian di atas.

Pariwisata Halal: Perspektif Ekonomi Islam

A. Pengantar

Sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi dalam sistematika ajaran Islam masuk ke dalam kajian muamalah yang membicarakan hubungan antarmanusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk di dalamnya industri wisata sebagai salah satu aktivitas sektor riil yang turut menentukan kemajuan ekonomi sebuah negara.

Secara sederhana ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup yang tak terbatas dengan cara mengelola sumber daya yang terbatas. Pengertian ini bertolak belakang dengan batasan menurut ekonomi Islam, yakni untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas dengan cara mengelola sumber daya yang tak terbatas.

Islam memandang bagaimanapun kebutuhan manusia adalah terbatas dan terukur, sedangkan yang tidak terbatas adalah keinginan yang tidak terukur. Jika manusia dikendalikan oleh keinginan hawa nafsunya, maka berpotensi mencari harta sebanyak-banyaknya yang tidak mengenal batas,¹ dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, norma etika dan hukum yang sejatinya wajib dijunjung tinggi oleh siapa pun.

Industri pariwisata halal yang pada dasarnya berpijak pada prinsip-prinsip syariah, para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, seyogianya tidak terjebak kepada kepentingan yang justru kontraproduksi dengan misi suci yang tersirat dalam makna halal dalam arti luas.

Sebab itu bagaimanakah sebaiknya mengelola destinasi wisata halal yang baik dan berkeadaban menurut perspektif ekonomi Islam.

B. Karakteristik Ekonomi Islam: Pandangan Antarpakar

Predikat kata “Islam” dalam istilah ekonomi Islam, tentu akan membawa konsekuensi atau makna yang berbeda dengan pengertian ekonomi konvensional pada umumnya. Islam sebagai agama langit bersumber pokok pada wahyu, yakni al-Qur’an dan Hadits Rasulullah saw. Sebab itu antarkeduanya secara prinsip memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi menyatakan, pada dasarnya karakter ekonomi Islam meliputi empat nilai, yakni *uluhiyyah*, *insaniyyah*, *akhlaqiyyah*, dan *washatiyyah*.² Sedangkan menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ciri ekonomi Islam, meliputi kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*al-’adl wa al-ihsan*), kehendak bebas (*ikhtiyar*), dan

¹ Dalam kaitan ini bandingkan dengan pernyataan al-Qur’an, Surat At Takaatsur, 102:1-2

² Yusuf Qardhawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (Kairo-Mesir: Maktabah Wahbah, 1995)

tanggung jawab (*fardh-responsibility*).³ Bahkan Adiwarmman A. Karim melengkapi karakter tersebut, antara lain *tawhid*, *'adl*, *khilafah*, *nubuwwah*, dan *ma'ad* (*return*).⁴

Bertolak dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa paling tidak ekonomi Islam memiliki ciri, yakni ketuhanan (*uluhiyyah-rububiyyah*), kemanusiaan (*insaniyyah*), norma etika (*akhlaqiyyah*), keseimbangan (*washatiyyah*), kehendak bebas (*ikhtiyar*), dan tanggung jawab (*masuliyyah*) bagi pelakunya. Nilai-nilai inilah sejatinya yang wajib dipatuhi oleh pemangku kepentingan wisata halal agar tidak terjebak ke dalam praktik wisata sekuler yang teralienasi dari nilai-nilai transenden. Karena bagaimanapun apa yang diperbuat kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.

Bukankah manusia pada saatnya akan kembali kepada Tuhan selaku Pencipta, sekaligus Pemilik kehidupan. Agar manusia dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama di dunia, maka secara teologis mereka wajib mengacu pada apa yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Tanpa kecuali tanggung jawab dalam urusan bisnis dalam bentuk apa pun. Industri pariwisata halal pada dasarnya adalah merupakan salah satu bentuk aplikasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam dunia riil.

Tentu saja bagi siapa pun yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, niscaya ia akan dapat meraih *falah* di akhirat karena di dunia ia telah mampu menata kehidupan sesuai prinsip syariah.⁵ Inilah sejatinya yang menjadi tujuan daripada ekonomi

³ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society* (London and New York: Kegan Paul International, 1994)

⁴ Adiwarmman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002), Lihat dan bandingkan dengan Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi Menyingkap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi*, edisi revisi (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 198

⁵ *Falah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah ini menurut Islam diambil dari kata-kata al-Qur'an yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat. Dengan demikian dalam pengertian *falah*, tidak hanya dipandang dari aspek material semata, namun justru juga ditekankan pada aspek spiritualitasnya. Sebab itu dalam konteks dunia, *falah* merupakan konsep yang multidimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual (mikro) maupun perilaku kolektif (makro). Lihat, dalam P3EI

Islam yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh para pelaku bisnis.⁶ Termasuk di dalamnya dalam upaya pengembangan industri pariwisata, di mana pun dan kapan pun saja secara universal.

C. Relasi Pariwisata Halal dengan Nilai-nilai *Rububiyyah (Uluhiyyah)*

Nilai-nilai tauhid atau ketuhanan (*rububiyyah-uluhiyyah*) dalam ekonomi Islam pada dasarnya menjadi kausa prima nilai-nilai karakter yang lain.⁷ Sebab itu posisi *rububiyyah* itu mendahului urutan posisi-posisi yang lain. Ini menunjukkan bahwa betapa penting nilai *rububiyyah* di antara nilai-nilai turunan yang lain.

Bahkan nilai *rububiyyah* itu merupakan kausa prima nilai-nilai turunan tersebut. Artinya, jika para pemangku kepentingan industri wisata imannya kokoh, niscaya mereka akan menghargai martabat wisatawan selaku manusia yang wajib dihormati dan dilayani secara maksimal. Mereka juga akan memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai moral dan sterusnya.

Atau dengan kata lain, sejatinya aktivitas ekonomi (baca: bisnis-industri) yang bertolak dari nilai-nilai *rububiyyah* yang berasaskan akidah, menurut Qardhawi, akan mengarahkan para pelakunya kepada suasana atmosfer aktivitas ekonomi yang berdasarkan pada iman (*tawhid al-Ilah*).⁸ Untuk itu Qardhawi secara tegas menyatakan bahwa pengawasan iman harus didahulukan sebelum pengawasan raja (penguasa-manusia).⁹ Ini mengandung makna bahwa bagi setiap pelaku bisnis Muslim bagaimana pun perasaan berimannya

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 2. Selanjutnya, lihat dan bandingkan dengan Muhammad Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Globalisasi*, edisi revisi (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 154-157

⁶ P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi*, 54

⁷ Qardhawi, *Dawr al-Qiyam*, 25. Lihat Pula Muhammad Djakfar, *Agama*, 63

⁸ Dalam, Djakfar, *Agama*, 65

⁹ Ibid.

seyogianya menjadi pengendali utama dalam melaksanakan aktivitas bisnis.

Selain itu, sebagai pelaku, mereka perlu juga menyadari bahwa apa yang dikelola dalam industri bisnis wisata pada hakikatnya adalah milik Allah selaku Pemilik Mutlak.¹⁰ Sebab itu mereka kelak harus mempertanggung jawabkan segala apa yang telah dilakukan. Mereka seyogianya menyadari pula, bahwa Tuhan Maha Mengetahui dan Maha Melihat dengan sangat teliti atas segala perbuatan para makhluk-Nya, sehingga tidak ada alasan apa pun untuk menghindar dari kekuasaan-Nya.

D. Pariwisata Halal : Wahana Ukhuwah Universal (Insaniyyah)

Sebagaimana telah disinggung sebelum ini, bahwasanya wisata halal dalam sistematika ajaran Islam masuk dalam ranah kajian muamalah yang mengatur interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain secara universal. Universal di sini dimaksudkan bahwa dalam melakukan muamalah tidak dibatasi oleh isu SARA sempit yang berpotensi bersifat eksklusif yang kurang menguntungkan secara bisnis.

Karena itu wisatawan dalam pariwisata halal, tidaklah dibatasi oleh faktor perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. Jika terjadi pembatasan, tentu saja kontraproduksi atau bertentangan dengan watak dasar ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* bagi seluruh kehidupan di dunia.

Bukankah industri wisata halal merupakan ekspresi ajaran *rahmathan lil 'alamin* itu, sekaligus merupakan wahana melakukan silaturahmi antarmanusia yang berbeda dalam berbagai aspek,

¹⁰ Djakfar, *Wacana*, 106-109. Kendati Tuhan sebagai Pemilik Mutlak, tidaklah berarti manusia dilarang untuk menguasai harta kekayaan yang diupayakannya secara halal, karena bagaimanapun hak kepemilikan itu merupakan fitrah dalam diri manusia. Lihat, M. Mutawalli Sya'rawi, *Islam di antara Kapitalisme dan Komunisme*, ter.H. Salim Basyarahil (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 13

Sebab itu, di sinilah arti penting pelaku pariwisata halal men gedepankan nilai-nilai kemanusiaan itu secara universal, antara lain dengan cara memberi pelayanan secara prima dan maksimal agar wisatawan merasakan kepuasan.

Setiap individu (wisatawan) adalah bagian integral dari komunitas yang saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Sebab itu, sebagai kesatuan hubungan sosial, Islam menjanjikan hak dan kewajiban perseorangan secara berkeseimbangan,¹¹ sehingga dengan demikian wisatawan akan merasa aman, tenang dan nyaman dalam melakukan wisata.

Itu semua dapat terjadi karena adanya saling menghormati martabat masing-masing dalam melakukan interaksi yang bersahabat yang sangat ditekankan dalam Islam.

E. Pariwisata Halal : Butuh Panduan Nilai-nilai Etis (Akhlaqiyyah)

Rasulullah saw menyatakan bahwa beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak.¹² Dalam hal ini Allah swt sendiri memuji beliau sebagai manusia yang memiliki keagungan akhlak.¹³ Sebab itu kita selaku umatnya wajib merefleksikan sifat terpuji beliau ke dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini diperkuat oleh Yusuf Qardhawi yang secara tegas menyatakan bahwa segala aspek kehidupan ini tidak lepas dari nilai-nilai akhlaki.¹⁴

Pada dasarnya pernyataan Qardhawi tersebut menerjemahkan ajaran Rasulullah saw di atas dalam ranah kehidupan. Oleh sebab

¹¹ Mahmud Abu Saud, *GBEI Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, ter. Achmad Rais (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 19

¹² Lihat, Muhammad al-Ghazali, *Khuluq al-Muslim* (Dar al-Kutub al-Haditsah, 1964 M), 6

¹³ Lihat QS. al-Qalam, 68:4. Ayat ini dinilai sebagai konsiderans pengangkatan Nabi Muhammad saw sebagai Rasul. Lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Jakarta: Penerb it Mizan, 1996), 253

¹⁴ Lihat kembali, Qardhawi, *Dawr al-Qiyam*, 57 dan dalam Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penebar Plus, 2012), 29

itu mengimplementasikan nilai-nilai akhlak ke dalam industri pariwisata halal adalah merupakan keniscayaan. Wujudnya, antara lain berkaitan dengan masalah pelayanan dan masalah lain yang berkaitan dengan aktivitas wisata secara luas. Artinya, tidak ada satu pun aktivitas dalam wisata halal yang bebas nilai, semuanya tetap dalam bingkai nilai-nilai dari ajaran akhlak.

Dalam kaitan ini patut menjadi renungan kita bersama apa yang dikemukakan Monzer Kahf yang menyatakan bahwa:

“Sistem ekonomi Islam sering ditampilkan sebagai pemikiran jalur ketiga. Dua macam sistem ekonomi lainnya, yakni kapitalisme dan komunisme dikutuk oleh para pembela alternatif Islami sebagai sistem ekstremis ke kiri atau ke kanan dan karena itu menimbulkan bias dalam solusi-solusinya.”¹⁵

Selanjutnya, ia menyatakan:

“Banyak contoh yang bisa disebut dalam hal ini dari pengalaman historik Eropa Barat dan Amerika Serikat sejak masa revolusi industri hingga sekarang. Contoh-contoh ini akan dengan jelas menunjukkan betapa destruktif dan amoralnya kebebasan yang tidak terbatas ketika ia tidak diisi dengan kerangka kerja keagamaan.”¹⁶

Inti dari pendapat Kahf di atas mengisyaratkan bahwa bagaimanapun kebebasan itu harus terkendali (terbatas) karena jika tidak, maka akan menimbulkan dampak yang merusak. Namun demikian di sisi lain perlu ada pengendali moral yang bersumber dari agama. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya aktivitas bisnis secara universal tidak bisa lepas dari nilai-nilai moral, sebagaimana yang telah dipertegas oleh Qardhawi sebelum ini.

Pendapat Qardhawi itu sejalan dengan pendapat Richard T. De George dalam sebuah bukunya yang berjudul *Business Ethics*. Dalam buku ini secara tegas dinyatakan bagaimana relasi bisnis dengan moral (*the relation of business and morality*).¹⁷

¹⁵ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, ter. Machnun Husein (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), 181

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Richard T. De George, *Business Ethics* (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1999), 11-17

Karena itu agar aktivitas pariwisata halal tetap berjalan sesuai karakternya yang berbeda dengan pariwisata konvensional, maka tentu saja butuh panduan norma-norma etis sesuai cara kerja Islami.

F. Antara Korporat dan Konsumen: Perlu Keseimbangan (*Washatiyyah*)

Destinasi pariwisata halal sebagai sebuah industri, tujuan utamanya adalah men dapatkan keuntungan (profit) secara materi sebagaimana bisnis pada umumnya. Tujuan seperti ini tentu saja sah-sah saja. Namun demikian, Islam mengajarkan bahwa bagaimanapun korporat tidak selayaknya hanya mendahulukan kepentingannya sendiri, tanpa peduli pada kepentingan *stakeholder* yang harus dihargai dan dilindungi.¹⁸

Jika korporat lebih tertuju pada kepentingannya sendiri, maka akan berpotensi munculnya praktik bisnis yang tidak fair, melanggar tatanan hukum dan etika yang sejatinya harus dijunjung tinggi. Sebab itu dewasa ini untuk mengendalikan ego sektoral korporat itu pemerintah mewajibkan setiap perusahaan besar agar menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Itulah sejatinya sejalan dengan watak dasar ajaran ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan secara proporsional yang seyogianya juga perlu diimplementasikan ke dalam dunia pariwisata halal. Keseimbangan di sini dimaksudkan bahwasanya dalam pariwisata yang berbasis syariah tidaklah cukup hanya mengejar kepuasan lahiriah semata bagi wisatawan dalam bentuk atraksi yang menarik. Namun juga perlu memperhatikan kepuasan dalam arti spiritual seperti penyediaan tempat ibadah

¹⁸ Dalam hal ini, bandingkan dengan pernyataan Muhammad Nejatullah Siddiqi yang menyatakan bahwa mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan diri sendiri merupakan prinsip teori sosial Islam. Jika prinsip ini diaplikasikan ke dalam dunia pariwisata halal: "Hendaknya kepentingan para wisatawan itu perlu diprioritaskan daripada kepentingan korporat (usaha). Lihat, Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economics Enterprise in Islam* (Lahore: Islamic Publication Ltd, 1979), 41

yang layak dan representatif. Tanpa kecuali ketersediaan hotel dan retorasi yang benar-benar syar'i dan lain sebagainya.

Kendati Islam membiarkan lahirnya materialisme, sebagaimana yang dapat kita amati saat ini, namun demikian sistem itu menurut Qardhawi harus berdasarkan kekuatan wahyu yang diturunkan.¹⁹ Inilah yang dimaksud perlu adanya keseimbangan antara yang material (lahir) dengan yang spiritual (batin-transenden) yang harus mewarnai dunia pariwisata halal.

G. Pariwisata Halal : Antara Kehendak Bebas dan Tanggung Jawab (*Masuliyah*)

Pada prinsipnya Islam memberi kebebasan kepada umat manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah di muka bumi untuk melakukan usaha demi kelangsungan hidupnya.²⁰ Hanya saja kebebasan itu tidak dalam arti yang sebebas-bebasnya yang tanpa batas. Karena bagaimanapun harus tetap dalam koridor ketentuan syariah sebagaimana yang telah diajarkan. Manusia bebas memilih bisnis apa pun yang akan ditekuni, karena ini merupakan indikasi adanya kebebasan terbatas menurut ajaran Islam. Katakan saja memilih bisnis industri pariwisata halal dengan pertimbangan karena saat ini merupakan bisnis yang banyak dikembangkan di berbagai negara di dunia.

Namun demikian perlu disadari bahwa bisnis yang menjadi pilihan itu tidaklah bebas nilai. Terlebih lagi dimaknai bebas dari pengawasan Allah swt, sehingga dengan dalam menjalankan amanah itu para pemangku kepentingan wisata halal wajib mempertanggungjawabkan amanah yang dibebankan.²¹ Baik terhadap konsumen

¹⁹ Dalam, Djakfar, *Agama*, 70

²⁰ Lihat dan bandingkan dengan, Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, ter. Samson Rachman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 93-99

²¹ Tentu saja bagi yang amanah dalam mengelola industri akan mendapat pahala (*reward*), sedangkan yang tidak amanah akan mendapat hukuman (*punishment*). Sebab itu menurut Mustaq Ahmad, ada sekitar 30 ayat dalam al-Qur'an tentang pahala yang melimpah bagi yang berperilaku baik. Sebaliknya, ada 14 ayat yang dengan tegas menyatakan bahwa

(wisatawan), terlebih lagi kelak di hadapan Allah swt.

H. Catatan Akhir

Mengkaji industri pariwisata halal menurut perspektif ekonomi Islam yang bersumber pokok pada ajaran wahyu pada hakikatnya adalah ingin menggugah kesadaran kita, terutama bagi para pemangku kepentingan wisata. Mereka yang bergelut dalam dunia pariwisata, terutama wisata halal, perlu diingatkan bahwa industri yang dikelolanya pada hakikatnya adalah amanah dari Pemilik Mutlaknya, yakni Allah swt.

Karena itu, pemangku kepentingan dalam statusnya sebagai pemegang amanah, sekaligus pemilik sementara, bagaimanapun mereka kelak wajib mempertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Sebab itu dalam melakukan pengelolaan industri pariwisata halal, para pengelola wajib mengikuti segala ketentuan-Nya. Antara lain, mereka wajib memanusiakan atau memartabatkan wisatawan dengan memberikan apa yang menjadi haknya dan memberikan perlindungan secara maksimal selama melakukan wisata. Selain juga harus bersikap adil secara proporsional, dan memberi pelayanan dengan berprinsipkan norma dalam Islam.

Namun demikian untuk mewujudkan itu semuanya bagaimanapun kehadiran negara merupakan keniscayaan di dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator dan pengawasan di wilayah yurisdiksinya.²² Keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata misal nya niscaya belum dianggap memadai dalam mengatur gerak industri pariwisata yang berbasis syariah di Indonesia.

Demikian pula dari aspek syariah, kehadiran Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan

tindakan jahat dan keji akan mendapat siksa. Lihat Ahmad, *Etika Bisnis*, 49

²² Ibid., 157-163

Prinsip Syariah kiranya juga belum memadai pula. Sehingga dengan demikian, ke depan, masih dibutuhkan lahirnya perundangan yang secara spesifik mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan industri pariwisata halal di Indonesia.

Adanya payung hukum sejatinya akan menjamin kepastian bagi semua pihak dalam upaya membangun industri pariwisata halal yang saat mulai banyak dikembangkan. Sekaligus untuk memperkuat pembumian nilai-nilai ekonomi Islam dalam ranah pariwisata halal yang diidealkan .

Bab VI

Pariwisata Halal: Perspektif UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

A. Pengantar

Sebagaimana kita pahami bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada kita bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaannya.¹ Karena itu untuk menjamin setiap pemeluk agama agar dapat melakukan ibadah dan menjalankan ajaran agamanya, maka bagaimanapun negara wajib melindungi dan menjamin kehalalan setiap produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.²

Perlu diakui bahwasanya produk yang beredar selama ini di masyarakat belumlah semuanya terjamin

¹ Lihat dalam konsideran “Menimbang,” dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

² Ibid.

kehalalannya secara syar'i.³ Di samping pengaturan mengenai kehalalan suatu produk belum terjamin kepastian hukumnya sehingga perlu diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan secara nasional.

Itulah dasar pertimbangan yang menjadi alasan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia, sebagaimana yang tertuang di dalam klausula menimbang. Oleh karena undang-undang ini bersifat umum, maka tentu saja berlaku pula untuk industri pariwisata halal yang harus steril dari segala hal yang haram berdasarkan syariah.

Adapun relevansinya undang-undang tersebut dengan wisata halal, antara lain adalah karena menyentuh berbagai kebutuhan wisatawan (Muslim) seperti tempat penginapan, restoran, kolam renang, spa dan faktor pendukung lain sebagainya. Selama di hotel, mereka dijamu makanan dan minuman sesuai fasilitas yang disediakan yang kesemuanya harus dijamin kehalalannya.⁴

Demikian pula untuk restoran atau rumah makan dengan segala macamnya yang dijual kepada wisatawan selaku konsumen harus jelas pula kehalalannya agar mereka tidak tercederai akidahnya karena telah menikmati produk yang haram dikonsumsi.⁵ Keharaman produk itu baik yang berkaitan dengan bahan baku maupun proses pembuatannya.⁶ Sebab itu untuk menjamin kehalalan itu diperlukan kejujuran, keterbukaan dan niat baik para pelaku usaha, produsen

³ Dalam mengkonsumsi makanan misalnya, umat Islam (Muslim) harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat. Antara lain sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah swt, Surat al-Baqarah, 2:168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Substansi ayat ini adalah merupakan prinsip yang mendasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun bagi yang beriman kepada Allah swt.

⁴ Dalam hal ini periksa, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

⁵ Lihat kembali dan bandingkan dengan, Ibid.

⁶ Dalam hal ini lihat, Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, edisi revisi (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), 227-229

maupun para penjual dalam memproduksi dan menjual segala macam produk kepada wisatawan yang berkunjung.⁷

Kejujuran adalah merupakan sikap subjektif yang sulit dibuktikan keabsahannya sehingga dengan demikian perlu didukung pula dengan niat baik dan tulus dari para produsen dalam mengeluarkan sebuah produk agar konsumen tidak merasa tertipu. Sedangkan keterbukaan antara lain dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal dari badan yang berwenang bagi setiap produk yang dimakan, diminum dan dipakai oleh pengunjung.

Pada bagian ini akan dikaji tentang tujuan diundangkannya Jaminan Produk Halal. Tujuan ini niscaya akan dapat tercapai jika didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, utamanya pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, disusul yang berkaitan dengan adanya keharusan untuk mencantumkan label halal pada setiap kemasannya.

Berikutnya dikaji pula tentang pelaku usaha yang mempunyai peran penting terhadap kehalalan setiap produk yang dalam hal ini dapat dilakukan pengawasan melalaui peran serta masyarakat. Karena itu setiap produk yang terbukti melawan ketentuan undang-undang tersebut akan terkena sanksi bagi pelakunya. Inilah gambaran sekilas terkait dengan bagian kajian ini, sekaligus akan menunjukkan bagaimanapun kehadiran undang-undang jaminan produk halal sangat dibutuhkan untuk pengembangan industri pariwisata halal di Indonesia.

B. Tujuan Jaminan Produk Halal: Menuju Kepastian Hukum

Lahirnya sebuah produk hukum pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai demi kepeningan masyarakat secara umum. Tanpa kecuali lahirnya undang-undang tentang jaminan produk halal (JPH).

⁷ Bandingkan dengan Ibid., 421

Undang-undang diciptakan untuk mengatur perilaku manusia agar hidup tertib dan aman dalam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, antara komunitas yang satu dengan yang lain. Demikian seterusnya.

Namun demikian yang paling pokok kelahiran perundangan itu adalah terjaminnya kepastian hukum bagi masyarakat. Artinya, jika kepastian hukum itu terjamin, maka para subjek hukum akan merasa aman, tenteram, tenang, dan nyaman untuk melakukan perbuatan hukum dalam kaitan dengan aktivitas wisata, karena mereka terbebas dari keraguan tentang ancaman hukuman yang akan diterima.

Karena itu dalam Pasal 3, ditegaskan, bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk;
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Sejatinya, *mafhum mukhalafah* yang tersirat dalam pasal tiga di atas sudah pasti adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengonsumsi sebuah produk, baik dalam bentuk makanan, minuman, atau alat-alat kosmetika. Karena ketiga produk inilah yang banyak dibutuhkan sehingga banyak diproduksi dan dijual guna memenuhi kebutuhan pasar.

Di dalam dunia pariwisata produk-produk semacam itu pasti dibutuhkan oleh wisatawan Muslim, terutama untuk makanan dan minuman sebagai kebutuhan primer bagi mereka. Baik yang disajikan di hotel di mana mereka menginap maupun yang ada di restoran yang tersedia.

Selanjutnya yang dimaksud dengan meningkatnya nilai tambah dalam huruf b tersebut adalah nilai tambah secara ekonomi karena konsumen (pengguna produk) merasa ada perlindungan secara

hukum. Dengan demikian dengan kehadiran perundangan JPH akan menguntungkan tidak saja bagi produsen, namun juga bagi konsumen. Artinya, dalam dunia wisata, adanya perundangan ini tidak saja menguntungkan para pemangku kepentingan, namun juga bagi wisatawan Muslim dalam melindungi keyakinannya.

Inilah sejatinya tujuan yang ingin diraih kehadiran undang-undang tentang JPH yang pada dasarnya adalah ingin melindungi masyarakat Muslim agar terhindar dari segala hal yang kontra produkai dengan prinsip syariat. Demikian juga aktivitas dalam dunia pariwisata yang berpredikat halal.

C. Pelaku Usaha: Antara Hak dan Kewajiban⁸

Selanjutnya dalam Bab IV Pasal 23-28 diatur tentang Pelaku Usaha yang di dalamnya diatur mengenai hak yang dapat diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia (Bab I Pasal 1 Butir 12). Tentu saja, Pelaku Usaha yang dimaksud dalam undang-undang ini dapat diberlakukan untuk Pelaku Usaha di dalam industri pariwisata halal yang mengelola sebuah usaha.

Pelaku Usaha berhak memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; b. pembinaan dalam memproduksi produk halal; dan pelayanan untuk mendapatkan Sertifikasi Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif (Pasal 23).

⁸ Pelaku usaha dalam industri pariwisata halal adalah ibarat produsen atau penjual, sedangkan wisatawan adalah ibarat konsumen atau pembeli. Karena itu kedua pihak tersebut harus seimbang hak dan kewajibannya. Jika ditarik ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, silakan baca Bab III: Hak dan Kewajiban. Dalam bab ini Bagian Pertama mengatur Hak dan Kewajiban Konsumen (Pasal 4-5), sedangkan Bagian Kedua mengatur Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 6-7)

Selain itu beberapa kewajiban yang wajib dipatuhi oleh Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikasi Halal meliputi: a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian antara Produk Halal dan yang tidak halal; c. memiliki Penyelia Halal; dan d. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara JPH (Pasal 24).

Untuk itu, bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikasi Halal diwajibkan mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikasi Halal, menjaga kehalalan produk, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan yang tidak halal. Selain itu, ia wajib memperbarui Sertifikasi Halal jika telah berakhir dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara JPH (Pasal 25).

Ada perkecualian, jika Pelaku Usaha memproduksi dari bahan yang diharamkan, maka ia tidak wajib mengajukan permohonan Sertifikasi Halal. Namun demikian ia tetap wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada setiap produk yang disajikan atau dijual (Pasal 26). Hal ini dimaksudkan agar konsumen, dalam hal ini wisatawan Muslim mudah untuk membedakannya dengan yang halal yang dapat dikonsumsi.

Dalam kaitan dengan sanksi ditetapkan, bagi Pengusaha yang melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ia akan dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis, b. denda administratif, atau c. pencabutan Sertifikat Halal (Pasal 27, Ayat 1).

Demikian pula bagi Pengusaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Ayat 2, dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan, b. peringatan tertulis, atau c. denda administratif (Pasal 27, Ayat 2).

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 huruf c bahwa Pelaku Usaha wajib memiliki Penyelia Halal yang bertugas untuk: a. mengawasi PPH (Proses Produk Halal); b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; c. mengkoordinasikan PPH, dan d. mendampingi Auditor Halal LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) pada saat pemeriksaan (Pasal 28, Ayat1).

Selanjutnya, dalam Pasal 28 Ayat 2 dikatakan bahwa Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; dan b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

Perlu diingatkan kembali bahwa relevansi pasal-pasal ini dengan industri pariwisata halal adalah karena di dalamnya mempertegas dan menetapkan masalah hukum halal dan haram yang terkait langsung dengan keyakinan para wisatawan yang wajib dilindungi para pelaku usaha wisata.

Para wisatawan yang menginap di sebuah hotel syariah misalnya, mereka perlu mendapat fasilitas yang berkaitan dengan perangkat mandi, fasilitas makan dan minum dan lain sebagainya yang kesemuanya itu harus halal hukumnya untuk dikonsumsi.

Demikian pula jika mereka masuk ke sebuah restoran syariah, kehalalan semua produk yang disajikan bagaimanapun harus sesuai dengan tuntunan pasal-pasal sebagaimana yang telah diatur dalam perundangan JPH ini.

D. Label Halal: Bukti Keabsahan Suatu Produk

Dalam ketentuan umum (Bab I Pasal 1) ditegaskan bahwa Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal (Butir 5). Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Pekerja Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Butir 10).

Sertifikasi Halal adalah merupakan pengakuan secara yuridis yang sudah barang tentu berbeda dengan apa yang disebut Label Halal. Label Halal adalah merupakan tanda kehalalan suatu produk (Butir 11). Dengan demikian Label Halal adalah merupakan bentuk fisik sebagai bukti keabsahan suatu produk yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara JPH secara nasional (Pasal 37).

Bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada a. kemasan produk; b. bagian tertentu dari produk; dan /atau c. tempat tertentu pada produk (Pasal 38).

Adapun pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tersebut harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak (Pasal 39). Dengan adanya ketentuan ini, maka konsumen akan dengan mudah membacanya sehingga tidak akan ragu lagi untuk mengkonsumsinya.

Selanjutnya bagi Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 akan dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. pencabutan Sertifikasi Halal (Pasal 41).

Bertolak dari beberapa ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Label Halal adalah merupakan salah satu kewajiban bagi para pengusaha yang berfungsi sebagai petunjuk yang mengindikasikan bahwa suatu produk halal untuk dikonsumsi. Ketentuan ini wajib dipatuhi oleh pemangku kepentingan, khususnya pengusaha industri pariwisata halal yang tidak jarang berkaitan dengan masalah produk makanan dan minuman. Antara lain pengusaha perhotelan, restoran, dan lain-lainnya.

Jika sekiranya ketentuan-ketentuan itu tidak dipatuhi, maka selain dikenai sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan, pada akhirnya juga akan menciderai predikat halal yang melekat pada kata pariwisata itu sendiri. Bukankah undang-undang ini merupakan uger-uger yang wajib dipahami dan wajib dipatuhi oleh para

pengusaha industri pariwisata halal untuk melindungi kepentingan wisatawan Muslim secara syariat.

E. Peran Serta Masyarakat: Perlu Dukungan Semua Pihak

Perlu diakui, bagaimanapun peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia, terlebih lagi dari kalangan Muslim sendiri yang dikenal sebagai mayoritas.⁹ Masyarakat adalah sekelompok kumpulan manusia yang di dalamnya ada strata sosial yang menjalankan peran masing-masing. Antara lain sebagai guru (dosen) yang tugas utamanya adalah mengajar anak didik, ulama (kyai) yang tugas pokoknya adalah memberi pencerahan masalah agama, ada tokoh politik (politikus) yang fungsinya sebagai pengambil kebijakan bersama para pejabat pemerintahan. Selain itu ada pengusaha yang tugasnya melakukan usaha atau bisnis di tengah masyarakat.

Sejatinya, mereka itu bisa mengambil peran atau inisiasi untuk turut mensosialisasikan isi undang-undang JPH agar dikenal oleh masyarakat luas, baik melalui ceramah di tempat-tempat ibadah bagi yang berstatus sebagai penceramah (ulama-ustadz). Atau juga melalui aktivitas belajar mengajar di sekolah atau di pondok pesantren, bagi para pemangku pesantren (kyai), melalui proses belajar mengajar di sekolah bagi guru dan dosen, dan lain sebagainya.

Peran serta masyarakat dimaksud di dalam undang-undang ini diatur di dalam Bab VIII, Pasal 53-55. Khusus dalam Pasal 53 dikatakan:

⁹ Yang dimaksud dengan masyarakat dalam wisata halal adalah para wisatawan yang sangat diharapkan partisipasinya turut melakukan pengawasan. Dalam hal ini wisatawan berhak menuntut apa yang menjadi haknya, jika sekiranya terjadi ketidakadilan, termasuk jika terjadi penyimpangan dari prinsip syariah. Misalnya hak pelayanan secara syariah dalam bentuk ketersediaan tempat ibadah, tersedianya makanan dan minuman halal dan lain sebagainya.

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
 - b. Mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar
- (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH (Badan Penyelenggara JPH)

Selanjutnya dalam Pasal 54 dikatakan bahwa BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. Hanya saja, bagaimana tata cara peran serta masyarakat beserta pemberian penghargaannya akan diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 55).

Bertolak dari beberapa ayat di atas dalam kaitan dengan penyelenggaraan industri pariwisata halal dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang ini masyarakat, dalam hal ini, wisatawan diberi ruang atau kesempatan untuk melakukan pengawasan, sekaligus mengadakan pengaduan jika sekiranya terjadi penyimpangan. Yakni penyimpangan yang dalam praktiknya tidak sesuai lagi dengan prinsip syariah, seperti produk makanan dan minuman yang beredar yang tidak jelas status halal atau haramnya karena ketiadaan label haram yang wajib dicantumkan, dan lain sebagainya.

F. Ketentuan Pidana: Menguji Tanggung Jawab

Kiranya telah menjadi sebuah kelaziman dalam setiap peraturan perundangan yang menjanjikan penghargaan (*reward*) kepada siapa pun yang mematuhi. Sebaliknya akan memberi sanksi ancaman (*punishment*) kepada yang menyalahinya.¹⁰ Hal ini dimaksudkan agar

¹⁰ Dalam kaitan dengan pidana Ini (bentuk hukuman), tentu saja undang-undang tentang JPH ini hanya sebatas mengatur hukuman duniawi sebagaimana yang tertulis dalam pasal-pasal

peraturan itu mempunyai sifat memaksa dan tidak dilanggar oleh siapa pun saja yang terkena ketentuan-ketentuannya. Kelaziman ini berlaku pula pada pengetetapan undang-undang JPH sebagaimana telah tersurat dalam bunyi pasal sebagaimana telah disinggung di atas.

Adapun ketentuan sanksi hukuman bagi yang melanggar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan JPH ini, secara tegas tercantum dalam Bab IX tentang Ketentuan Pidana, tepatnya Pasal 56 yang berbunyi:

“Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).”

Bertolak dari isi pasal di atas, ternyata sanksi hukuman yang dikenakan kepada si pelanggar cukup berat, baik dalam bentuk hukuman kurungan atau denda, sehingga dengan demikian dibutuhkan kehati-hatian kepada para pelaku usaha agar benar-benar melindungi kepentingan konsumen. Khusus untuk pelaku wisata halal, perlindungan dalam kaitan dengan pasal ini adalah merupakan hak bagi para wisatawan Muslim dalam turut serta menjaga keamanan agama mereka. Sekaligus juga ikut memelihara karakter khas setiap destinasi wisata halal yang harus memegang teguh prinsip syariahnya.

G. Catatan Akhir

Bertolak dari uraian di atas bagaimanapun industri pariwisata halal yang penyelenggarannya bersandar pada prinsip syariah tidak dapat lepas dari ketentuan Undang-Undang tentang JPH yang secara

yang mengaturnya. Namun demikian, secara syariat, di balik hukuman yang tertulis itu, sejatinya masih ada hukuman akhirat kelak di hadapan Allah swt . Untuk itu seyogianya, kepada semua pelaku usaha pariwisata halal memahami hal ini, agar mereka bisa selamat tidak saja di dunia, bahkan juga di akhirat kelak.

yuridis formal bertujuan melindungi kepentingan konsumen. Atau, jelasnya, disebut wisatawan Muslim di dalam pariwisata halal yang berkembang saat ini.

Mematuhi ketentuan JPH samahalnya dengan melakukan upaya pengembangan pariwisata halal yang benar-benar berdasarkan pada prinsip syariah. Bukankah kehadiran perundangan ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam turut serta mengawal perlindungan keamanan agama masyarakat dalam kehidupan. Untuk itu niscaya para pelaku usaha pariwisata halal wajib ikut bertanggung jawab pula dalam pelaksanaannya melalui pengembangan destinasi wisata halal yang selama ini menjadi aktivitasnya.

Bab VII

Pariwisata Halal: Perspektif UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

A. Pengantar (Madhal-Introduction)

Pembangunan perekonomian nasional di era globalisasi dewasa ini, bagaimanapun harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha agar mampu menghasilkan bermacam-macam barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.¹ Namun demikian dengan semakin terbukanya pasar global yang ditandai dengan semakin ketatnya daya saing, maka untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu diperkuat dengan peraturan perundangan yang dapat melindungi kepentingan mereka.² Di samping itu juga perlu melindungi kepentingan pelaku usaha agar terjadi keseimbangan antara kedua belah pihak.

¹ Lihat, dalam konsideran “Menimbang,” dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

² Ibid.

Itulah antara lain di antara pertimbangan filosofis dalam konsideran menimbang perlunya undang-undang tentang perlindungan ini diciptakan.³

Adapun yang dimaksud dengan konsumen dalam kaitan dengan destinasi wisata halal adalah para wisatawan (turis)), sedangkan pelaku adalah pelaku industri kepariwisataan. Kedua mereka ini jelas saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Pelaku usaha wisata butuh pengunjung agar dapat terus meningkatkan omzet industri (korporat) yang ditekuninya. Sementara wisatawan butuh destinasi rekreasi agar pikiran mereka menjadi tenang dan *refresh* yang dapat melahirkan inspirasi dan inovasi-inovasi baru untuk pengembangan diri yang dapat disumbangkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sebagaimana telah disinggung sebelum ini, bahwa pada hakikatnya destinasi wisata itu ibarat rumah tangga dalam sebuah keluarga, sedangkan wisatawan adalah tamu mereka yang akan melakukan silaturahmi. Islam mengajarkan, bagaimanapun tamu itu wajib dihargai, dihormati, dan dilindungi kepentingannya.

Atau, dengan kata lain, tentu saja wisatawan dapat pula dianalogikan (di-*qiyas*-kan) sebagai pembeli yang perlu dilayani dengan baik agar mereka mendapat kepuasan karena telah mendapat perlakuan prima dan mendapatkan apa yang dibutuhkan.

B. Pariwisata Halal: Perlindungan Konsumen

Bagaimanapun, dalam segala aktivitas bisnis dituntut untuk menawarkan yang sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam kapasitasnya sebagai *stakeholder*. Bukanlah justru sebaliknya, menawarkan apa yang merugikan, apalagi membahayakan bagi masyarakat., sesuai dengan hadits Nabi saw yang berbunyi: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR. Ibnu

³ Ibid.

Majah, Daruquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).⁴ Atau, bahaya (beban berat) harus dihilangkan.⁵

Tidak jarang, para pelaku bisnis berasumsi, seakan-akan bisnis adalah netral, dalam arti bebas nilai, baik nilai etika maupun hukum sehingga mereka termotivasi hanyalah sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus mempertimbangkan apakah yang dijual itu halal atau haram dikonsumsi. Dengan kata lain, apakah yang diproduksi itu berpotensi merugikan konsumen, baik dari aspek kesehatan, finansial, keyakinan dan lain sebagainya.⁶

Namun demikian, dalam banyak hal posisi konsumen selalu berada pada posisi yang lemah di hadapan produsen. Bahkan dalam kenyataan, produsenlah yang justru turut menciptakan kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, tidak jarang konsumen selalu dirugikan oleh perilaku produsen dengan berbagai macam modus agar mereka mendapat keuntungan secara ekonomi sebanyak-banyaknya.

Sebab itu bertolak dari kenyataan di atas, tentu saja dibutuhkan adanya perlindungan terhadap konsumen melalui perangkat legalitas formal untuk menetapkan aturan main agar kepentingan konsumen benar-benar terlindungi.⁷ Sekaligus agar tercipta kepastian hukum sehingga konsumen tidak lagi merasa dibayang-bayangi ketidakpastian untuk bertindak.

Kehadiran perundangan dimaksud adalah untuk meletakkan batasan-batasan minimal yang berfungsi untuk memandu, sekaligus mengatur kegiatan bisnis dalam kaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Karena itu kepada para pelaku bisnis diharapkan masih memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab

⁴ H.M. Ichwan Sam, dkk., (tim penyunting) *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Diterbitkan Atas Kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indonesia, 2003), 43.

⁵ H.M. Ichwan Sam, dkk. (tim penyunting), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, edisi revisi 2006, Jilid 1 (Jakarta: Diterbitkan atas Kerjasama DSN MUI-Bank Indonesia, 2006), 77

⁶ Dalam hal ini, lihat dan bandingkan dengan Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, edisi revisi (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 410

⁷ Bandingkan dengan Ibid

moral dengan memperhatikan bagaimana dampak kegiatan bisnis yang dijual. Antara lain yang berkaitan dengan kehalalan, kesehatan, budaya, sosial, budaya, dan ekonomi. Selain juga memiliki kepekaan terhadap kepentingan konsumen (baca: wisatawan) untuk tidak mengeruk keuntungan finansial sesaat untuk korporat (dirinya).⁸

Pertanyaan mendasar yang patut dikemukakan menurut Islam adalah untuk siapakah barang dan jasa dihasilkan. Selanjutnya, barang dan jasa apa saja yang akan dihasilkan serta apa saja bahan baku yang digunakan dan bagaimana cara pengelolaannya?⁹ Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini pada dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen selaku pengguna produk, baik dalam bentuk barang maupun jasa.¹⁰

Bagi wisatawan Muslim sudah pasti setiap produk yang dihasilkan dan disajikan, selanjutnya dikonsumsi harus halal dan baik. Artinya, harus *halalan thayyibah*, selain juga bahan baku dan prosesnya harus mengedepankan norma-norma yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, industri pariwisata halal yang dikembangkan akan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Itulah di antara alasan mendasar dan arti penting kehadiran perundangan tentang perlindungan konsumen yang pada prinsipnya adalah untuk memperkuat posisi wisatawan Muslim di hadapan pelaku usaha pariwisata halal. Sekaligus untuk memperkuat posisi industri pariwisata halal yang secara bisnis membutuhkan dukungan kehadiran para wisatawan (Muslim). Selain juga secara yuridis butuh dukungan beberapa norma hukum yang relevan agar memiliki daya saing yang semakin kuat di tengah pentas global.

⁸ Ibid., 411

⁹ Bandingkan dengan Ibid.412

¹⁰ Ibid.

C. Asas dan Tujuan: Suatu Target Akhir yang Diidealkan

Menurut Pasal 2 undang-undang ini bahwa, “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Kepastian hukum di sini dimaksudkan perlindungan secara yuridis jika sekiranya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh konsumen, atau dalam hal ini wisatawan Muslim dalam pariwisata halal. Katakan saja jika terjadi ketidakamanan dan ketidaknyamanan yang dialami oleh para wisatawan di tempat wisata, maka para pelaku wisata dapat dituntut tanggung jawabnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku secara sepihak tidak dapat melepaskan tanggung jawab ini karena hak wisatawan telah dijamin secara hukum.

Untuk itu, dalam Pasal 3, dikatakan bahwa adanya perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Isi pasal ini pada dasarnya ingin mempertegas bahwasanya kepentingan konsumen dalam banyak hal harus benar-benar terjamin. Kepentingan dimaksud adalah hak yang perlu diberikan oleh pengusaha. Jika tidak, hak-hak konsumen akan merasa terancam sehingga kenyamanan dan kepuasan dalam melakukan wisata tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan.

Inilah sejatinya yang dimaksud ketentuan tersebut pada Pasal 3 ini yang menyatakan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Artinya, hendaknya para pelaku usaha industri pariwisata halal berkesadaran bahwa perlindungan itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan

D. Hak dan Kewajiban: Butuh Keseimbangan Antarpihak

Perlu disadari bahwa pada dasarnya peraturan perundangan mengatur hak dan kewajiban antarpihak yang berkepentingan secara proporsional agar tercipta rasa keadilan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Dalam kaitan dengan industri pariwisata halal yang paling pokok adalah ada pihak pengusaha dan wisatawan. Keduanya tentu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam perspektif UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban wisatawan selaku konsumen diatur pada Pasal 4 tentang hak yang dapat diperoleh dan Pasal 5 tentang kewajiban yang harus ditunaikan.

Secara umum dalam Pasal 4, konsumen berhak mendapat kenyamanan, keamanan dan keselamatan (huruf a), selain juga perlu mendapatkan informasi tentang jasa yang ditawarkan secara benar, jelas dan jujur (huruf c). Artinya, apa yang diiklankan harus jelas dan bersesuaian dengan kenyataan destinasi di lapangan. Jika,

tidak maka wisatawan dapat melakukan komplain agar didengar apa yang menjadi keluhannya (huruf d).

Demikian juga sekiranya terjadi masalah sengketa yang dimungkinkan terjadi, maka sejatinya wisatawan berhak mendapatkan advokasi dan perlindungan (huruf e), bahkan juga mereka juga berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika terjadi jasa yang diterima tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya (huruf h).

Sedangkan kewajiban yang wajib diindahkan (Pasal 5) antara lain wisatawan wajib mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan dirinya (huruf a). Tentang hal ini antara lain misalnya terkait dengan penggunaan fasilitas di hotel tempat menginap para wisatawan, karena bisa jadi mereka belum tahu bagaimana penggunaan fasilitas yang serba canggih di dalamnya.

Tanpa kecuali mereka juga wajib memiliki i'tikad baik (huruf b), membayar nilai tukar sesuai yang disepakati (ditetapkan) (huruf c) dan jika terjadi masalah sengketa mereka wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut (huruf d).

Adapun hak (Pasal 6) dan kewajiban bagi pelaku usaha (Pasal 7), antara lain adalah hak untuk menerima kompensasi (pembayaran) sesuai kesepakatan (huruf a), mendapat perlindungan hukum (huruf b), melakukan pembelaan diri (huruf c) dan rehabilitasi diri (huruf d) jika terbukti kerugian konsumen tidak diakibatkan karena jasa yang diperdagangkan.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha (Pasal 7), antara lain beritikad baik dalam melakukan usaha (huruf a), memberi informasi yang benar, jelas dan jujur (huruf b), melayani konsumen secara jujur (huruf c), menjamin mutu barang dan/atau jasa (huruf d), memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa (huruf f) dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang diperjajikan (huruf g).

Itulah kiranya hak dan kewajiban pelaku usaha industri pariwisata halal dan wisatawan Muslim dalam perspektif perundangan perlindungan konsumen agar wisatawan benar-benar mendapat kepuasan. Demikian pula pihak pelaku usaha merasa puas pula karena sukses melayani wisatawan secara maksimal sesuai perundangan yang berlaku.

E. Larangan dan Tanggung Jawab Bagi Pelaku Usaha

Sebagaimana kita pahami bahwa pada ghalibnya pihak pengusaha, dalam kapasitasnya sebagai produsen maupun penjual, adalah merupakan pihak yang kuat dibanding posisi konsumen atau pun pembeli. Dengan demikian sangatlah tepat sekali jika diperlukan peraturan perundangan yang mempertegas bagaimana sejatinya perilaku mereka, antara lain yang berkaitan dengan apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan selanjutnya bagaimana tanggung jawab mereka di hadapan hukum berkaitan dengan profesi yang ditekuni selama ini dalam memperlakukan konsumen.

Bukankah dalam dunia industri, antarpihak tentu saling membantu, saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Tanpa konsumen (*stakeholder*) mustahil rasanya sebuah industri akan berkembang dan berkelanjutan jika tidak ada pengguna produk atau jasanya. Sebaliknya, konsumen akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, jika tidak ada produsen yang menyiapkan segala macam kebutuhannya.¹¹ Sebab itu tidak ada alasan apa pun untuk tidak mengapresiasi dukungan konsumen dalam bentuk perlindungan terhadap partisipasi mereka dalam turut serta membesarkan industri.

¹¹ Dalam hal ini baca dan badingkan dengan Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penebar Plus, 2012), 138-162

Katakan saja dalam dunia pariwisata, para pelaku usaha bidang *tourism*, tidak mungkin dapat mengembangkan usahanya jika tidak didukung oleh para wisatawan yang berkunjung. Demikian pula para wisatawan pasti akan merasa diuntungkan karena kebutuhan untuk *refresing* bisa terpenuhi sewaktu-waktu, terutama bagi komunitas urban atau perkotaan.¹²

Berkaitan dengan masalah larangan bagi pelaku usaha Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah barang dan atau jasa tersebut tersedia (huruf e). Padahal dalam kenyataan jasa barang tersebut belum ada atau belum tersedia. Jika hal ini dilakukan, kiranya samahalnya dengan melakukan kebohongan publik yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

Sebab itu pelaku usaha yang melanggar terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan /atau jasa tersebut (Ayat 2). Ini dimaksudkan agar kebohongan itu tidak berkelanjutan sehingga wisatawan selaku konsumen tidak merasa kecewa.

Selain itu yang berkaitan dengan tanggung jawab, antara lain dalam Pasal 19, Ayat (1) ditegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dengan adanya Pasal 19 Ayat (1) tersebut diharapkan agar pelaku usaha industri pariwisata halal, seperti perhotelan, restoran, travel, dan lain-lainnya, khususnya yang berpredikat halal harus benar-benar menunjukkan komitmennya untuk melindungi kepentingan wisatawan yang berkunjung.

¹² Lihat Henky Hermantoro, *Creative-Based Tourism Dari Wisata Rektreatif Menuju Wisata Kreatif* (Depok: Penerbit Aditri, 2011), 53-77

F. Sanksi (*Punishment*)

Selanjutnya, apa saja bentuk sanksi yang dipandang patut dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundangan ini. Secara garis besar meliputi dua macam bentuk, yakni sanksi administratif (Pasal 60) dan sanksi pidana dengan ketentuan bahwa penuntutan dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya. (Pasal 61).

Sebagaimana lazimnya dalam peraturan perundangan, sanksi administratif dalam perundangan ini adalah berupa penetapan ganti rugi, sedangkan sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda. Kecuali terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, maka diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku (Pasal 62 Ayat 3).

Dengan adanya sanksi ini, pada prinsipnya adalah ingin memaksa semua pelaku usaha, tanpa kecuali dunia industri pariwisata halal, agar mereka bersikap hati-hati dalam mengelola sebuah usaha. Dunia usaha sejatinya tidaklah cukup hanya mengedepankan kepentingan korporat semata, namun juga harus mempertimbangkan kepentingan atau apa yang menjadi hak konsumen secara berkeadilan. Karena bagaimanapun antarpihak, baik dunia usaha selaku produsen maupun wisatawan selaku konsumen saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain.

Sebab itu adalah sangat wajar apabila yang satu melindungi yang lain. Terlepas dari pretensi terselubung yang satu bernafsu merugikan yang lain. Apabila atmosfer semacam ini tidak tercipta, maka berkecenderungan akan melahirkan sikap saling mendalimi di antara mereka yang justru tidak sesuai lagi dengan prinsip syariah dalam Islam.

G. Catatan Akhir (*Ikhtitam*)

Sebagaimana telah dituangkan di dalam Pasal 2 undang-undang ini bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Bertolak dari asas ini pada dasarnya industri pariwisata halal yang dibangun harus benar-benar memberi manfaat kepada wisatawan, bukan justru sebaliknya, mendatangkan kemudharatan.

Selain juga harus mengedepankan asas keadilan, dalam arti, tidak ada pihak yang merasa dirugikan yang mencerminkan terciptanya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan wisatawan selaku konsumen secara berkeseimbangan. Sedangkan yang dimaksud dengan keamanan dan kenyamanan adalah terciptanya sebuah kondisi di mana para wisatawan akan merasa bebas dari segala macam gangguan sehingga mereka akan mendapat kepuasan yang diinginkan.

Sebab itu untuk dapat mengimplementasikan asas tersebut tujuan utama yang diidealkan oleh undang-undang ini antara lain adalah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang menjamin terciptanya kepastian hukum dan meningkatkan kualitas jasa pelayanan demi kelangsungan usaha di tengah persaingan global yang semakin keras.

Inilah sejatinya idealitas pengembangan industri pariwisata halal dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen. Karena pada prinsipnya yang paling krusial adalah melindungi kepentingan pengunjung secara proporsional agar mereka merasa nyaman karena di sana ada zona aman dan pelayanan yang maksimal.

Bab VIII

Pariwisata Halal: Perspektif Fatwa DSN-MUI¹

A. Pengantar

Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini sektor pariwisata syariah mulai berkembang di tingkat global, baik di negara Muslim maupun sekuler sekali pun. Tanpa kecuali di Indonesia sendiri, sehingga bagaimanapun pasti membutuhkan sebuah pedoman penyelenggaraannya. Namun demikian hingga saat ini ketentuan hukum tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dimaksud belum diatur secara khusus.

¹ Untuk bab ini, secara khusus, segala apa yang termuat di dalamnya diadopsi dari apa yang tertuang di dalam isi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Tujuan utamanya adalah untuk mensosialisasikan ketentuan fatwa tersebut agar masyarakat Muslim memahaminya. Dan dengan pemahaman itu, mereka akan semakin mantap dalam melakukan wisata, khususnya wisata yang berdasarkan prinsip syariah yang bersumberkan al-Qur'an dan Sunnah serta hasil ijtihad ulama. Dalam bab ini terdapat beberapa pernyataan (pendapat) yang sengaja dikutip secara utuh tanpa lagi menggunakan *footnote*.

Sebab itu bertolak dari alasan di atas, nampaknya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam kapasitasnya sebagai lembaga resmi yang memproduksi hukum, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.² Dan dengan fatwa ini diharapkan kepastian hukum secara syariat dapat diperoleh sehingga destinasi wisata halal yang sekarang sedang digalakkan di Indonesia akan semakin cepat perkembangannya.

Tanpa dukungan masyarakat, khususnya komunitas Muslim, niscaya pariwisata halal tidak akan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Adapun secara yuridis, agar dukungan itu semakin besar, di antaranya adalah perlu adanya kepastian hukum bagi masyarakat Muslim selaku *stakeholder*. Kiranya di sinilah arti penting lahirnya sebuah fatwa dari lembaga yang berkompeten.

B. Pijakan Yuridis secara *Syar'i*

Sebagai industri pariwisata yang berdasarkan prinsip syariah, tentu saja yang menjadi acuannya adalah ketentuan ajaran wahyu, yakni kitab suci al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. Akan tetapi ketentuan dalam kitab suci tersebut masih bersifat *mujmal* (global) sehingga masih dibutuhkan penafsiran dan penjelasan yang benar dan dijamin kevaliditasannya. Adapun penjas yang utama adalah apa yang datangnya dari Rasulullah saw, baik yang berupa perkataan (hadits), tindakan (sunah), restu (taqrir) maupun apa yang tergambar dalam sifat-sifat beliau selama hayatnya.

² Dalam penetapan hukum syariah di Indonesia, tentu saja tidak saja didominasi oleh DSN-MUI, karena di Indonesia masih ada komunitas lain yang tergabung di dalam organisasi sosial keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya perlu diakui eksistensinya karena di dalamnya banyak terhimpun ulama yang kompeten, sehingga dalam masalah hukum pariwisata perlu juga dipertimbangkan produk-produk fatwanya. Dalam kaitan dengan peran ulama sebagai pengawal hukum syariah, silakan baca Nikki R. Keddie (ed), *Scholar, Saints, and Sufis* (California: University of California Press, 1978) dan Ilik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990)

Kendati demikian perlu dipahami, sejalan dengan perkembangan zaman, tidaklah sedikit muncul berbagai permasalahan baru yang kadangkala belum diketemukan dasar ketentuannya dalam kedua sumber pokok di atas. Sebab itu di sinilah arti penting kehadiran para ulama sebagai pewaris para Nabi untuk melakukan ijtihad agar segala persoalan baru yang timbul dapat segera ditemukan jalan keluarnya (solusi).

Karena itu untuk menjamin kepastian hukum dalam kaitan dengan pariwisata halal yang berdasarkan prinsip syariah, di dalam rumusan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada dasarnya dapat dipetakan ke dalam empat sumber, yakni al-Qur'an, Sunnah (Hadits), Kaidah Fikih, dan Pendapat para Ulama. Sumber pertama dan kedua merupakan wahyu,³ sedangkan yang ketiga dan keempat merupakan produk pemikiran (ijtihad-rumusan) para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariat.

Tidak sedikit pijakan syar'i tentang pariwisata yang telah dieksplorasi oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa tersebut yang digali langsung dari al-Qur'an. Antara lain sebagaimana yang tertuang di dalam QS., Al-Mulk, 67:15; QS., Nuh, 71:19-20; QS., Al-Rum, 30:9; QS., Al-Ankabut, 29:20; dan QS., Al-Jumuah, 62:10.

Di dalam surat Al-Mulk, ayat 15, Allah swt berfirman:

*"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."*⁴

³ Sebagaimana kita pahami bahwa di dalam al-Qur'an secara tegas dikatakan bahwa apa yang datangnya dari Rasulullah saw pada hakikatnya adalah wahyu Tuhan, karena beliau bersabda semata-mata tidaklah kerana atas dorongan hawa nafsunya. Lihat, QS., An-Najm, 53:3-4

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Khadim al-Haramain asy-Syarifain Raja Fahd ibn 'Abd al-'Aziz al-Sa'ud

Di dalam surat yang lain, tepatnya surat Nuh, ayat 19-20:

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.”⁵

Selanjutnya di dalam surat Al-Ankabut, ayat 20 Tuhan berfirman:

“Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁶

Demikian pula dalam surat Al-Jumuah, ayat 10 dikatakan:

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁷

Sedangkan yang bersumber dari Hadits Nabi saw., fatwa mengemukakan antara lain sebagaimana riwayat Ahmad yang berbunyi:

“Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian, niscaya kalian akan menjadi sehat, dan berperanglah kalian, niscaya kalian akan tercukupi.”

Hadits lain yang dijadikan sandaran adalah riwayat al-Baihaqi:

“Dari Ibnu ‘Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw., bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi.”

Hadits lain lagi, riwayat al-Bukhari dan Muslim, datangnnya dari ‘Abdullah ibn ‘Umar,

“Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda. “Janganlah kalian masuk ke tempat kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam menangis (di tempat tertentu). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Selanjutnya, kaidah fikih yang dijadikan pijakan oleh DSN-MUI,⁸ antara lain:

1. “Pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pariwisata adalah merupakan bagian dari aktivitas muamalah. Karena itu dengan berpijak pada kaidah ini melakukan wisata dalam Islam dapat dibenarkan secara syar’I dengan dasar yuridisnya sebagaimana telah dikemukakan di atas. Namun demikian, wisata itu tidak boleh dilakukan jika memang ada ketentuan yang melarangnya.

Adapun kaidah yang lain lagi dapat dikemukakan sebagai berikut :

2. “Mencegah kerugian, lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.”

Yang dimaksud dengan *mafhum mukhalafah* kaidah ini, hendaknya destinasi wisata halal perlu mengedepankan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketenangan para wisatawan. Jika tidak, maka akan berpotensi merugikan mereka, tidak saja secara materiil, namun juga secara batin (psikis). Secara materiil, dalam arti kerugian harta benda yang sejatinya perlu dilindungi secara prima. Sedangkan secara psikis, dalam arti para wisatawan akan merasa kurang mendapatkan pelayanan yang sempurna yang dapat berakhir dengan rasa kecewa dan tidak puas. Kondisi semacam ini tentu tidak akan menguntungkan secara bisnis, sehingga perlu dihindari dan diantisipasi oleh para pengelola.

Selanjutnya fatwa ini juga mengemukakan kaidah berikut:

⁸ Untuk lebih jelasnya, terkait dengan kaidah-kaidah fikih ini, antara lain baca, Ahmad Ibn Syekh Muhammad Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1422 H), Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H) dan Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

3. “Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari.”

Hal ini dimaksudkan, jika sekiranya aktivitas wisata itu haram untuk dikerjakan, maka dengan sendirinya haram pula untuk dikunjungi. Justru karena itu di antara manfaat kehadiran fatwa ini adalah untuk memberi pencerahan kepada masyarakat tentang status hukum dari pariwisata itu sendiri secara syariat. Selain juga untuk memberi kepastian hukum bagi siapa pun yang akan melakukannya agar tidak menimbulkan keraguan (rasa waswas) yang mengganggu.

Adapun yang bersumber dari pendapat pakar (ulama), fatwa mengedepankan antara lain:

1. Al-Qasimi, dalam Mahasin al-Ta’wil, menjelaskan kata “siruu,” yang terdapat dalam surat Al-Naml, ayat 69 sebagai berikut:
“Mereka (yang diperintah bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain.”
2. Ibn ‘Abidin dalam Radd al-Mukhtar:
“(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan) atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat.”

Itulah beberapa pijakan syar’i yang sejatinya perlu dijadikan sandaran bahwasanya melakukan wisata pada dasarnya adalah boleh, terkecuali jika motifnya adalah untuk keperluan maksiat atau jika terkemudian terdapat hukum yang mengharamkannya. Adanya pijakan hukum semacam ini, niscaya masyarakat tidak akan merasa ragu lagi karena sudah jelas apa yang menjadi dasar syar’inya.

C. Ketentuan Hukum dan Prinsip Umum

Di dalam fatwa, khusus mengenai ketentuan hukum, dipertegas lagi, bahwa jika penyelenggaraan pariwisata yang sudah jelas berdasarkan prinsip syariah, maka boleh dilakukan dengan syarat mengikuti beberapa ketentuan yang telah difatwakan. Artinya, jika sekiranya terjadi hal yang bertentangan dengan apa yang difatwakan, maka samahalnya dengan menentang prinsip-prinsip syariah sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya akan berujung pada larangan (haram) untuk dilakukan.

Karena itu dalam kaitan ini, menurut Fahad Salim Bahammam, bepergian (berwisata) adalah merupakan sebuah sarana yang hukumnya berdasarkan tujuannya. Artinya jika tujuannya adalah untuk kewajiban, maka wajib melakukannya, seperti menunaikan haji bagi yang belum pernah menunaikan.⁹ Demikian seterusnya, jika kita berniat melaksanakan ibadah umrah sunah, maka hukum bepergiannya adalah sunah pula.

Sedangkan yang berkaitan dengan prinsip umum, penyelenggaraan wisata wajib menghindari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkar. Sebaliknya perlu menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan, baik secara material maupun spiritual bagi para pengunjung.

Karena itu bertolak dari prinsip umum di atas, hendaknya aktivitas pariwisata halal harus benar-benar melindungi masalah keyakinan (*al-dyn*) wisatawan (Mualim) agar mereka tidak terjermus ke dalam jurang kemusyrikan dan hal-hal lain yang dapat menodai kesucian agama yang dipeluknya.¹⁰ Dengan berwisata hendaknya wisatawan banyak memetik hikmah, kemaslahatan dan *'ibrah* yang bermanfaat, tidak saja sebagai tambahan bekal hidup di dunia, namun juga di akhirat kelak. Bukanlah justru sebaliknya, setelah melakukan wisata, maka iman mereka akan terganggu atau semakin lemah.

⁹ Fahad Salim Bahammam, *Panduan Wisatawan Muslim*, ter. Ganna Pryadarizal Anaedi & Syifa Annisa (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 9

¹⁰ Dalam kaitan dengan masalah perlindungan agama, di dalam Islam banyak dibahas di dalam ajaran *Maqashid al-Syariah*, yakni melindungi, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Iniilah sejatinya tugas utama kehadiran pariwisata halal, yakni mengawal keyakinan para wisatawan agar mereka semakin kokoh dan mantap imannya dengan banyak bertadabbur akan ciptaan Tuhan yang sedemikian kaya dan bervariasi, baik berupa komunitas manusia yang beraneka ragam maupun berupa alam semesta.¹¹ Ini semua, antara lain dapat diperoleh dan dipelajari oleh para wisatawan melalui pariwisata.

D. Ketentuan Destinasi Wisata

Dalam kaitan dengan ketentuan destinasi (objek) wisata ini, di dalam fatwa ditetapkan tiga ranah kewajiban, yakni upaya pencapaian, fasilitas yang wajib dimiliki, dan berbagai upaya yang wajib dihindari. **Pertama**, wajib dicapai dengan melalui ikhtiar: 1. Mewujudkan kemaslahatan umum; 2. Memperoleh pencerahan, penyegaran, dan penenangan; 3. Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan; 4. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; 5. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; dan 6. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Kedua, berbagai fasilitas yang wajib tersedia, yakni berupa sarana ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah. Di samping tersedianya makanan dan minuman halal yang jelas terjamin kehalalannya dengan Sertifikasi Halal MUI. Sebab itu, khusus untuk makanan dan minuman ini, bagaimanapun di tempat wisata perlu tersedia restoran yang melayani konsumsi wisatawan Muslim agar mereka merasa terlayani dan memperoleh kepuasan.¹²

¹¹ Dalam kaitan ini periksa, QS., Ar-Ruum, 30:22 yang berbunyi: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”

¹² Upaya memanjakan wisatawan Muslim itu agar memiliki daya tarik, sedianya telah dilakukan oleh Korea Selatan yang mencoba menyiapkan mushala di berbagai titik strategis, termasuk di bandara. Selain juga menyiapkan restoran yang menyediakan makanan halal. Lihat, Setyanadivita dan Livikacansera, “Manjakan Wisatawan Muslim,” dalam *Republika*, edisi 25 Agustus 2017, 5

Untuk selanjutnya yang **Ketiga**, agar wisatawan Muslim tidak terganggu keyakinannya dan tetap turut menjaga *muruah*-nya sebagai Muslim, hendaknya pada setiap destinasi halal wajib terhindar dari berbagai hal yang menjurus pada kemusyrikan dan khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman yang memabukkan, narkoba dan judi. Selain juga terhindar dari adanya pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang kontra produksi dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Ketentuan Infrastruktur Pendukung

Perlu diakui, bagaimanapun kehadiran infrastruktur dalam pembangunan industri pariwisata merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Tanpa infrastruktur pendukung yang memadai, mustahil rasanya industri pariwisata bisa berkembang secara berkelanjutan. Karena itu dalam fatwa ini telah ditetapkan beberapa ketentuan mengenai hotel syariah sebagai tempat menginap (akomodasi), spa, sauna dan *massage* (relaksasi-kebugaran), biro perjalanan (travel), dan pemandu wisata (guide).

Pertama, dalam kaitan dengan infrastruktur akomodasi, seperti hotel, ditetapkan agar tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan asusila yang dapat merusak moral. Termasuk fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan yang dapat mengganggu keyakinan. Bahkan untuk mendukung kekokohan keyakinan wisatawan, setiap hotel diwajibkan menyediakan fasilitas tempat ibadah yang memadai, termasuk fasilitas air yang cukup untuk bersuci. Demikian pula yang berkaitan dengan masalah konsumsi yang harus tersedia, hotel wajib menyediakan menu makanan dan minuman yang telah tersertifikasi halal dari MUI.

Selain itu untuk mempertahankan karakteristik prinsip syariahnya, hotel wajib mempekerjakan karyawan dan karyawan dengan pakaian yang syar'i, memiliki buku pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan (semacam SOP), dan yang tidak kalah

pentingnya lagi adalah hotel wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan kepada pihak-pihak terksait.

Selanjutnya, **kedua**, bagaimanapun ketersediaan sarana kebugaran (relaksasi) seperti spa, sauna, dan *massage*, tidak kalah pentingnya bagi wisatawan sebagai bagian untuk mendapatkan kepuasan dalam pelayanan. Fasilitas ini merupakan ciri dari setiap hotel di manapun saja berada, utamanya hotel berbintang sebagai salah satu indikator kemodernannya.

Karena itu berkaitan dengan fasilitas ini, fatwa menetapkan, selain wajib menggunakan bahan yang halal dan tidak najis, juga wajib memperhatikan masalah keharaman kontak jenis kelamin yang bukan muhrimnya. Sebab itu terapis laki-laki hanya boleh melayani wisatawan lelaki. Demikian pula halnya terapis wanita, hanya boleh melayani sesama wanita.

Itu semua pada dasarnya adalah untuk menjaga kehormatan wisatawan yang wajib dilindungi, termasuk pula menghindari adanya pornoaksi dan pornografi yang dapat mengundang kerentanan dalam masalah seks bagi pengunjung.

Selain itu, **ketiga**, daya dukung infrastruktur biro perjalanan tidak kalah signifikannya dalam upaya mendorong suksesnya industri pariwisata halal, baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun internasional. Beberapa ketentuan berkaitan dengan biro perjalanan ini adalah:

1. Menyelenggarakan paket wisata sesuai prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata sesuai prinsip-prinsip syariah;
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang bersertifikasi halal MUI;
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;

5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai prinsip syariah; dan
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.¹³

Adapun yang **keempat**, bertalian dengan ketentuan pemandu wisata syariah yang sejatinya tidak kalah pentingnya dengan daya dukung yang lain sebelumnya. Pemandu niscaya merupakan ujung tombak di lapangan, apakah wisatawan mendapat kepuasan dalam pelayanan atau tidak.

Karena itu terkait dengan pemandu, secara akademik diwajibkan agar mereka menguasai fikih pariwisata dan mampu melaksanakannya sesuai prinsip-prinsip syariah. Sehingga dengan demikian, mereka memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang dibuktikan dengan sertifikat yang diakui secara hukum.

Di samping itu dari aspek kepribadian, pemandu diwajibkan memiliki kinerja yang mencerminkan akhlak terpuji. Antara lain ditandai dengan berpenampilan sopan dan menarik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas kewajiban. Bagaimanapun kinerja pemandu merupakan salah satu representasi sukses sebuah destinasi untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya.

Itulah beberapa ketentuan mengenai infrastruktur pendukung yang patut menjadi acuan bagi industri pariwisata halal di tanah air agar benar-benar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Dengan adanya fatwa DSN-MUI ini ke depan, kiranya Indonesia dengan potensi yang dimiliki patut menjadi kiblat level dunia pengembangan industri pariwisata halal yang benar-benar sesuai prinsip syariah secara kafah.

¹³ Khusus untuk ketentuan mengenai biro perjalanan ini dalam bab ini dapat dikatakan dikutip secara keseluruhan dari isi naskah fatwa, dan jika terjadi modifikasi hanyalah sebatas masalah redaksional semata.

F. Catatan Akhir

Dengan semakin berkembangnya industri pariwisata di tingkat global, baik yang konvensional maupun yang berpredikat halal, niscaya bagi Indonesia merupakan sebuah peluang emas untuk berkompetisi dengan berbagai negara lain di dunia. Indonesia adalah negara besar dengan segala potensi yang dimiliki yang kadangkala tidak dimiliki oleh negara lain di manapun saja di planet bumi ini.¹⁴

Suatu hal yang sangat menarik dan perlu dicermati adalah permintaan pariwisata halal di tingkat internasional, di mana Indonesia merupakan bagian yang ada di dalamnya. Berbagai negara di dunia sama-sama berpacu mengembangkan wisata halal dengan pertimbangan karena sektor ini dianggap memiliki prospek yang menjanjikan untuk meningkatkan devisa negara masing-masing. Geliat wisata halal itu seiring dengan dengan semakin banyaknya wisatawan Muslim yang ingin menikmati wisata sesuai dengan keyakinan mereka, baik domestik (wisnu) maupun mancanegara (wisman).

Di antara kendala bagi Indonesia dalam menyambut perkembangan pariwisata halal adalah masalah regulasi yang menjadi payung hukum, baik dalam kaitan dengan aspek syariah maupun hukumnya secara umum (nasional) yang mengatur pelaksanaannya. Karena itu dengan terbitnya Fatwa DSNJ-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, niscaya merupakan jawaban bahwasanya Indonesia, secara yuridis, benar-benar siap untuk mengembangkan pariwisata halal, baik dalam skala nasional maupun internasional.

¹⁴ Mengenai potensi Indonesia, antara lain diakui oleh Mahathir Mohammad, Mantan Perdana Menteri Malaysia. Ia mengatakan bahwa potensi pariwisata halal di Indonesia sangat besar. Hal itu ia katakan dengan melihat banyaknya pulau, suku, dan budaya yang beraneka ragam. "Hal ini menarik bagi turis. Sekarang jumlah turis Islam sudah meningkat. Sekarang banyak orang-orang Arab melancong ke negara lain. Dahulu, mereka sering ke Amerika," menurut Mahathir. Karena itu lanjutnya lagi, peningkatan wisatawan Muslim yang sudah mulai banyak mengunjungi berbagai negara merupakan peluang bagi Indonesia. Lihat, Rahmat Fajar, "Memfaatkan Potensi Besar Pariwisata Halal," dalam *Republika*, edisi 24 Agustus 2017, 24.

Dari aspek muatan yuridisnya, fatwa tersebut telah mengatur banyak ketentuan yang meliputi berbagai aspek pengembangan industri pariwisata halal, sehingga ke depan diharapkan kepada para pihak yang berkepentingan tidak perlu ragu lagi dalam turut serta mengembangkan industri pariwisata halal di tanah air.



Bagian Keempat

Pariwisata Halal dan Kearifan Lokal



Bab IX

Pariwisata Halal dan Kearifan Lokal: Potensi, Inovasi, dan Aksi

A. Pengantar

Secara harfiah (epistemologi) maupun pengertian (terminologi) pariwisata halal dan kearifan lokal nampaknya tidak ada kaitan sama sekali antara yang satu dengan yang lain karena keduanya merupakan entitas tersendiri. Dalam kenyataan, keduanya berjalan sendiri-sendiri, seakan-akan tidak pernah saling menyapa sehingga secara sepintas pula keduanya tidak ada korelasi.

Kiranya pandangan semacam itu wajar saja. Akan tetapi pandangan itu akan lain lagi jika kita memahami bahwasanya dalam rahim kearifan lokal kapan dan di manapun saja pasti mengandung nilai-nilai filosofi yang dapat ditangkap dari berbagai bentuk ekspresinya secara nyata. Justru dari ekspresi yang mewujud dalam berbagai bentuk aktivitas itulah yang perlu digali, dikembangkan dan terus

dipertahankan agar kekayaan khazanah budaya kita tidak akan pernah punah dan mati.

Dalam kenyataan sehari-hari, wujud nyata kearifan lokal yang sedemikian variatif itu akan terlihat misalnya bagaimana ragam seni budaya, bentuk dan cara berbusana yang tidak sama antara daerah yang satu dengan yang lain. Demikian pula dalam kaitan dengan masalah perkawinan, kelahiran, bahkan sampai pada peristiwa kematian pun sangat beragam di Nusantara ini. Tanpa kecuali pula dalam kaitan dengan aktivitas keagamaan dari berbagai etnis yang sedemikian banyak, sehingga memunculkan wujud ekspresi yang beragam pula dengan keunikannya masing-masing.

Khusus untuk yang terkait dengan masalah keagamaan (religi) ini tidak sedikit peninggalan tempat ibadah yang mengandung nilai historis yang telah dijadikan objek wisata religi oleh umat Islam di Indonesia. Selain beberapa makam para wali penyebar Islam yang dikenal dengan ziarah Walisongo telah lama pula menjadi destinasi wisata yang sedemikian terkenal untuk mengenang dan mendoakan mereka atas jasa-jasanya di tanah air.

Demikian pula yang berkaitan dengan masalah kuliner betapa banyak yang kita miliki sebagaimana pula banyaknya sumber daya alam yang sedemikian melimpah nan indah di bumi zamrut khatulistiwa ini. Rasanya beragam bentuk kekayaan yang terhampar di Indonesia ini jarang terdapat atau bahkan tidak ditemui di berbagai bangsa lain di dunia. Karena itu pertanyaannya adalah mampukah kita menggali kesemua potensi itu yang merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia. Tentu saja, kuncinya adalah terletak pada bagaimana komitmen dan kesiapan sumber daya manusia yang ada dalam melakukan eksplorasi secara maksimal untuk kemudian digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat banyak.

Artinya, berbagai potensi yang selama ini terserak-serak itu perlu dilakukan inovasi, dikelola dan terus dikembangkan agar mempunyai nilai jual dalam bentuk wisata yang berciri khas cita rasa Indonesia. Karena itu yang terpenting dari sedemikian banyak

kearifan lokal itu bisa dilakukan inventarisasi dan identifikasi, kiranya objek manakah yang berpotensi untuk dikembangkan secara profesional sebagai destinasi maupun pendukung pariwisata halal baru di setiap kawasan di Indonesia. Inilah sejatinya yang perlu dikaji dalam bagian ini.

Tanpa dukungan kearifan lokal, destinasi pariwisata di suatu daerah akan kehilangan ruhnya yang justru menjadi kekuatan karakter unik dan daya tariknya yang spesifik. Inilah relevansinya, justru mengapa Presiden Jokowi menekankan agar kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika di Lombok dipadukan dengan kearifan lokal yang diunggulkan sebagai pariwisata halal tingkat dunia.

Selanjutnya, untuk lebih memperkenalkan destinasi di setiap kawasan (daerah) yang dikembangkan, diperlukan berbagai strategi sosialisasi (promosi-pemasaran),¹ antara lain melalui *event-event* tertentu, melalui iklan di media (elektronik dan cetak), penyebaran brosur/*booklet*, kegiatan seminar, lomba karya tulis, dan lain sebagainya. Semua ini dimaksudkan agar publik akan banyak tahu agar mereka merasa termotivasi untuk mengetahui lebih dekat dengan jalan berkunjung.

B. Budaya Nusantara: Beragam Potensi yang Butuh Aksi

Sebagai sebuah negara besar yang multikultural, Indonesia sudah pasti banyak memiliki potensi budaya yang sejatinya perlu digali.² Tujuannya antara lain agar potensi itu mempunyai nilai tambah keekonomian. Pada akhirnya nilai tambah itu dapat

¹ Promosi pariwisata adalah jalinan antara satu jaringan (*network*) dengan jaringan-jaringan lainnya. Artinya, promosi itu harus melibatkan pihak lain dan dilakukan dengan berbagai jalur (kegiatan). Dalam hal ini lihat dan bandingkan dengan Yusak Anshori dan Dewa Gde Satrya, *Pariwisata Dengan Huruf L* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 1

² Dalam hal ini baca, Aswab Mahasin et. al (ed), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa Aneka Budaya Jawa* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996) dan Aswab Mahasin, et. al (ed), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa Aneka Budaya Nusantara* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996). Selain itu baca pula, Anonim, *Petunjuk Pariwisata Jawa Tengah & DIY* (tt: PT Purimedia Wisata, 1992)

dijual sesuai peruntukannya yang diharapkan dapat menambah devisa negara. Katakan saja peruntukan itu untuk pengembangan pariwisata yang diharapkan ke depan dapat menggeser pemasukan dari sektor lain yang selama ini diperoleh dari sektor migas dan batu bara. Padahal, sejatinya kedua sektor ini karakternya adalah *unrenewable*, karena tidak dapat diperbarui sehingga pada saatnya akan habis secara alami.

Sebab itu untuk tetap mempertahankan, dan bahkan terus meningkatkan pemasukan bagi anggaran negara, pemerintah Indonesia dituntut kearifan dan keaktifannya mencari alternatif yang menjanjikan agar kesejahteraan bangsa tetap terjamin dan terjaga. Kiranya kondisi semacam ini pasti dialami oleh semua bangsa di dunia yang pada akhirnya mereka akan mengeksplorasi potensi yang dimiliki negara masing-masing.

Dalam kaitan dengan masalah budaya, Indonesia adalah gudangnya. Menarik (*beautiful*), banyak keunikan, dan bervariasi yang membentang sepanjang Kepulauan Nusantara dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua. Inilah fenomena (realitas) yang tak terbantahkan keberadaannya oleh siapa pun saja. Kekayaan budaya itu menggambarkan sedemikian banyak pulau, bahasa, etnis, agama, dan kekayaan alam yang kesemuanya akan memberikan inspirasi tersendiri yang pada akhirnya dalam jangka waktu yang lama mewujudkan sebagai sebuah ekspresi budaya yang unik yang tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Katakan saja sebagai misal seni tari Topeng yang memiliki ciri dan karakteristik berbeda di setiap daerah di Nusantara. Sebagaimana yang pada akhir Oktober 2017 ditampilkan oleh Bakti Budaya Jarum Foundation dengan judul "Di Balik Topeng."³

Keragaman budaya lain yang menjadi kekayaan Nusantara adalah Tari Saman yang merupakan salah satu tari adat suku Gayo Aceh yang unik. Bahkan pementasan komunitas tari ini Agustus 2017 lalu berhasil memecahkan rekor MURI dengan jumlah

³ Noer Qomariah Kusumawardhani, "Sepintal Kisah di Balik Tari Topeng", dalam *Republika*, edisi 26 Oktober 2017, 24

sebanyak 12.262 penari.⁴ Ekspresi budaya itu, sekaligus akan merupakan mozaik dan bagian dari kearifan lokal masing-masing yang berkecenderungan terus dipertahankan secara turun temurun dan bahkan menjadi bagian dari pandangan hidup masyarakat setempat.

Tentu saja kekayaan potensi budaya itu bagaikan tambang emas yang perlu terus digali, dilakukan inovasi dan dikembangkan tanpa henti dan yang penting lagi adalah perlu adanya program aksi sebagai bagian dari keragaman industri pariwisata halal yang dapat dijual. Namun demikian program aksi itu sekiranya tidak kontra produksi dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan.

C. Kuliner Nusantara: Beragam Jenis Makanan yang Butuh Inovasi

Sebagaimana kekayaan budaya, dalam masalah kuliner pun Indonesia tidak perlu diragukan lagi yang menjadi ciri khas dari berbagai daerah yang terdistribusi di berbagai belasan ribu pulau di Nusantara.⁵ Keberagaman kuliner itu disebabkan karena melimpahnya sumber daya alam sebagai bahan baku dan kearifan lokal yang ada sehingga dengan demikian dapat menghasilkan ragam makanan yang berbeda pula antara daerah yang satu dengan yang lain.

Sebagai misal, industri tempe yang berpusat di Sanan Kota Malang, sebelum ini hanya ada satu rasa secara alami (natural-original). Akan tetapi agar mempunyai daya tarik dan lebih bercita rasa, maka kini rasa itu sengaja dibuat sangat bervariasi. Antara lain bercita rasa keju, balado, barbeque, pedas, ketumbar, daun jeruk,

⁴ Anonim, "Tari Saman," dalam *Republika*, edisi 27 Oktober 2017, 4

⁵ Dalam kaitan dengan aneka ragam kuliner ini, lihat kembali Anshori dan Satrya, *Pariwisata*, 134-143. Dalam buku ini antara lain dikemukakan berbagai jenis Makanan Suroboyoan sebagai Aset Pariwisata. Lihat dan bandingkan dengan, Fahad Salim Bahammam, *Panduan Wisatawan Muslim*, ter. Ganna Pryadarizal Anaedi & Syifa Annisa (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 311-332

dan masih banyak lagi. Demikian pula bakso Malang yang sudah banyak dikenal, kini dimodifikasi dan dilakukan inovasi-inovasi baru menjadi bakso isi keju, bakso pedas, bakso cetak persegi, bakso iga, bakso ceker, bakso bakar, dan lain sebagainya.

Tanpa kecuali “bakpo telo” di Malang yang berbahan dasar “telo”, dimodifikasi menjadi sebuah jenis makanan yang khas dan bercita rasa sebagai salah satu ikon baru masyarakat Malang. Karena itu tempat penjualan jenis makanan ini menjadi salah satu sasaran kunjungan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malang Raya.

Demikian pula, jenis makanan serabi yang semula dianggap sebagai makanan rakyat dan “ndesani”, saat ini makanan ini juga telah dibuat beragam rasa untuk menggairahkan lidah konsumen (masyarakat) dengan sebutan menarik “surabi imut.” Di Kota Malang sebagai salah satu kawasan wisata di Jawa Timur, konon makanan yang berasal dari Bandung ini saat ini dengan banyak diminati oleh khayak luas, terutama kalangan muda-mudi.

Contoh lain lagi adalah makanan yang berbahan dasar jagung seperti yang ditampilkan dalam acara “Madura Asonar 2017,” tepatnya, 28-29 Oktober 2017 di Pamekasan Madura. Dalam acara ini dikompetisikan *Nasek Jagung* (Nasi Jagung) dan Kain Batik Khas Madura yang sudah banyak dikenal di Indonesia.⁶ Pulau Madura yang sejak dulu dikenal makanan pokoknya berasal dari jagung, nampaknya sampai saat ini masih terus dipertahankan dengan inovasi dan kreativitas baru agar memiliki cita rasa yang beda dengan yang lain.

Keberadaan kuliner halal dalam suatu kawasan pariwisata yang berbasis syariah sejatinya tidak saja sebagai pelengkap, namun merupakan keniscayaan dan kebutuhan yang harus terpenuhi bagi wisatawan Muslim. Di sinilah arti penting, justru mengapa setiap jenis makanan dan minuman yang menjadi kekayaan dan ciri khas di setiap daerah Indonesia itu perlu terus digali. Selanjutnya

⁶ Anonim, “Kembangkan Potensi Besar UKM,; dalam *Jawa Pos*, edisi 28 Oktober 2017, 9

dilakukan inovasi sesuai prinsip syariah, dan dikembangkan sesuai kebutuhan.

D. Wisata Religi: Ekspresi Wisata Spiritual/ Transenden yang Perlu Dilestarikan

Sebagaimana kita ketahui, bahwa negara Indonesia dengan mayoritas populasinya yang beragama Islam kaya dengan peninggalan sejarah yang bernuansakan agama (religiositas). Peninggalan (*legacy*) ini sejatinya sebagai saksi bisu dan historis bahwa sebagian besar penduduk Indonesia benar-benar sebagai Muslim.

Yang berkaitan dengan tempat ibadah misalnya di ibukota negara Jakarta berdiri sebuah masjid megah dikenal dengan nama “Istiqlal.” Di Jawa Tengah, dikenal Masjid Demak, dan di Jawa Timur, tepatnya di Kota Surabaya sebagai Ibukota Propinsi berdiri Masjid Sunan Ampel. Bahkan di Kota Pahlawan ini sekarang berdiri pula sebuah masjid megah berasitektur klasik-modern dengan nama Masjid Akbar. Kesemua tempat ini sejatinya merupakan ikon atau simbol kebesaran Islam di tanah air yang telah banyak memberikan kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi pembangunan bangsa Indonesia selama ini.

Demikian juga yang berkaitan dengan “makam,”⁷ atau kuburan yang di dalamnya bersemayam jasad para syuhada, mujtahid, auliya’ dan ulama yang dikenal secara luas jasa-jasanya dalam mendakwakan syariat Islam di tanah Jawa. Karena dengan jasa merekalah sampai akhirnya Islam menyebar ke seantero Nusantara dan men jadikan rakyat Indonesia sebagai penganut agama tauhid sampai dengan era global saat ini. Karena para ulama pejuang inilah pada akhirnya dikenal sebagai wisata religi Walisongo.⁸ Masyarakat

⁷ Lihat, “Wisata Pemakaman di Surabaya,” dalam Anshori dan Satrya, *Pariwisata*, 98-102

⁸ Dalam hal ini, lihat, I. Rofi’ie Ariniro, *Panduan Risata Religi Ziarah Wali Sanga* (Yogyakarta: Saufa, 2016). Perlu dipahami bahwa wisata religi itu bersifat universal, dalam arti, tidak hanya terjadi dan mentradisi di Indonesia saja, namun juga di berbagai tempat di dunia.

berkunjung untuk mengenang jasa para wali Allah yang telah banyak berjuang dalam menyebarkan agama tauhid di tanah air, khususnya di tanah Jawa.

Kesemua tempat ibadah dan makam para wali itu telah sedemikian kesohor di kalangan Muslim Nusantara, terutama dari kalangan Sunni sebagai destinasi wisata religi. Kunjungan masyarakat, di samping melakukan wisata, sekaligus untuk beribadah dengan jalan banyak berdoa dan mendoakan para wali panutan mereka. Bahkan, berkaitan wisata ziarah Walisongo itu pada umumnya mereka juga melanjutkan wisatanya ke Pulau Madura karena di sana di kalangan Muslim juga dikenal makam tiga wali, yakni Mbah Cholil Bangkalan, Makam Batuampar Pamekasan dan makam Syekh Yusuf di Tlango Sumenep Madura. Khusus di Sumenep ini dikenal pula destinasi wisata Asta Tenggih dan Masjid Agung.⁹

Tentu saja destinasi wisata religi itu sebagai salah satu kekayaan destinasi di Indonesia dengan sendirinya perlu dilestarikan keberadaannya. Karena bagaimanapun kehadirannya akan membawa dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Namaun demikian di balik itu juga sarat makna spirituellitas yang dapat diperoleh oleh para wisatawan (peziarahnya) yang berkunjung.

E. Kekayaan Alam: Nikmat Tuhan yang Perlu Dieksplorasi

Sebagaimana kekayaan kearifan lokal, sebagai anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia, sumber daya alam pun juga tidak kalah

Wisata Religi yang paling kesohor di kalangan umat Islam sedunia adalah Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah, dan Palestina (Masjid al-Aqsha). Di ketiga tempat ini banyak destinasi wisata (situs sejarah) yang bernuansakan Islam yang dapat dikunjungi. Dalam hal ini, lihat kembali Bahammam, *Panduan Wisatawan*, 128-168. Bahkan dalam al-Qur'an sendiri diceritakan berbagai situs-situs sejarah yang menakjubkan, Lihat, Zen Abdurrahman, *Wisata Sejarah bersama al-Qur'an* (Yogyakarta: Diva Press, 2012).

⁹ Masyhuri Machfudz, *Analisis Pasar Pariwisata*, dalam Naskah Buku yang belum diterbitkan (2007), 43-44

bervariasinya, baik yang ada di laut maupun yang terhampar di daratan. Di laut misalnya, antara lain berupa ombak yang dianggap sangat tepat untuk olah raga slancar. Selain karena keindahan dan keunikan pantai di seantero Nusantara semisal Raja Ampat di Papua, keindahan panorama bawah laut Bunaken di Sulawesi Utara, dan pesona Pantai Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan masih banyak lagi.

Sedangkan yang ada di darat, dapat berupa hutan tropis, air terjun, danau, panorama alam, gua, gunung dengan kawahnya, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit jenis binatang yang sedemikian unik seperti binatang purba Komodo di Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur.

Kiranya dari sekian banyak kekayaan alam itu, manakah kiranya yang paling cocok untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal baru sebagaimana Pantai Mandalika yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengembangan destinasi ini nampaknya tidak saja perlu diseriusi oleh pemerintah setempat, namun juga oleh pemerintah pusat. Karena itu sangatlah wajar, jika Presiden Jokowi mengingatkan agar pengembangan wisata ini dipadukan dengan potensi kearifan lokal Pulau Lombok yang bercorak agamis, dalam hal ini Islam.

Nampaknya dilihat dari potensi yang ada, dalam waktu dekat yang akan menyusul Pemerintah Propinsi NTB, adalah Propinsi Sumatera Barat. Propinsi yang kesohor dengan filosofi kearifan lokalnya yang berbunyi, “Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah,” sangatlah tepat sebagai destinasi pariwisata halal baru di Indonesia. Karena propinsi yang dikenal dengan rumah gadang dan masakan rendangnya dengan aktivitas adatnya yang bernuansa keislaman ini, kiranya akan mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pelancong, tidak saja domestik, namun juga mancanegara.

Daya dukung propinsi ini adalah kemudahan mendapatkan tempat ibadah, tersedianya restoran bermenu halal, adanya tempat penginapan yang bernuansakan syariah, perilaku masyarakat yang

seharusnya mencerminkan filosofi kearifan lokalnya, dan lain sebagainya yang secara realitas akan mempercepat Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal baru di Nusantara. Karena itu, tanpa adanya restoran dan hotel yang belum bersertifikasi halal misalnya, niscaya akan menjadi kendala pengembangan industri pariwisata halal di suatu daerah.¹⁰ Ini mengindikasikan betapa pentingnya faktor infrastruktur dalam sebuah destinasi wisata secara universal. Tanpa kecuali dalam dunia pariwisata halal.

Kesemua potensi kearifan lokal sebagaimana dimaksudkan di atas sejatinya dapat dieksplorasi dan dikembangkan untuk kemudian dikembangkan sebagai bagian dan daya dukung pengembangan industri pariwisata halal. Dan dengan daya dukung yang kuat destinasi wisata yang dibangun akan semakin kuat pula dan bahkan keunikannya akan semakin tampak sesuai karakter kearifan lokal masing-masing.

Ini semua tentu membutuhkan program aksi (tindak lanjut), dalam arti perlu diikuti dengan upaya maksimal untuk memperkenalkan destinasi yang telah dibangun agar lebih banyak dikenal oleh publik (masyarakat luas). Hal ini dimaksudkan, agar kekayaan kearifan lokal yang banyak terpendam di bumi Nusantara tidak saja diketahui dan dinikmati oleh masyarakat domestik (lokal) semata, namun juga dikenal luas oleh masyarakat mancanegara. Pada akhirnya, diharapkan agar dampak ekonominya akan semakin signifikan bagi masyarakat luas.¹¹ Bahkan ke depan, diharapkan sebagai penyumbang devisa bagi negara akan lebih signifikan pula.

Inilah sejatinya tujuan akhir (*goal-ending*), justru mengapa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, saat ini sangat antusias mengembangkan sektor pariwisata antara lain adalah untuk mendongkrak devisa negara setelah sumber lain nampaknya mulai

¹⁰ Wirda Fizriyani, "Malang Raya Incar Wisatawan Timur Tengah," dalam *Republika*, edisi, 27 Oktober 2017

¹¹ Lihat Radjasa Mu'tasim, et.al., *Agama dan Pariwisata Telaah Atas Transformasi Keagamaan Komunitas Muhammadiyah Borobudur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 44

melemah (berkurang). Tanpa kecuali juga pengembangan industri pariwisata halal. Ini semua tentu sangatlah tergantung kepada semua elemen bangsa yang dituntut komitmennya untuk memajukan industri pariwisata di negeri ini. Tidak saja dari pemerintah pusat selaku pemegang kebijakan makro (*top-down*), namun perlu pula adanya respons dari para pihak pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai daerah (*bottom-up*). Kepada mereka dituntut untuk mampu menerjemahkan kebijakan pusat, selain juga mampu menggali potensi yang ada di wilayah masing-masing. Selanjutnya mampu pula melakukan inovasi-inovasi baru yang perlu dibuktikan dalam bentuk aksi secara nyata. Tanpa inovasi dan program aksi, niscaya potensi kearifan lokal yang sedemikian kaya di negeri kita tidak akan mempunyai makna yang berarti bagi bangsa dan negara.



Bagian Kelima

Penutup



Penutup

A. Kesimpulan

1. Posisi dan Fungsi

Secara universal, bagaimanapun dunia wisata merupakan bagian dari kebutuhan umat manusia, terutama masyarakat urban dan negara-negara maju di era modern. Bagi mereka berwisata ibarat kebutuhan makan, minum, dan papan yang harus terpenuhi. Khusus bagi wisatawan Muslim, kehadiran destinasi wisata halal tentu merupakan alternatif sejalan dengan keyakinan agama mereka, yakni Islam. Melakukan wisata halal bagi seorang Muslim tentu akan meraih manfaat ganda secara bersamaan. Yakni manfaat lahir dengan memperoleh kepuasan yang dialaminya dan manfaat batin (spiritual) dengan tidak meninggalkan ibadah kewajibannya.

Sebab itu dalam setiap destinasi wisata harus nampak nilai-nilai religiositasnya yang mengingatkan

para pengunjung Muslim untuk terus ingat pada Tuhannya. Adanya tempat ibadah yang mumpuni, pelayanan dengan penuh kasih, kejujuran, keterbukaan, keamanan, kenyamanan dan lain sebagainya adalah merupakan implementasi ajaran *rahmatan lil 'alamin* dan dakwah bilhal dalam dunia wisata halal.

2. Sandaran Yuridis dan Etis

Yuridis dimaksudkan bahwa pariwisata halal harus memiliki pijakan hukum yang jelas yang akan mewarnai paradigma pengembangan selanjutnya. Sedangkan etis dimaksudkan bahwa dalam tataran operasionalnya, pariwisata halal harus dipandu oleh norma-norma etis yang dalam hal ini dikenal dengan istilah akhlak dalam Islam. Tentu saja keduanya tidak boleh disimpangi dalam setiap upaya pengembangan pariwisata yang berbasis syariah.

Pijakan hukum pariwisata halal sudah pasti bersumber utama dari ajaran wahyu, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Namun demikian karena kedua sumber pokok ini tidak secara khusus mengatur masalah wisata sehingga masih dibutuhkan ijtihad dari para pakar (ulama) yang kompeten dan mempunyai otoritas dalam bidang hukum syariat (fikih) antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk fatwa.

Selain hukum, pariwisata halal juga membutuhkan sandaran etis bagi para pegiat wisata di segala lini agar perilaku mereka sesuai dengan yang disyariatkan dalam melayani para wisatawan. Sejalan dengan karakter pariwisata yang dikembangkan, tentu saja norma-norma etis pemandu yang dimaksud adalah yang bersumber dari ajaran wahyu yang sejatinya akan mencerminkan keadaban tidak saja kepada para wisatawan, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah kepada Tuhan alam semesta.

3. Karakteristik

Dalam hal karakteristik, pariwisata halal tidak sama dengan pariwisata konvensional. Perbedaan itu sebagai konsekuensi dari paradigma yang melatari masing-masing keduanya. Pariwisata halal berkembang dari rahim paradigma yang berbasiskan *uluhiyyah-rabbniyyah* yang transenden dan spiritualistik yang bersumber pokok dari ajaran wahyu. Sedangkan pariwisata konvensional lahir dari rahim paradigma materialistik sekularistik yang bersumber dari hasil renungan pemikiran manusia dalam bentuk sains.

Kendati demikian dalam pengembangannya tidaklah mungkin pariwisata halal lepas sama sekali dari pemikiran dan pengembangan pariwisata konvensional yang telah lama ada dan berkembang di berbagai kawasan di dunia. Artinya, dalam pengembangan industri pariwisata halal bagaimanapun masih dibutuhkan hasil pemikiran dan pengalaman pengembangan pariwisata konvensional. Namun demikian harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Karena prinsip-prinsip inilah sejatinya yang menjadi karakteristik utama pariwisata halal yang membedakannya dengan pariwisata konvensional.

4. Peran Sentral Sumber Daya Manusia (*human resource*)

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) dalam industri pariwisata halal sangatlah vital dan menentukan sekali. SDM di sini yang dimaksudkan tidak saja mereka sebagai pelaksana langsung seperti pengusaha, namun juga mereka selaku pengambil kebijakan, dalam hal ini, para penguasa dari tingkat pusat (Menteri Pariwisata beserta jajarannya) sampai dengan penguasa daerah di mana destinasi wisata berada dan dikembangkan.

Mereka dituntut komitmennya dan harus bersinergi dalam membangun industri pariwisata yang berprinsipkan syariah. Kalangan penguasa dan pengusaha di daerah harus mampu menerjemahkan kebijakan makro di pusat agar dapat dilaksanakan

di lapangan secara riil (mikro) sesuai program yang diidealkan. Kendati tidak mustahil diperlukan adanya inovasi dan kreasi baru pengembangan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing asalkan saja masih dalam koridor syariah.

Tentu saja keberadaan SDM sebagai faktor penentu keberhasilan tidaklah cukup hanya bermodalkan ilmu pengetahuan (sains) dan *skill* semata, namun juga dituntut pemahaman ilmu syariah, sehingga dengan demikian, mereka akan mampu mengelola industri pariwisata halal secara profesional. Dan pada gilirannya mereka akan mampu bersaing di tingkat global yang semakin kompetitif untuk mampu menarik wisatawan sebanyak-banyaknya.

5. Infrastruktur Pendukung

Yang dimaksud infrastruktur di sini adalah segala sesuatu yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan industri pariwisata halal secara umum. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, kiranya sulit sebuah destinasi bisa berkembang secara maksimal sesuai yang diharapkan, terutama oleh para wisatawan sebagai *stakeholder*. Bukankah infrastruktur itu pada dasarnya merupakan sarana untuk mendapatkan kenyamanan, kemudahan, keamanan, kepuasan dan lain sebagainya yang ingin menikmati sebuah destinasi yang dikunjungi. Atau, dengan kata lain, infrastruktur pada hakikatnya adalah merupakan sarana pelayanan maksimal bagi wisatawan sebagai prakondisi untuk mendapatkan kepuasan yang diharapkan.

Bukankah industri pariwisata itu pada hakikatnya adalah menjual jasa kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga perlu dikelola secara profesional dengan dukungan sarana-prasarana yang memadai. Misalnya yang berkaitan dengan masalah jalan masuk (akses), apakah memadai atau tidak yang akan menjadi faktor pertimbangan bagi calon wisatawan untuk berkunjung. Jika kurang, atau bahkan tidak memadai, maka berkecenderungan masyarakat

akan kurang berminat untuk berkunjung yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik destinasi yang dikembangkan.

Khusus untuk industri pariwisata halal, ketersediaan infrastruktur dimaksud antara lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sarana ibadah, seperti masjid atau mushala yang *representative* (bersih, air suci yang cukup, mudah terjangkau). Artinya, tidak sekadar ada. Demikian pula yang berkaitan langsung dengan sarana kebutuhan akomodasi atau tempat penginapan dalam bentuk hotel (atau dalam bentuk apa pun) yang memenuhi syarat secara syariah agar wisatawan (Muslim) merasakan kepuasan. Kepuasan hanya akan dapat diperoleh jika pihak manajemen menyiapkan segala keperluan pengunjung, seperti ketersediaan tempat shalat bagi para tamu dengan fasilitas yang memadai. Setiap kamar, perlu tersedia perangkat ibadah (lantai dan perempuan), ada petunjuk kiblat, jadwal waktu shalat, hiburan (musik) dan sistem pelayanan yang beraromakan nilai-nilai Islam. Tanpa kecuali makanan dan minuman halal, spa dan kolam renang dan lain sebagainya yang tidak berlawanan dengan syariah.

Demikian pula yang tidak kalah pentingnya kemudahan dalam mendapatkan restoran halal, biro perjalanan (travel), *guide*, dan lain sebagainya yang benar-benar dibutuhkan selalu tersedia sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, segala aspek penunjang untuk membangun industri pariwisata halal seperti tempat atraksi, kebutuhan akomodasi, kemudahan tempat konsumsi, ketersediaan biro perjalanan, kemudahan pemandu wisata, kemudahan aksesibilitas dan lain sebagainya harus benar-benar tersedia dan berlandaskan prinsip syariaiah. Inilah sejatinya kiat sukses dan keberlangsungan pengembangan sebuah industri pariwisata halal yang perlu mendapat perhatian secara saksama dan profesional.

6. Strategi Pengembangan

Indonesia yang dikenal sebagai negara yang multikultural dan kaya dalam berbagai aspeknya, pada dasarnya tidaklah sulit

untuk mengembangkan industri pariwisata halal yang dapat dijual. Indonesia adalah ibarat potongan surga di planet bumi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada rakyatnya. Di antara kekayaan (*property*) yang dimiliki, antara lain keragaman budaya (*culture*), banyaknya peninggalan sejarah (*heritage*), besarnya jumlah sumber daya manusia (*etnis-human resource*), sumber daya alam dengan berbagai variasinya (*natural resource*), dan lain-lainnya.

Kesemuanya itu merupakan warisan (*legacy*) yang dimanahkan kepada bangsa Indonesia agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Agar semua potensi itu mempunyai nilai ekonomi, maka perlu dikelola sebagai destinasi wisata baru, antara lain dengan cara mempertahankan dan memlihara yang telah ada, melakukan konversi dari wisata yang ada atau menciptakan hal yang baru. Dengan demikian, strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah perlu adanya pemeliharaan (*care-safeguarding*), konversi (*conversion-develop*), dan inovasi baru.

7. Wisata Halal sebagai Bidang Ilmu Yang Terbuka

Perlu diakui secara jujur bahwasanya pariwisata halal merupakan salah satu objek, sekaligus subjek keilmuan dalam arti luas. Karena itu untuk mempercepat pengembangannya secara akademik perlu dikaji dari berbagai disiplin ilmu. Sisi positif adanya kajian multidimensi itu antara lain untuk memahami dan memperluas wawasan tentang kepariwisataan sebagai sebuah kebutuhan di tengah masyarakat yang kian kompleks dan dinamis.

Untuk itu, problematika yang terkait dengan masalah kehalalan yang merupakan karakter pariwisata halal misalnya, dengan sendirinya dibutuhkan ilmu fikih yang akan menetapkan wilayah antara yang halal dan yang haram dalam dunia kepariwisataan. Di sinilah arti penting perlu ketersediaan hotel, restoran, travel, dan sarana penunjang lainnya yang menerapkan prinsip-prinsip halal dalam Islam.

Selain itu, pariwisata halal juga membutuhkan kajian dari *maqashid al-syariah* yang akan memberikan pemahaman batasan-batasan wilayah mana yang wajib dilindungi bagi wisatawan. Utamanya yang berkaitan dengan aspek keyakinan (agama) agar secara teologis mereka tetap dapat melakukan ibadah (shalat) di tengah aktivitas melakukan perjalanan wisata. Sebab itu ketersediaan sarana ibadah di tempat wisata merupakan sebuah keniscayaan.

Di samping itu juga diperlukan kajian dari perspektif perundangan nasional yang terkait, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Manfaat kehadiran undang-undang yang pertama ini antara lain untuk menjamin kepastian hukum yang mewajibkan kepada setiap produsen atau penjual untuk mencantumkan label halal untuk setiap produk yang dihasilkan (dijual). Samahalnya perundangan yang kedua, juga untuk meyakinkan kepada wisatawan bahwa dirinya mendapat jaminan secara hukum dalam mendapatkan haknya dan dalam menjalankan kewajibannya selama melakukan wisata.

Tentu saja, dalam membangun industri pariwisata halal dibutuhkan berbagai inovasi dan kreasi baru tanpa henti dengan jalan melakukan eksplorasi segala potensi yang dimiliki. Potensi-potensi dimaksud tentunya dapat digali dari berbagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang akan menggambarkan keunikan sebuah destinasi wisata di setiap daerah. Sebab itu inilah perlunya para pemangku kepentingan memahami dan mampu mengeksplorasi berbagai kekayaan terpendam yang sedemikian variatif dalam kearifan lokal yang banyak tersebar di berbagai kawasan di tanah air.

Perlu diketahui, bahwa pada dasarnya industri pariwisata halal merupakan implementasi dari ajaran ekonomi yang berdasarkan pada prinsip syariah. Sebab itu dalam segala aktivitasnya di tingkat operasional tidak dibenarkan menyimpang dari karakteristik ekonomi syariah dalam arti yang luas sebagaimana telah diuraikan

dalam kajian sebelumnya. Untuk itu bagaimanapun karakter ekonomi syariah seyogianya perlu selalu tercermin dalam praktik pariwisata syariah yang dibangun dan dikembangkan.

B. Saran (Rekomendasi)

Dalam upaya mengembangkan industri pariwisata halal ke depan, baik secara akademik maupun praksis pada bagian ini perlu dikemukakan beberapa saran atau mungkin sebagai rekomendasi yang dianggap perlu dan mendesak. Saran ini ditujukan kepada berbagai pihak terkait yang bersentuhan dengan industri pariwisata halal di Indonesia.

1. Sebagaimana kita ketahui dan kita pahami bahwa pariwisata halal merupakan industri yang relatif baru di Indonesia sehingga dibutuhkan instrumen hukum yang secara spesifik mengatur eksistensinya dan segala aktivitasnya. Ini menunjukkan bagaimanapun kehadiran perundangan tentang wisata halal dalam waktu relatif cepat merupakan sebuah tuntutan kebutuhan. Tentu saja hal ini merupakan otoritas Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) dan Pemerintah (Eksekutif).
2. Khusus untuk sandaran *syar'i*-nya, yang menjadi ikon utama dan merek pariwisata halal, dengan sendirinya dituntut perlu adanya peran aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dapat memproduksi fatwa yang dianggap mendesak. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum secara *syar'i* bagi berbagai pihak terkait, tanpa kecuali bagi masyarakat Muslim selaku *stakeholders* yang utama.
3. Untuk menjamin adanya konsistensi hukum dan etika yang seyogianya wajib dipatuhi dalam seluruh aktivitas wisata halal, tentu saja diperlukan adanya semacam badan pengawas syariah yang secara khusus melakukan fungsi pengawasan. Sebagaimana yang dipraktikkan di dunia perbankan syariah oleh MUI di Indonesia saat ini.

4. Kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan industri pariwisata halal di Indonesia, terutama bagi mereka yang bersentuhan langsung dengan segala aktivitas wisata halal, perlu memiliki komitmen dan konsistensi untuk selalu berpedoman pada hukum yang berlaku, baik hukum syariat maupun nasional yang berlaku dan relevan.
5. Kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di kawasan di mana destinasi wisata halal dikembangkan, dituntut partisipasinya untuk turut menyukseskan seluruh program yang dicanangkan. Antara lain, kepada mereka dituntut turut menjaga keamanan dan kenyamanan bagi setiap turis yang berkunjung. Partisipasi semacam ini dalam Islam merupakan bagian dari amal shaleh yang dianjurkan, sekaligus merupakan ajaran etika yang sangat terpuji.
6. Agar industri pariwisata halal di Indonesia bisa kompetitif dan segera mengalami kemajuan, hendaknya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata perlu banyak melakukan sosialisasi melalui berbagai alternatif dan variatif. Antara lain banyak melakukan penelitian dan kajian akademik yang melibatkan perguruan tinggi. Mengadakan seminar, workshop, karya tulis, pameran, menciptakan *event-event* spesifik dan unik yang menarik masyarakat, dan lain sebagainya.
Khusus untuk yang terakhir ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Pesona Khazanah Ramadhannya pada pertengahan tahun 2017, bertepatan dengan bulan Ramadhan 1438H lalu. Selain juga yang secara agresif seringkali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, seperti Lomba Kebaya, Pesta Budaya Lokal Banyuwangi dan lain-lainnya.
7. Untuk menjadikan industri pariwisata sebagai komoditas unggulan, selain migas dan batubara, hendaknya pemerintah perlu segera mengembangkan destinasi wisata halal baru di Tanah Air, selain Lombok dan Sumatera Barat yang dikenal sebagai wilayah Muslim dengan berbagai ikon keislaman

dan peninggalan sejarah yang dapat dijual. Propinsi Aceh Darussalam misalnya, merupakan salah satu aset nasional yang kiranya banyak menyimpan potensi besar untuk dijadikan destinasi baru ke depan. Demikian pula untuk daerah-daerah lain yang selama ini banyak menyimpan potensi yang masih perlu dilakukan pemetaan secara nasional dan terprogram.

8. Dalam membangun industri pariwisata halal baru hendaknya menggunakan konsep terpadu, tidak parsialistik antarkomponen yang terkait dan berkepentingan dalam satu kawasan. Komponen dimaksud antara lain pihak pengusaha objek wisata, hotel, rumah makan, pusat perbelanjaan, perbankan dan lain sebagainya yang kesemuanya itu harus satu visi dan misi untuk menerapkan nilai-nilai syariah.

Inilah kiranya konsep ideal yang justru harus dirancang oleh setiap daerah di Indonesia. Jika tidak, maka samahalnya paket pariwisata yang parsial, seperti dalam satu kawasan pengembangan destinasi wisata halal, namun demikian para wisatawan sulit mendapatkan tempat ibadah, hotel atau restoran yang syariah. Di sinilah arti penting perlunya usaha terpadu, terintegrasi, dan terkoneksi antara yang satu dengan daya dukung yang lain.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Abdurrahman, Zen, *Wisata Sejarah Bersama Al-Qur'an*, Yogyakarta: Diva Press, 2012
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, ter. Samson Rachman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Al_Ghazali, Muhammad, *Khuluq al-Muslim*, Dar al-Kutub al-Haditsah, 1964 M
- Al-Hasaniy, Ismail, *Nadariyat al-Maqashid 'Inda al-Imam Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur*, Herdon: Al-Ma'had al-Islami li al-Fikr al-Islami, 1995
- Ali, H. Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RjaGrafindo Persada, 2013

Al-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Al-Ruki, Muhammad, *Qawaid al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Qalam, tt

Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, alih bahasa, K.H. Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Amin, Ma'ruf, Solusi Hukum Islam (*Makharij Fiqhiyyah*) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundangan RI), disampaikan dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ekonomi Muamalat Syariah, 24 Mei 2017 di UIN Maliki Malang

Anggrianto, Ronny, *Revolusi Gila Bisnis & Travel*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012

Anonim, "Ajak Daerah Tetangga Meriahkan JFC," dalam *Jawa Pos*, edisi 10 Agustus 2017

Anonim, "Cinta Agama Meski Nyawa Taruhannya," dalam *Republika*, edisi 30 April 2017

Anonim, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia, N0. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Anonim, "Jalan Terjal Memaknai Agama," dalam *Republika*, edisi Ahad 22 April 2017

Anonim, "Jember Fashion Carnival," dalam *Kompas*, edisi 10 Agustus 2017

Anonim, "Jember Kota Karnaval Indonesia," dalam *Republika*, edisi 14 Agustus 2017

Anonim, "Kembangkan Potensi Besar UKM," dalam *Jawa Pos*, edisi 28 Oktober 2017

- Anonim, "Makam RA Kartini Jadi Tujuan Wisata Ziarah Nasional," dalam *Republika*, edisi 22 April 2017
- Anonim, "Nilai Spiritualitas Kartini," dalam *Republika*, edisi 27 April 2017
- Anonim, *Petunjuk Pariwisata Jawa Tengah & DIY*, Yogyakarta: PT Purimedia Wisataria, 1992
- Anonim, "Seba Baduy 2017," dalam *Republika*, edisi 29 April 2017
- Anonim, "Seba Baduy ," dalam *Republika*, edisi 30 April 2017
- Anonim, "Tari Saman," dalam *Republika*, edisi 27 Oktober 2017
- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1999 tentang Kepariwisata
- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Anonim, "Wisata Halal Andalan Baru NTB," dalam *Jawa Pos*, edisi 8 September 2017
- Anshori, Yusak dan Dewa Gde Satrya, *Pariwisata Dengan Huruf L*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2001
- Antonio, Muhammad Syafii, *Asma'ul Husna For Success in Business & Life*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2009
- Ariniro, I. Rofi'ie, *Panduan Wisata Religi Ziarah Wala Sanga*, Yogyakarta: Saufa, 2016
- Assidiq, Yusuf, "Sensasi Wisata Kampung Kopi Bondowoso," dalam *Republika*, edisi 4 Mei 2017
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997

- Auda, Jaser, *Maqashid al-Syari'ah Dalil lil Muftadiin*, Virginia: Al-Ma'had al-Islamiy li al-Fikr al-Islamiy, 2011
- Bagyono, *Teori dan Praktik Hotel Front Office*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012
- Bahammam, Fahad Salim, *Dalil As-Sa'ih Al-Fighi Ahkam Syar'iiyyah wa Tawdhihat Muhaddadah li As-Sa'ih fi Jami'Al-Majallat*, ter. Ganna Pryadarizal Anaedi & Syifa Annisa, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012
- Bakry, H. Nazar, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Battour, Mohamed and Mohd Nazari Ismail, "Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future" (2015), <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Budi, Agung Permana, *Manajemen Marketing Perhotelan*, Yogyakarta:2013
- Cetin, Gurel and Mithat Zeki Dincer, "Muslim Friendly Tourism (MFT): A Discussion," *Journal of Tourismology*, Vol. 2, No. 1
- Chanin, Orphan, et.al, "Guidelines on Halal Tourism Management in the Andaman Sea Coast of Thailand", *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3 No. 8, August 2015
- Chapra, Umer, *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqashid Syari'ah*, London: IIIT, 2008
- Chapra, M. Umer, *Islam and the Economic Challenge*, Herndon: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1995
- Chapra, M. Umer, *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy*, dalam Khurshid Ahmad (ed), *Studies in Islamic Economics*, Jeddah and United Kingdom: International Centre for Research in Islamic Economics and The Islamic Foundation, 1976

- Chookaew, Sureerat, et al, "Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country," *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3. No. July 2015
- Damanik, Janianton, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- De George, Richard T., *Business Ethics*, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1999
- Djakfar, Muhammad, *Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Globalisasi*, Malang: UIN-Maliki Press, 2015
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, edisi ketiga, Malang: UIN-Maliki Press, 2016
- Djazuli, H.A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Echols, John M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1990
- Fajar, Rahmat, "Memanfaatkan Potensi Besar Pariwisata Halal," dalam *Republika*, edisi 24 Agustus 2017
- Fajar, Rahmat, "Pengalaman Malaysia Kembangkan Wisata Halal," dalam *Republika*, edisi 24 Agustus 2017
- Fauzia, Eka Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014
- Fizriyani, Wirda, "Malang Raya Incar Wisatawan Timur Tengah," dalam *Republika*, edisi 27 Oktober 2017
- Harun, Azhar dan Eko Suprayitno, "The Important Factors of Tourism Development in Singapore," dalam *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2011, 91-97

- Hermantoro, Henky, *Creative-Based Tourism Dari Wisata Kreatif Menuju Wisata Kreatif*, Depok: Penerbit Aditri, 2011
- Husein, Harun, "Geliat Wisata Ramah Muslim Korea Selatan," dalam *Republika*, edisi 7 September 2017
- Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, Jilid III, Doha: Kementerian Wakaf dan Bidang Keislaman Daulah Qatar, 2004
- Ibn Taymiyah, *al-Qawaid al-Quraniyah al-Fiqhiyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1422 H)
- Jaelani, Aan, Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek, <https://ideas.repec.org/f/pja475.html> (Maret 2017)
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, ter. Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2010
- Kamarulzaman, Yusniza, et. al., The Acceptance of Islamic Hotel Concept in Malaysia A Conceptual Paper, Departement of Marketing and Information System Faculty of Business and Accountancy University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur Malaysia
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam*, ter. Machnun Husein, Yogyakarta: Aditya Media, 2000
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014
- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002
- Keddie, Nikki R., (ed), *Scholar, Saints, and Sufis*, California: University of California Press, 1978
- Kelana, Irwan dan Rahmat Fajar, "Tiga Jurus Majukan Wisata Halal," dalam *Republika*, edisi 18 Agustus 2017
- Kelana, Irwan, "PWH Gelar Bangkok Pattaya Halal Edu Trip," dalam *Republika*, edisi 27 Juli 2017

- Kelana, Irwan, "Stakeholder Wisata Muslim Perlu Sinergi," dalam *Republika*, edisi 27 Juli 2017
- Kusumawardhani, Noer Qomariah, "Sepintal Kisah di Balik Tari Topeng," dalam *Republika*, edisi 26 Oktober 2017
- Machfudz, Masyhuri, *Analisis Pasar Pariwisata*, dalam Naskah Buku yang Belum Diterbitkan, 2007
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, ter. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Mansouri, Shirzad, "Role of Halal Tourism Ideology in Destination Competitiveness: A Study on Selected Hotels in Bangkok, Thailand," *International Conference on Law, Education and Humanities (ICLEH'14) Jan. 30-31, 2014 Pattaya (Thailand)*
- Mansurnoor, Iik Arifin, *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990
- Masful, Mila Falma, "Halal Tourism: A Value of Local Wisdom and Belief Concept in Rural Area Pilubang Payakumbuh, West Sumatera" *The Messenger, Volume 9, Nomor 1, Edisi Januari 2017*. mila.falma88@gmail.com
- Miladiyah, Uyunur Rochmawati dan Slamet, "Strategi Competitive Advantage Untuk Membangun City Branding Kota Batu Sebagai Kota Wisata", dalam *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2014, 89-99
- Moelyono, Mauled, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan dan Kebutuhan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Mu'tasim, Rajasa, dkk., *Agama dan Pariwisata Telaah Atas Transformasi Keagamaan Komunitas Muhammadiyah Borobudur*, Yogyakarta: PTIK UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2013
- Nadjib, Ala'I, *Pilgrime and Tomb from Ritual to Religious Tourism Industry*, Jurnal Bimas Islam Vol.7 No. I 2014

- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Islam, Economics, and Soeciety*, London and New York: Kegan Paul International, 1994
- Noor, Ahmad Fikri, "Persaingan Maskapai Makin Meriah," dalam *Republika*, edisi 25 Agustus 2017
- Nursyamsi, Muhammad dan Sapto Andika Candra, "Berlomba Kembangkan Wisata Halal," dalam *Republika*, edisi 16 Agustus 2017
- Nursyamsi, Muhammad, "Menanti Wisata Halal di Mandalika," dalam *Republika*, edisi 27 Juli 2017
- Payangan, Otto R., *Pemasaran Jasa Pariwisata*, Bogor: IPB Press, 2014
- P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Pitana, I. Gede dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005
- Pitana, I Gede dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Pratiwi, Fuji, "SDM Wisata Halal Harus Profesional," dalam *Republika*, edisi 23 Mei 2017
- Qardhawi, Yusuf, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy*, Kairo-Mishr, Maktabah Wahbah, 1995
- Rahman, Asymuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977
- Salleh, Nor Zafir Md, et.al., The Practice of Shariah-Compliant Hotel in Malaysia, *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 5 No. 1, February 2014

- Sam, H.M. Ichwan, dkk (tim penyunting), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Kerja Sama DSN-MUI dengan Bank Indonesia, 2003
- Saud, Mahmud Abu, *GBEI Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, ter. Achmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Sedarmayanti, *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014
- Setyanavidita dan Livikancasera, "Manjakan Wisatawan Muslim," dalam *Republika*, edisi 25 Agustus 2017
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Mizan, 1996
- Sholikhah, Binti, "Cagar Budaya Surabaya Jadi Destinasi Wisata," dalam *Republika*, edisi 29 Juli 2017
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *The Economic Enterprise in Islam*, Lahore: Islamic Publication Ltd, 1979
- Suherlan, Ade, "Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism," *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015): 61-72
- Sunaryo, Bambang, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2013
- Suryana, Wahyu, "Umat Makin Cintai Masjid," dalam *Republika*, edisi 24 Mei 2017
- Sutrisno, Debbie, "Pariwisata Bisa Jadi Sumber Devisa Terbesar," dalam *Republika*, edisi 18 Oktober 2017
- Sya'rawi, M. Mutawalli, *Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme*, ter. H. Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1991
- Syarifuddin, H. Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

- Thitthongkam, Thavorn and John Walsh, *An Analysis of Factors Influencing the Competitiveness of the Thai Tourism Industry*, 2010 International Conference on Business and Economics Research, Vol.1 (2011) @ (2011) IACSIT Press, Kuala Lumpur, Malaysia
- Thoriquddin, H. Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid al-Syariah Ibnu 'Ashur*, Malang: UIN-Maliki Press, 2015
- Velasquez, Manuel G., *Business Ethics: Concept and Cases*, 3th Edition, Englewood Cliffs N J: Printice Hall, 1992
- Widagdyo, Kurniawan Gilang, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia", *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015): 73-80
- Widodo, Reja Irfa, "Menjadi Tour Leader Muslim Bersertifikat, " dalam *Republika*, edisi 27 Juli 2017
- Wind, Ajeng, *Membuat Pembukuan Restoran Gampang Buku Panduan Praktis Step By Step*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2014
- Yusniza, Kamarulzaman, et al., *The Acceptance of Islamic Hotel Concept in Malaysia: A Concept Paper*, Departemen of Marketing and Information System Faculty of Business and Accountancy University of Malaya, Phone: 03-73673915, Fax: 03-79673810
- Zarqa, Ahmad Ibn Syekh Muhammad, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1422 H
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Zein, Abdul Baqir, "Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia," dalam *Republika*, edisi 30 April 2017
- Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1987

Tentang Penulis

H. Muhammad Djakfar adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik (UIN-Maliki) Malang. Profesor yang telah berkhidmah di dunia akademik selama 36 tahun ini sesuai bidang keahliannya, yakni Ekonomi Islam, selama ini mengasuh mata kuliah Ekonomi Islam, Etika Bisnis, Hukum Bisnis dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, baik di tingkat strata satu (sarjana) maupun strata dua (program magister) dan tiga (program doktor). Selain juga banyak menguji disertasi di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Sebagai seorang akademisi dengan jabatan Guru Besar, selain mengajar, membimbing, menguji, dan sebagai nara sumber, ia juga banyak meneliti, melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan aktif pula menulis karya ilmiah baik di jurnal maupun dalam bentuk buku. Beberapa karya tulis dalam bentuk buku tiga tahun terakhir ini antara lain

adalah **Agama, Etika, dan Ekonomi** Menyingkap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi; **Wacana Teologi Ekonomi** Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Globalisasi; **Hukum Bisnis** Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah; dan **Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi** Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia yang ada di tangan Anda.